

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 September 2018
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	27 September 2018
Tanggal Penjatahan	:	1 Oktober 2018
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	2 Oktober 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	2 Oktober 2018
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	3 Oktober 2018

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").**



## PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa Titipan, Ekspedisi dan Pergudangan, Transportasi dan Pengangkutan, Percetakan, Keagenan, *Outsourcing* dan Transaksi Keuangan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### Kantor Pusat

Kalibata Office Park  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G  
Jakarta Selatan, 12740  
Telepon : (021) 2280 6611; Fax : (021) 2280 6627  
Email: corp.secretary@sap-express.com  
Website: www.sap-express.id

### Kantor Administrasi & Pergudangan

Jl. Komodor Udara No. 28  
Halim Perdana Kusuma  
Jakarta Timur, 13650

### Jaringan Usaha

Memiliki 58 Kantor Cabang dan 12 Perwakilan Cabang yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 433.333.300 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 52% (lima puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSP"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp108.333.325.000 (seratus delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0012650.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214433 tanggal 8 Juni 2018 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214434 tanggal 8 Juni 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0080101.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 121/SK-DIR/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 3.219.800 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus) saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Informasi Tentang Efek Yang Ditawarkan dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT RHB Sekuritas Indonesia

### PENJAMIN EMISI EFEK

PT Artha Sekuritas Indonesia • PT KGI Sekuritas Indonesia • PT NH Korindo Sekuritas Indonesia • PT Onix Sekuritas

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DENGAN PERUSAHAAN SEJENIS YANG MUNGKIN AKAN SEMAKIN KETAT PADA MASA YANG AKAN DATANG. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

PT Satria Antar Prima Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat No. 035/CORSEC-SAP/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 24 Juli 2018 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT RHB Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN</b>	<b>iii</b>
<b>I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN</b>	<b>1</b>
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM</b>	<b>6</b>
<b>III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN</b>	<b>7</b>
<b>IV. FAKTOR RISIKO</b>	<b>24</b>
<b>V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK</b>	<b>30</b>
<b>VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b>	<b>31</b>
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	31
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	32
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	34
D. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN	34
E. STRUKTUR ORGANISASI	42
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	42
G. SUMBER DAYA MANUSIA	50
H. STRUKTUR KEPEMILIKAN	53
I. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	53
J. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)	53
K. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	53
L. ASURANSI	75
M. ASET TETAP	76
N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	76
O. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	76
P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	76
Q. TEKNOLOGI INFORMASI	83
R. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	83
<b>VII. KEBIJAKAN DIVIDEN</b>	<b>84</b>
<b>VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK</b>	<b>85</b>
<b>IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b>	<b>87</b>
<b>X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM</b>	<b>89</b>
<b>XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN</b>	<b>95</b>
<b>XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b>	<b>97</b>
<b>XIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN</b>	<b>117</b>

Halaman ini sengaja dikosongkan

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	:	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
Agen Penjualan	:	Berarti pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.
Akuntan Publik	:	Berarti Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anggota Bursa	:	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
<i>Application Programming Interface</i> atau "API"	:	Berarti suatu fungsi dalam pemrograman yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
Bapepam dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penerus Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM, dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- Biro Administrasi Efek atau “BAE” : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 105 tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 103 tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 35 tanggal 12 September 2018 yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Bursa Efek atau BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- Cash On Delivery atau “COD” : Berarti salah satu metode pembayaran barang yang dibeli secara *online*, dimana uang dibayarkan oleh pembeli bersamaan dengan pengantaran barang yang dibeli.
- Daftar Pemegang Saham : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- DPPS : Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
- Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
- ESA : Berarti *Employee Stock Allocation* (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
- FKPS : Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
- FPPS : Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
- Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
- Hari Bursa : Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkominfo	:	Berarti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (dahulu bernama Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Departemen Penerangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Kemenkumham	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadmsitrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT RHB Sekuritas Indonesia, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan FPPS.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkominfo	:	Berarti Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pasar Modal	:	Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya keterbukaan informasi pada situs Emiten atau Penjamin Emisi Efek yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan POJK No. 53 Tahun 2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.



- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan No. IX.H.1 : Berarti Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI No. SP-055/SHM/KSEI/0518 tanggal 26 Juni 2018, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau "PPAS" : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 105 tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 103 tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 35 tanggal 12 September 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE" : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 104 tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 102 tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 26 tanggal 7 Agustus 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 34 tanggal 12 September 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, termasuk segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.

- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.53 Tahun 2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten dengan Aset Skala Menengah tanggal 19 Juli 2017, dan dengan memerhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- Perseroan : Berarti PT Satria Antaran Prima Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
- Perusahaan Publik : Berarti Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pemegang Saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.0000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- POJK No. 11 Tahun 2017 : Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
- POJK No. 25 Tahun 2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 22 Juni 2017.
- POJK No. 30 Tahun 2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
- POJK No. 32 Tahun 2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 33 Tahun 2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 34 Tahun 2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 35 Tahun 2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

- POJK No. 53 Tahun 2017 : Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten dengan Aset Skala Menengah tanggal 19 Juli 2017.
- POJK No. 54 Tahun 2017 : Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah tanggal 19 Juli 2017.
- POJK No. 55 Tahun 2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
- POJK No. 56 Tahun 2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
- PPh : Berarti Pajak Penghasilan.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM *juncto* POJK No. 54 Tahun 2017.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan POJK No. 53 Tahun 2017.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
- Rupiah atau Rp : Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- SABH : Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.

- Saham Yang Ditawarkan : Berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 433.333.300 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 52% (lima puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham.
- Surat Kolektif Saham : Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Tanggal Distribusi : Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
- Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Prospektus.
- Tanggal Pengembalian/  
*Refund* : Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
- Tanggal Penjatahan : Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.
- TIK : Berarti Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- UU Ketenagakerjaan : Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279).
- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).

#### **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

- Perseroan atau SAP : Berarti PT Satria Antaran Prima Tbk

## I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 433.333.300 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) atau sebesar 52% (lima puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp108.333.325.000 (seratus delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0012650.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214433 tanggal 8 Juni 2018 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214434 tanggal 8 Juni 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0080101.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 121/SK-DIR/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 3.219.800 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus) saham dari jumlah saham yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").



### PT SATRIA ANTARAN PRIMA Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa Titipan, Ekspedisi dan Pergudangan, Transportasi dan Pengangkutan, Percetakan, Keagenan, *Outsourcing* dan Transaksi Keuangan

#### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

##### Kantor Pusat

Kalibata Office Park  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G  
Jakarta Selatan, 12740  
Telepon : (021) 2280 6611; Fax : (021) 2280 6627  
Email: corp.secretary@sap-express.com  
Website: www.sap-express.id

##### Kantor Administrasi & Pergudangan

Jl. Komodor Udara No. 28  
Halim Perdana Kusuma  
Jakarta Timur, 13650

##### Jaringan Usaha

Memiliki 58 Kantor Cabang dan 12 Perwakilan Cabang yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DENGAN PERUSAHAAN SEJENIS YANG MUNGKIN AKAN SEMAKIN KETAT PADA MASA YANG AKAN DATANG. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

Perseroan didirikan dengan nama PT Satria Antaran Prima berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Bambang Sularso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-21298.40.10.2014 tanggal 20 Agustus 2014 dan terdaftar pada Daftar Perseroan pada Nomor AHU-0077725.40.80.2014 tanggal 20 Agustus 2014.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0012650.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214433 tanggal 8 Juni 2018 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214434 tanggal 8 Juni 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0080101.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018 (“**Akta 32/2018**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta 32/2018 adalah sebagai berikut:

<b>Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham</b>			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Budyanto Darmastono	398.000.000	39.800.000.000	99,50
Yuwono Darmastoto	2.000.000	200.000.000	0,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

<b>Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham</b>						
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>		<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Budyanto Darmastono	398.000.000	39.800.000.000	99,50	398.000.000	39.800.000.000	47,76
Yuwono Darmastoto	2.000.000	200.000.000	0,50	2.000.000	200.000.000	0,24
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	-	-	-	433.333.300	43.333.330.000	52,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>833.333.300</b>	<b>83.333.330.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>		<b>766.666.700</b>	<b>76.666.670.000</b>	

#### **Program Alokasi Saham kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation* (“ESA”))**

Berdasarkan Akta 32/2018 dan Surat Keputusan Direksi No. 121/SK-DIR/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, Perseroan telah menyetujui Program ESA, yaitu pengalokasian saham kepada pegawai sebanyak 3.219.800 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus) saham dari jumlah saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini. Saham yang diperoleh dari hasil ESA memiliki hak yang sama dengan saham-saham lain yang diterbitkan oleh Perseroan.

Program ESA diperuntukkan kepada karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum.

**Tujuan pelaksanaan program ESA adalah:**

1. Sebagai insentif bagi para pegawai atas kinerja yang telah dicapai;
2. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk turut memiliki saham Perseroan;
3. Memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya, serta untuk mencapai target Perseroan;
4. Mempertahankan pegawai yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi penting bagi Perseroan;
5. Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan pegawai untuk kemajuan Perseroan.

ESA Bonus Saham diimplementasikan oleh Perseroan dalam hubungannya dengan Penawaran Umum Perdana dengan memerhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan IX.A.7 dalam rangka pemesanan dan penjataan efek dalam penawaran umum yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditawarkan kepada publik, dialokasikan sebagai jatah pasti kepada pegawai Perseroan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Perseroan ("Saham ESA Bonus").

**Syarat Kepesertaan**

Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA.

Pegawai yang dapat diikutsertakan dalam program ESA adalah pegawai yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai berikut:

1. Pegawai yang tercatat pada tanggal 31 Maret 2018 dengan masa kerja minimum 1 (satu) tahun;
2. Pegawai yang tercatat pada saat program ESA Bonus Saham dilaksanakan;
3. Pegawai yang tidak sedang dikenakan sanksi administratif;
4. Pegawai yang tercatat oleh Perseroan pada tanggal Penawaran Umum Perdana dengan masa kerja di bawah 1 (satu) tahun, namun mencapai prestasi yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

**Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan program ESA Bonus Saham**

1. Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran program ESA Bonus Saham berasal dari kas internal Perseroan.
2. Pembayaran Saham ESA Bonus akan menjadi beban Perseroan pada tahun berjalan 2018.
3. Batasan alokasi Saham ESA Bonus untuk setiap *level* pegawai tetap akan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan pada kinerja produktivitas pegawai.
4. Mekanisme pendistribusian Saham ESA Bonus adalah sebagai berikut:
  - a. Perseroan akan memberikan Saham ESA Bonus secara cuma-cuma kepada pegawai yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, atas nama masing-masing pegawai pada tanggal distribusi dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
  - b. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pembayaran atas Saham ESA Bonus ke rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada hari kerja kedua dalam Masa Penawaran Umum, atau pada hari Penawaran Umum jika pelaksanaan Penawaran Umum dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari.
5. Saham ESA Bonus yang diberikan dalam Program ESA Bonus Saham akan dikenakan *lock-up* atau tidak dapat diperjualbelikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.
6. Saham ESA Bonus dicatatkan oleh Perseroan sebagai insentif kepada pegawai serta merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.
7. Hak kepesertaan dalam program ESA Bonus Saham akan gugur apabila :
  - a. Pegawai berhenti bekerja dari Perseroan, kecuali apabila pegawai tersebut pensiun, dalam:
    - i. periode setelah alokasi hak kepesertaan dilakukan oleh Perseroan, namun sebelum distribusi saham pada waktu Penawaran Umum Perdana; dan
    - ii. periode *lock-up*;

- b. Apabila pegawai terlibat perkara kriminal, dalam:
  - i. periode setelah alokasi hak kepesertaan dilakukan oleh Perseroan, namun sebelum distribusi saham pada waktu Penawaran Umum Perdana; dan
  - ii. periode *lock-up*;
- c. Pegawai menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri, dalam:
  - i. periode setelah alokasi hak kepesertaan dilakukan oleh Perseroan, namun sebelum distribusi saham pada waktu Penawaran Umum Perdana; dan
  - ii. periode *lock-up*.
8. Dalam hal hak kepesertaan dalam program ESA Bonus Saham gugur, dalam periode setelah alokasi hak kepesertaan dilakukan oleh Perseroan namun sebelum distribusi saham pada waktu Penawaran Umum Perdana, sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (a)(i), 6(b)(i), dan 6(c)(i) di atas, Perseroan berhak untuk menunjuk pegawai lain untuk menjadi peserta dari Program ESA Bonus Saham tersebut, mengalokasikan saham kepada peserta lain, atau membatalkan hak alokasi atas saham tersebut.
9. Dalam hal hak kepesertaan dalam program ESA Bonus Saham gugur, dalam periode *lock-up*, sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (a)(ii), 6(b)(ii), dan 6(c)(ii) di atas, saham yang telah diperoleh dari Program ESA Bonus Saham tersebut, wajib dialihkan kepada pegawai lain dari Perseroan berdasarkan instruksi pengurus Perseroan, dengan tidak mengubah batas waktu *lock-up* atas Saham ESA Bonus sesuai ketentuan dalam angka 4 di atas.
10. Direksi dengan ini menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola program ESA Bonus Saham.
11. Program ESA Bonus Saham akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

#### Hak-hak Pemegang ESA

Para peserta program ESA berhak atas hak dividen, hak suara dalam RUPS, dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-hak pemegang saham lainnya.

#### Prosedur Pelaksanaan Program ESA

Peserta program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara cuma-cuma pada tanggal penjabatan saham untuk Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Peserta program akan memperoleh Formulir Konfirmasi Penjabatan Saham. Prosedur dan tata cara Program ESA akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>		<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Budyanto Darmastono	398.000.000	39.800.000.000	99,50	398.000.000	39.800.000.000	47,76
Yuwono Darmastoto	2.000.000	200.000.000	0,50	2.000.000	200.000.000	0,24
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	-	-	-	430.113.500	43.011.350.000	51,61
Program ESA	-	-	-	3.219.800	321.980.000	0,39
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>833.333.300</b>	<b>83.333.330.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>		<b>766.666.700</b>	<b>76.666.670.000</b>	



## **Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 433.333.300 (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 52% (lima puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 833.333.300 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus ) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 24 Juli 2018 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

## **Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Sesuai dengan POJK No. 25 Tahun 2017, Budiyanto Darmastono dan Yuwono Darmastoto telah memperoleh saham Perseroan sebanyak masing-masing 99.500 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus) saham dan 500 (lima ratus) saham di harga nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebelum pemecahan, atau masing-masing setara dengan 99.500.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu) saham dan 500.000 (lima ratus ribu) saham setelah pemecahan nilai nominal menjadi Rp100,- (seratus rupiah) setiap sahamnya yang berasal dari saham portepel Perseroan dengan cara setoran tunai dengan nilai transaksi masing-masing sebesar Rp9.950.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 94 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Veronika Sri Hartati, SH., Notaris di Serang, sebagaimana diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0128182 tanggal 28 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044252.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Maret 2018. Mengingat perolehan saham Perseroan oleh Budiyanto Darmastono dan Yuwono Darmastoto tersebut dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, maka Budiyanto Darmastono dan Yuwono Darmastoto berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2018 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Budiyanto Darmastono dan Yuwono Darmastoto tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 62,03% (enam puluh dua koma nol tiga persen) akan digunakan untuk pelunasan utang obligasi konversi yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 24 November 2016 yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2021, dengan nilai nominal sebesar Rp30.000.000.000 dan telah memperoleh persetujuan pelunasan dari GD Express Carrier Bhd sebagai pemegang obligasi konversi berkaitan dengan pelunasan dipercepat. Sehubungan dengan percepatan pelunasan atas obligasi konversi tersebut, Perseroan akan membayarkan premi penebusan sesuai dengan surat GD Express Bhd kepada Perseroan tertanggal 29 Juni 2018. Total pembayaran yang akan dilakukan adalah sekitar Rp67.200.000.000, terdiri dari Rp30.000.000.000 nilai nominal obligasi konversi dan Rp37.200.000.000 premi penebusan.
- b. Sekitar 37,97% (tiga puluh tujuh koma sembilan tujuh persen) akan digunakan untuk modal kerja.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 30 Tahun 2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,432% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 2,949% yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,125%, biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 2,699% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,125%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,981% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar 0,845%, biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,952% dan biaya jasa notaris sekitar 0,185%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,120% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
- Biaya lain-lain sekitar 0,382% yang terdiri dari biaya pendaftaran OJK sekitar 0,050%, BEI dan KSEI sekitar 0,041%, penyelenggaraan *Investor & Media Gathering*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,291%.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015.

### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

*Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Suhartanto (Izin Akuntan Publik No. AP. 0019) tanggal 21 Agustus 2018. Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Drs Albert Silalahi & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Albert Silalahi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0875).*

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.*

#### 1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Satria Antaran Prima berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Bambang Sularso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-21298.40.10.2014 tanggal 20 Agustus 2014 dan terdaftar pada Daftar Perseroan pada Nomor AHU-0077725.40.80.2014 tanggal 20 Agustus 2014.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0012650.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214433 tanggal 8 Juni 2018 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214434 tanggal 8 Juni 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0080101.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018.

#### 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

##### a. Kompetisi dengan Perusahaan Jasa Pengiriman Lain

Saat ini di Indonesia banyak perusahaan logistik yang terdaftar dalam *database* Kemenkominfo dan secara umum perusahaan logistik yang beroperasi memiliki jenis jasa pelayanan yang serupa dengan hanya membedakan beberapa segmen pasar yang menjadi fokus utama pelayanannya. Bahkan saat ini terdapat banyak perusahaan penyedia jasa layanan logistik yang memiliki fokus segmen pasar yang beragam guna mendapatkan potensi pendapatan yang sebesar-besarnya. Pemisahan segmen pasar kerap dilakukan dengan membagi segmen ritel dan korporasi dimana keduanya dapat dibedakan kembali berdasarkan sumber pesanan yang diterima yaitu segmen ecommerce dan non-ecommerce.

Seiring dengan berkembangnya perdagangan ecommerce di Indonesia, volume arus barang yang dikirim telah mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan permintaan jasa layanan kurir atau logistik yang ditanggapi oleh pelaku industri yaitu dengan maraknya bisnis logistik. Pertumbuhan bisnis layanan kurir membawa peta persaingan pelaku industri menjadi semakin ketat yang berakibat pada kemampuan Perseroan untuk dapat mempertahankan pangsa pasar dan memperoleh pendapatan. Guna mempertahankan posisinya di pasar, Perseroan harus senantiasa berinovasi untuk dapat memberikan layanan jasa kurir yang unik dan memberikan berbagai nilai tambah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.

#### **b. Perubahan Perilaku Konsumen**

Kondisi lalu lintas di Ibukota Jakarta dan berbagai kota besar lainnya di Indonesia menjadi salah satu alasan utama mengapa transaksi belanja dalam jaringan (*daring, online shopping*) menjadi semakin diminati masyarakat luas daripada berbelanja secara tradisional di pasar yang mempertemukan pembeli dan pedagang secara fisik. Hal ini kemudian dipermudah dengan semakin baiknya sistem sambungan internet dan penggunaan

Perubahan perilaku konsumen, khususnya konsumen ritel, yang semakin cenderung berbelanja secara *online* ini menjadi pemicu maraknya bisnis layanan kurir di Indonesia termasuk beberapa kota besar utama lainnya. Berdasarkan riset eMarketer tahun 2016, setidaknya terdapat 8,7 juta gerai *online shopping*. Jumlah ini telah meningkat dari sekitar 7,4 juta *online shopping* pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah situs *online shopping* meningkat rata-rata sekitar 24% per tahun. Pada tahun 2016 menurut MARS-SWA penetrasi belanja online adalah sekitar 29% atau sekitar 23,6 juta pelanggan yang melakukan transaksi belanja daring. Hal ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku konsumen untuk berbelanja melalui situs belanja ecommerce mendorong pertumbuhan industri Perseroan.

Operasional Perseroan akan selalu terimbas dari pergeseran perilaku konsumen dan akan senantiasa menyesuaikan dengan kondisi terkini terkait preferensi masyarakat.

#### **c. Jangkauan Operasional Pengiriman**

Jasa layanan kurir atau logistik yang dijalankan oleh Perseroan sangat tergantung dengan jangkauan operasional sesuai dengan ijin operasional yang diberikan oleh Kemenkominfo. Daerah operasional atau cakupan wilayah yang dapat dikerjakan oleh Perseroan menentukan kebijakan operasional yang diterapkan oleh Perseroan termasuk di dalamnya adalah kebijakan penetapan harga dan pengendalian biaya operasional.

Dalam penetapan prosedur operasional terkait dengan cakupan atau jangkauan wilayah operasional, Perseroan juga memperhatikan tingkat kompetisi diantara beberapa pelaku usaha sejenis agar tidak memicu adanya persaingan tidak sehat diantara para pesaing.

#### **d. Penanganan Persoalan Sumber Daya Manusia**

Aset utama dari perusahaan penyedia layanan kurir adalah sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak operasional Perseroan. Segala hal-hal yang berkaitan dengan penanganan sumber daya manusia dapat berdampak pada operasi bisnis harian; diantaranya adalah biaya sumber daya manusia atau paket remunerasi yang dibebankan setiap saat dan ketersediaan tenaga kurir yang menjadi karyawan.

##### **i. Biaya sumber daya manusia**

Selain berpedoman pada ketentuan Upah Minimum Regional dalam menentukan paket remunerasi karyawan, Manajemen juga melakukan perbandingan paket remunerasi yang diberikan oleh para pelaku industri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab karyawan yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan kompensasi yang layak dan sesuai. Perseroan selalu mengupayakan pengelolaan sumber daya yang efisien, dimana Perseroan hanya akan merekrut karyawan baru jika memang dibutuhkan, serta merekrut karyawan administratif yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. Khusus untuk kurir, Perseroan mengupayakan untuk merekrut kurir-kurir yang berpengalaman di daerahnya masing-masing, sehingga waktu pengantaran menjadi lebih singkat dan penggunaan bahan bakar menjadi lebih efisien karena kurir yang telah menguasai medan dengan baik.

- ii. Ketersediaan sumber daya manusia sebagai tenaga kurir  
Seiring dengan pertumbuhan bisnis layanan kurir, Perseroan akan membutuhkan jumlah tenaga kurir yang bertambah pula. Perluasan cakupan wilayah operasional juga menjadi faktor yang menentukan kebutuhan jumlah tenaga kurir. Disisi lain, terdapat tantangan untuk dapat melakukan perekrutan karyawan baru yang sesuai dengan standar kemampuan dan keahlian Perseroan karena jumlah karyawan yang dibutuhkan dan juga persaingan dari perusahaan sejenis di wilayah sama. Perseroan berusaha untuk terus merekrut kurir yang sudah memiliki pengalaman, sehingga meminimalisasi biaya pelatihan. Untuk beberapa wilayah yang belum memiliki SDM kurir yang kompeten, Perseroan telah memiliki kurikulum dan SOP yang telah jelas dalam memastikan standar kompetensi kurir baru tersebut dapat terpenuhi.

#### e. Perubahan Kebijakan Pemerintah Sehubungan dengan Aktivitas Pos dan Pengiriman Paket

Sebagai salah satu jenis usaha yang berada dalam pengawasan Pemerintah khususnya Kemenkominfo, industri Perseroan akan terpengaruh arah kebijakan Pemerintah melalui Menkominfo. Beberapa hal yang secara khusus berpotensi berpengaruh adalah pembatasan cakupan usaha jasa layanan kurir pos dan sejenisnya yang boleh dilakukan oleh pihak swasta (bukan BUMN atau BUMD), pembatasan struktur kepemilikan saham perusahaan logistik dan penerapan daftar negatif investasi (termasuk penerapan komposisi kepemilikan pihak asing dalam perusahaan logistik).

Disamping itu, kebijakan Pemerintah secara umum dapat mempengaruhi dunia usaha semisal penetapan pajak pendapatan dan segala ketentuan perpajakan yang terkait dengan usaha Perseroan; arah kebijakan moneter berkaitan dengan penetapan suku bunga acuan untuk fasilitas pinjaman lembaga keuangan yang dapat menjadi pilihan alternative pendanaan bagi Perseroan.

### 3. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, atau kebijakan lain yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan pungutan pada industri Perseroan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan beban tambahan atas jasa yang diberikan oleh Perseroan. Hal tersebut dapat memengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah akan memengaruhi ketersediaan pilihan pendanaan dan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan jaminan sosial dapat memengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Perubahan kebijakan pada industri jasa pengiriman seperti pembatasan cakupan usaha dan pengetatan perizinan dapat memengaruhi potensi pengembangan usaha Perseroan.

### 4. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Perseroan hanya memiliki satu segmen usaha, yaitu jasa pengiriman, sedangkan segmen usaha berdasarkan geografis adalah sebagai berikut:

	31 Desember				31 Maret			
	2015	Δ%	2016	Δ%	2017	2017	Δ%	2018
Pendapatan neto:								
Jabodetabek	55.653.939.740	96,2	109.184.037.768	17,5	128.286.467.292	27.078.032.399	57,5	42.651.636.580
Di Luar Jabodetabek	4.356.626.176	88,3	8.205.579.428	142,2	19.871.004.241	4.162.736.582	33,5	5.558.818.883
<b>Total</b>	<b>60.010.565.916</b>	<b>95,6</b>	<b>117.389.617.196</b>	<b>26,2</b>	<b>148.157.471.533</b>	<b>31.240.768.981</b>	<b>54,3</b>	<b>48.210.455.463</b>

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penjualan Perseroan berasal dari pelanggan Jabodetabek, dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 93% dari total penjualan, dan sebesar 88% pada kuartal pertama tahun 2018.

## 5. ANALISA LAPORAN LABA RUGI, LAPORAN POSISI KEUANGAN, LAPORAN ARUS KAS, DAN RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

### LABA RUGI DAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

#### a. Pendapatan

Pendapatan seluruhnya berasal dari kegiatan kurir, pergudangan, dan jasa pendukung lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	2017	Δ (%)	2018
Pihak ketiga								
pendapatan jasa kurir	60.010.565.916	95,6	117.389.617.196	26,2	148.157.471.533	31.240.768.981	54,3	48.210.455.463
<b>Total Pendapatan</b>	<b>60.010.565.916</b>	<b>95,6</b>	<b>117.389.617.196</b>	<b>26,2</b>	<b>148.157.471.533</b>	<b>31.240.768.981</b>	<b>54,3</b>	<b>48.210.455.463</b>

#### ***Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017***

Pendapatan Perseroan naik 54,3% atau sebesar Rp16.969.686.482 menjadi Rp48.210.455.463. Hal tersebut terutama akibat dari kenaikan pendapatan yang dikontribusikan oleh Jabodetabek. Pada kuartal pertama tahun 2018, Perseroan gencar mengirimkan paket dari pelanggan ecommerce, barang konsumen, dan perbankan. Selain itu, Perseroan juga membuka beberapa cabang baru pada tahun 2018.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016***

Pendapatan Perseroan naik 26,2% atau sebesar Rp30.767.854.337 menjadi Rp148.157.471.533. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan dari wilayah Jabodetabek. Sepanjang tahun 2017, Perseroan gencar melakukan pengiriman paket dari pelanggan ecommerce, perbankan (kartu & billing), serta pelanggan dari sektor farmasi.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015***

Pendapatan Perseroan naik 95,6% atau sebesar Rp57.379.051.280 menjadi Rp117.389.617.196. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan dari pelaksanaan proyek Kartu Indonesia Pintar ke 11 provinsi di Indonesia. Selain itu, sepanjang tahun 2016, Perseroan juga mendapatkan kenaikan pendapatan dari pelanggan perbankan dan asuransi.

#### b. Beban Langsung

Rincian beban usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

*(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	2017	Δ (%)	2018
<b>Total Beban Langsung</b>	<b>52.881.852.038</b>	<b>68,6</b>	<b>89.159.094.378</b>	<b>34,6</b>	<b>119.985.587.529</b>	<b>24.441.668.114</b>	<b>52,9</b>	<b>37.379.261.116</b>

#### ***Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017***

Beban Langsung Perseroan naik 52,9% atau sebesar Rp12.937.593.002 menjadi Rp37.379.261.116. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan biaya angkut & kurir. Sepanjang kuartal pertama tahun 2018 dan tahun 2017, Perseroan meningkatkan jumlah pegawai untuk menjawab kenaikan permintaan jasa pengiriman dari pelanggan Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Beban Langsung Perseroan naik 34,6% atau sebesar Rp30.826.493.151 menjadi Rp119.985.587.529. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan biaya angkut & kurir. Pada tahun 2017 Perseroan mengalami peningkatan penjualan secara signifikan, sehingga meningkatkan kebutuhan jumlah pegawai di bagian pengiriman.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Beban Langsung Perseroan naik 68,6% atau sebesar Rp36.277.242.340 menjadi Rp89.159.094.378. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya angkut & kurir. Pada tahun 2016 Perseroan mengalami peningkatan penjualan secara signifikan, sehingga meningkatkan kebutuhan jumlah pegawai di bagian pengiriman.

**c. Beban Usaha**

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	2017	Δ (%)	2018
<b>Total Beban Usaha</b>	17.202.679.254	66,6	28.662.955.965	56,6	44.897.933.022	8.760.675.692	38,7	12.150.024.163

**Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017**

Beban Usaha naik 38,7% atau sebesar Rp3.389.348.471 menjadi Rp12.150.024.163. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, bonus dan manfaat yang diterima pegawai bagian penjualan sehubungan dengan meningkatnya performa penjualan Perseroan pada awal tahun 2018. Selain itu, Perseroan juga tercatat meningkatkan jumlah karyawan administrasi sehubungan dengan ekspansi usaha. Pada kuartal pertama tahun 2018, terdapat beban kepada jasa profesional sehubungan dengan persiapan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di tahun 2018.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Beban Usaha naik 56,6% atau sebesar Rp16.234.977.057 menjadi Rp44.897.933.022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, bonus dan manfaat yang diterima pegawai bagian penjualan sehubungan dengan meningkatnya performa penjualan Perseroan pada awal tahun 2018. Selain itu, Perseroan juga tercatat meningkatkan jumlah karyawan administrasi sehubungan dengan ekspansi usaha. Pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan adanya piutang tak tertagih sebesar Rp2.534.798.240 yang telah dicadangkan, namun upaya penagihan masih terus dilakukan oleh Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Beban Usaha naik 66,6% atau sebesar Rp11.460.276.711 menjadi Rp28.662.955.965. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji sehubungan dengan peningkatan jumlah karyawan administrasi Perseroan. Pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan adanya beban kepada jasa profesional sehubungan dengan penerbitan utang obligasi konversi di tahun 2016.

**d. Pendapatan (Beban) Lain-Lain**

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	2017	Δ (%)	2018
Pendapatan bunga	5.705.457	545,6	36.833.425	506,7	223.453.158	100.482.658	-82,3	17.760.751
Beban bunga	(185.398.082)	-55,2	(287.652.553)	-607,4	(2.034.960.289)	(441.678.958)	-27,1	(561.204.093)
Beban administrasi bank	(60.699.102)	-103,2	(123.325.959)	60,7	(48.463.498)	(13.283.870)	-14,7	(15.231.915)
Pendapatan lain-lain	-	-	206.915.580	-14,2	177.578.247	55.500.000	-6,5	51.892.707
Beban lain-lain	(88.604.504)	83,6	(14.505.680)	47,3	(7.651.365)	(669.998)	-549,5	(4.351.501)
<b>Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>	<b>(328.996.231)</b>	<b>44,8</b>	<b>(181.735.187)</b>	<b>-829,9</b>	<b>(1.690.043.747)</b>	<b>(299.650.168)</b>	<b>-70,6</b>	<b>(511.134.051)</b>

**Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017**

Beban Lain-Lain Perseroan tercatat meningkat sebesar 70,6% atau sebesar Rp211.483.883 menjadi Rp511.134.051. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga pada kuartal pertama tahun 2018. Selain itu, kenaikan beban bunga diperparah dengan penurunan pada pendapatan bunga yang menyebabkan semakin tingginya total beban lain-lain Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Beban Lain-Lain Perseroan tercatat meningkat sebesar 829,9% atau sebesar Rp1.508.308.560 menjadi Rp1.690.043.747. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga pada tahun 2017 sehubungan penerbitan utang obligasi konversi di tahun 2016.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Beban Lain-Lain Perseroan tercatat menurun sebesar 44,8% atau sebesar Rp147.261.044 menjadi Rp181.735.187. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan lain-lain yang tercatat signifikan pada tahun 2016 sebesar Rp206.915.580.

**e. Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan**

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	2017	Δ (%)	2018
Laba (Rugi) Usaha	(10.073.965.376)	95,7	(432.433.147)	-3.767,9	(16.726.049.018)	(1.961.574.825)	32,8	(1.318.829.816)
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(328.996.231)	44,8	(181.735.187)	-829,9	(1.690.043.747)	(299.650.168)	-70,6	(511.134.051)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan	(10.402.961.607)	94,1	(614.168.334)	-2.898,5	(18.416.092.765)	(2.261.224.993)	19,1	(1.829.963.867)
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	(105.312.749)	323,2	235.059.447	-629,0	(1.243.347.192)	(369.219.210)	45,2	(202.217.405)
<b>Total Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>(10.297.648.858)</b>	<b>91,8</b>	<b>(849.227.781)</b>	<b>-1.922,2</b>	<b>(17.172.745.573)</b>	<b>(1.892.005.783)</b>	<b>14,0</b>	<b>(1.627.746.462)</b>

**Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017**

Rugi tahun berjalan Perseroan pada kuartal pertama tahun 2018 tercatat menurun sebesar 14,0% atau sebesar Rp264.259.321 menjadi Rp1.627.746.462. Hal tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya rugi usaha Perseroan pada kuartal pertama tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Pada kuartal pertama tahun 2018, Perseroan menghasilkan margin laba bruto yang lebih baik, sehingga berdampak positif pada kondisi laba/rugi tahun berjalan.



**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Rugi tahun berjalan Perseroan tercatat meningkat sebesar 1.922,2% atau sebesar Rp16.323.517.792 menjadi Rp17.172.745.573. Hal tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya margin laba bruto Perseroan yang mengakibatkan tambahan kerugian di tahun 2017. Selain itu, beban bunga yang timbul dari amortisasi atas efek pengukuran utang obligasi konversi pada biaya amortisasi pada tahun 2017 juga berkontribusi pada peningkatan kerugian Perseroan pada tahun berjalan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Rugi tahun berjalan Perseroan tercatat menurun sebesar 91,8% atau sebesar RP9.448.421.077 menjadi Rp849.227.781. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya margin laba bruto Perseroan yang berdampak positif pada laba/rugi tahun berjalan.

**f. Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan**

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	2017	Δ (%)	2018
Total Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(10.297.648.858)	91,8	(849.227.781)	-1.922,2	(17.172.745.573)	(1.892.005.783)	14,0	(1.627.746.462)
Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain:								
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:								
Pengukuran kembali liabilitas kerja	101.252	-119,6	(19.817)	-1.134,1	(244.565)	(61.142)	3.226,1	1.911.376
Beban (Manfaat) pajak penghasilan terkait	(25.313)	119,6	4.954	1.134,2	61.141	15.286	3.226,0	(477.844)
<b>Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>(10.297.572.919)</b>	<b>91,8</b>	<b>(849.242.644)</b>	<b>-1.922,1</b>	<b>(17.172.928.997)</b>	<b>(1.892.051.639)</b>	<b>14,0</b>	<b>(1.626.312.930)</b>

**Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017**

Rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada kuartal pertama tahun 2018 tercatat menurun sebesar 14,0% atau sebesar Rp265.738.709 menjadi Rp1.626.312.930. Hal tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya rugi usaha Perseroan pada kuartal pertama tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Pada kuartal pertama tahun 2018, Perseroan menghasilkan margin laba bruto yang lebih baik, sehingga berdampak positif pada kondisi laba/rugi komprehensif tahun berjalan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Rugi tahun berjalan Perseroan tercatat meningkat sebesar 1.922,1% atau sebesar Rp16.323.686.353 menjadi Rp17.172.928.997. Hal tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya margin laba bruto Perseroan yang mengakibatkan tambahan kerugian di tahun 2017. Selain itu, beban bunga atas utang obligasi konversi di tahun 2017 juga semakin meningkatkan kerugian Perseroan pada tahun berjalan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Rugi tahun berjalan Perseroan tercatat menurun sebesar 91,8% atau sebesar Rp9.448.330.275 menjadi Rp849.242.644. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya margin laba bruto Perseroan yang berdampak positif pada laba/rugi tahun berjalan.

**POSISI KEUANGAN**

**a. Aset**

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember				31 Maret		
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	Δ (%)	2018
Kas dan bank	1.842.656.637	1.401,6	27.668.973.216	-65,6	9.517.850.137	83,0	17.417.976.406
Piutang usaha - neto							
Pihak ketiga	18.919.139.455	-14,6	16.153.830.973	29,0	20.835.756.160	20,3	25.059.236.954
Piutang lain-lain							
Pihak Ketiga	375.992.075	427,2	1.982.350.516	-17,5	1.635.162.466	-10,5	1.464.269.810
Beban dibayar dimuka dan uang muka	1.772.743.146	61,9	2.869.988.031	-9,9	2.584.616.608	0,8	2.606.492.247
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>22.910.531.313</b>	<b>112,5</b>	<b>48.675.142.736</b>	<b>-29,0</b>	<b>34.573.385.371</b>	<b>34,6</b>	<b>46.547.975.417</b>
Aset pajak tangguhan - neto	133.583.562	-100,0	-	-	-	-	-
Aset tetap - neto	1.537.364.032	42,7	2.193.231.521	326,6	9.357.262.115	-4,4	8.941.956.330
Aset lain-lain	-	-	35.000.000	20,0	42.000.000	1746,8	775.645.000
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.670.947.594</b>	<b>33,4</b>	<b>2.228.231.521</b>	<b>321,8</b>	<b>9.399.262.115</b>	<b>3,4</b>	<b>9.717.601.330</b>
<b>Total Aset</b>	<b>24.581.478.907</b>	<b>107,1</b>	<b>50.903.374.257</b>	<b>-13,6</b>	<b>43.972.647.486</b>	<b>28,0</b>	<b>56.265.576.747</b>

**Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017**

Total aset Perseroan pada kuartal pertama tahun 2018 tercatat meningkat sebesar 28,0% menjadi Rp56.265.576.747. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank serta piutang usaha neto pihak ketiga. Pada kuartal pertama tahun 2018, Budiyanto Darmastono dan Yuwono Darmastoto melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar Rp10.000.000.000.

**Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016**

Total aset Perseroan pada tahun 2017 tercatat menurun sebesar 13,6% menjadi Rp43.972.647.486. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan rugi bersih yang menyebabkan kas dan bank Perseroan berkurang secara signifikan.

**Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015**

Total aset Perseroan pada tahun 2016 tercatat meningkat sebesar 107,1% menjadi Rp50.903.374.257. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank pada tahun 2016. Pada tahun 2016, Perseroan menerbitkan utang obligasi konversi yang menyebabkan kenaikan saldo kas dan bank.

**b. Liabilitas**

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember				31 Maret		
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	Δ (%)	2018
Utang usaha - Pihak ketiga	227.490.367	104,2	464.574.897	741,9	3.911.364.596	31,9	5.159.306.520
Utang lain-lain							
Pihak berelasi	37.382.443.132	-86,9	4.906.683.784	55,6	7.634.912.494	3,1	7.871.735.250
Pihak ketiga	1.817.100.000	86,4	3.387.098.371	-13,2	2.939.679.520	66,7	4.901.654.039
Liabilitas yang masih harus dibayar	-	-	505.616.593	114,5	1.084.673.221	52,2	1.650.800.247
Utang pajak	105.073.262	42,2	149.413.021	362,4	690.954.957	23,5	853.336.755
Uang muka pelanggan	-	-	-	-	85.807.629	-71,4	24.503.873

Keterangan	31 Desember				31 Maret		
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	Δ (%)	2018
Bagian utang pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	299.176.461	93,9	580.140.908	147,4	1.435.277.037	-10,1	1.290.168.869
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>39.831.283.222</b>	<b>-74,9</b>	<b>9.993.527.574</b>	<b>77,9</b>	<b>17.782.669.454</b>	<b>22,3</b>	<b>21.751.505.553</b>
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	-	2.148.765.312	-57,9	905.356.979	-22,3	703.617.418
Utang obligasi konversi	-	-	20.460.600.177	8,1	22.117.867.870	2,0	22.562.740.818
Liabilitas imbalan kerja	3.016.082	94,6	5.869.864	62,0	9.507.510	-11,9	8.377.701
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	428.791.467	32,5	568.031.195	358,4	2.603.594.535	-11,2	2.311.997.049
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>431.807.549</b>	<b>5.268,9</b>	<b>23.183.266.548</b>	<b>10,6</b>	<b>25.636.326.894</b>	<b>-0,2</b>	<b>25.586.732.986</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>40.263.090.771</b>	<b>-17,6</b>	<b>33.176.794.122</b>	<b>30,9</b>	<b>43.418.996.348</b>	<b>9,0</b>	<b>47.338.238.539</b>

**Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017**

Liabilitas Perseroan pada kuartal pertama tahun 2018 tercatat meningkat sebesar 9,0% menjadi Rp47.338.238.539. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain pihak ketiga, sejalan dengan peningkatan aktivitas dan penjualan Perseroan pada kuartal pertama 2018.

**Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016**

Liabilitas Perseroan pada tahun 2017 tercatat meningkat sebesar 30,9% menjadi Rp43.418.996.348. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain pihak ketiga, sejalan dengan peningkatan aktivitas dan penjualan Perseroan pada tahun 2017.

**Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015**

Liabilitas Perseroan pada tahun 2016 tercatat menurun sebesar 17,6% menjadi Rp33.176.794.122. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain kepada pihak berelasi, yaitu kepada pemegang saham, sehubungan dengan konversi utang lain-lain tersebut menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

**c. Ekuitas**

Keterangan	31 Desember				31 Maret		
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	Δ (%)	2018
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.000.000.000	900,0	30.000.000.000	-	30.000.000.000	33,3	40.000.000.000
Komponen ekuitas dari obligasi konversi	-	-	7.257.434.643	-	7.257.434.643	-	7.257.434.643
Akumulasi defisit	(18.681.611.864)	4,5	(19.530.854.508)	87,9	(36.703.783.505)	4,4	(38.330.096.435)
<b>Total Ekuitas</b>	<b>(15.681.611.864)</b>	<b>213,0</b>	<b>17.726.580.135</b>	<b>-96,9</b>	<b>553.651.138</b>	<b>1.512,4</b>	<b>8.927.338.208</b>

**Posisi tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2017**

Total ekuitas Perseroan pada kuartal pertama tahun 2018 tercatat meningkat sebesar 1.512,4% menjadi Rp8.927.338.208. Hal tersebut terutama disebabkan oleh setoran modal Budiyanto Darmastono dan Yuwono Darmastoto senilai Rp10.000.000.000. Selain itu, pada kuartal pertama tahun 2018, saldo akumulasi defisit Perseroan meningkat akibat rugi bersih yang dialami Perseroan.

**Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2016**

Total ekuitas Perseroan pada kuartal pertama tahun 2017 tercatat menurun sebesar 96,9% menjadi Rp553.651.138. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo akumulasi defisit sehubungan dengan rugi bersih tahun berjalan.

**Posisi tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2015**

Total ekuitas Perseroan pada kuartal pertama tahun 2016 tercatat positif menjadi Rp17.726.580.135 dari sebelumnya tercatat negatif. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dari konversi utang lain-lain pemegang saham dan peningkatan komponen ekuitas dari utang obligasi konversi.

**ARUS KAS**

**a. Arus kas dari aktivitas operasi**

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	2017	Δ (%)	2018
Penerimaan kas dari pelanggan	42.600.399.450	182,1	120.170.282.382	17,6	141.331.232.486	280.89.187.553	-	43.883.190.198
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(6.442.539.618)	1.103,8	(77.556.977.725)	-0,5	(77.181.835.044)	(17.018.238.289)	36,0	(23.138.352.139)
Pembayaran kas kepada karyawan	(33.629.650.475)	34,4	(45.207.516.468)	66,7	(75.381.474.453)	(15.808.700.294)	37,6	(21.746.680.991)
Pembayaran pajak penghasilan	-		(366.685.293)	-98,6	(5.165.207)	-	-	-
<b>Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>2.528.209.357</b>	<b>-217,1</b>	<b>(2.960.897.104)</b>	<b>279,5</b>	<b>(11.237.242.218)</b>	<b>(4.737.751.030)</b>	<b>-78,9</b>	<b>(1.001.842.932)</b>

**Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi pada kuartal pertama tahun 2018 tercatat menurun sebesar 78,9% atau sebesar Rp3.735.908.098 menjadi Rp1.001.842.932. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran kepada karyawan, sehubungan dengan peningkatan penjualan Perseroan dan peningkatan utilisasi armada pengiriman Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2017 tercatat meningkat sebesar 279,5% atau sebesar Rp8.276.345.114 menjadi Rp11.237.242.218. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada karyawan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan, sejalan dengan strategi ekspansi Perseroan melalui peningkatan jumlah kurir dan karyawan administrasi. Pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan peningkatan jumlah karyawan sebanyak 953 orang menjadi 1.972 orang, dimana 535 orang diantaranya adalah kurir.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Pada tahun 2016, Perseroan mencatatkan penggunaan kas untuk operasi sebesar Rp2.960.897.104 dari sebelumnya tercatat memperoleh kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.528.209.357. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan dari pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp71.114.438.107 menjadi Rp77.556.977.725 pada tahun 2016, dimana hal tersebut sejalan dengan peningkatan signifikan pada kendaraan yang disewa dan dioperasikan oleh Perseroan dari pihak ketiga.

**b. Arus kas dari aktivitas investasi**
*(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	2017	Δ (%)	2018
Perolehan aset tetap	(538.580.870)	34,7	(725.649.430)	621,4	(5.235.113.660)	(979.134.385)	-44,3	(544.994.000)

**Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada kuartal pertama tahun 2018 tercatat menurun sebesar 44,3% atau sebesar Rp434.140.385 menjadi Rp544.994.000. Hal tersebut terutama disebabkan karena Perseroan pada kuartal I tahun 2018 tidak mencatatkan belanja modal dalam bentuk bangunan dan prasarana, dibandingkan dengan pada kuartal pertama tahun 2017 dimana Perseroan mencatatkan adanya penggunaan dana untuk bangunan dan prasarana sehubungan dengan pengoperasian pusat administrasi dan pergudangan di daerah Halim Perdanakusuma beserta peralatan dan perlengkapannya.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 tercatat meningkat sebesar 621,4% atau sebesar Rp4.509.464.230 menjadi Rp5.235.113.660. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya belanja modal untuk bangunan dan prasarana sehubungan dengan pengoperasian pusat administrasi dan pergudangan di daerah Halim Perdanakusuma. Selain itu, Perseroan juga mencatatkan belanja modal pada kendaraan sebesar Rp5.170.026.994, lebih besar dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp1.064.065.390.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 tercatat meningkat sebesar 34,7% atau sebesar Rp187.068.560 menjadi Rp725.649.430. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya belanja modal untuk peralatan dan perlengkapan yang nilainya lebih besar pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

**c. Arus kas dari aktivitas pendanaan**
*(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret			
	2015	Δ (%)	2016	Δ (%)	2017	2017	Δ (%)	2018
Kenaikan modal saham	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000
Pembayaran utang konsumen pembiayaan	(203.334.218)	65,6	(336.664.035)	286,5	(1.301.074.605)	(139.062.145)	214,0	(436.705.654)
Pembayaran beban bunga	(185.398.082)	-18,8	(150.472.852)	151,0	(377.692.596)	(30.139.855)	286,0	(116.331.145)
Penerbitan utang obligasi konversi	-	-	30.000.000.000	-	-	-	-	-
<b>Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(388.732.300)</b>	<b>-7.692,1</b>	<b>29.512.863.113</b>	<b>-105,7</b>	<b>(1.678.767.201)</b>	<b>(169.202.000)</b>	<b>-5.683,2</b>	<b>9.446.963.201</b>

**Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017**

Perseroan mencatatkan adanya kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada kuartal pertama tahun 2018 sebesar Rp9.446.963.201, dibandingkan penggunaan kas untuk pendanaan sebesar Rp169.202.000 pada kuartal pertama tahun 2017. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya setoran modal dari pemegang saham pada kuartal pertama tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

Perseroan mencatatkan penggunaan dana untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.678.767.201 pada tahun 2017, dibandingkan dengan perolehan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp29.512.863.113 pada tahun 2016. Hal tersebut terutama disebabkan adanya penerbitan obligasi konversi sebesar Rp30.000.000.000 selama tahun 2016 yang tidak terjadi lagi selama tahun 2017. Di samping itu, penggunaan kas untuk pembayaran utang pembiayaan konsumen pada tahun 2017 meningkat sebesar 286,5% atau sebesar Rp964.410.570 yang disebabkan adanya peningkatan pada jumlah armada Perseroan yang dibeli melalui skema pembiayaan konsumen.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

Perseroan mencatatkan adanya arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp29.512.863.113, dibandingkan dengan penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp388.732.300 pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan adanya penerbitan obligasi konversi sebesar Rp30.000.000.000 selama tahun 2016. Di samping itu, penggunaan kas untuk pembayaran utang pembiayaan konsumen pada tahun 2017 meningkat sebesar 65,6% atau sebesar Rp133.329.817 yang disebabkan adanya peningkatan pada jumlah armada Perseroan yang dibeli melalui skema pembiayaan konsumen.

**RASIO KEUANGAN**

**a. Rasio pertumbuhan**

Keterangan	31 Desember			31 Maret	
	2015	2016	2017	2017	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Penjualan neto	2.362,5	95,6	26,2	57,8	54,3
Beban pokok penjualan	563,8	68,6	34,6	43,8	52,9
Laba bruto	-228,9	296,0	-0,2	-763,0	59,3
Laba sebelum pajak penghasilan	-23,7	94,1	-2.898,5	715,4	19,1
Laba tahun berjalan	-22,8	91,8	-1.922,2	686,4	14,0
Laba komprehensif tahun berjalan	100,0	-119,6	-1.134,1	-3.702,0	3.226,2
Aset	244,3	107,1	-13,6	-2,6	28,0
Liabilitas	221,5	-17,6	30,9	1,7	9,0
Ekuitas	191,3	-213,0	-96,9	-10,7	1.512,4

**b. Rasio profitabilitas**

Keterangan	31 Desember			31 Maret	
	2015	2016	2017	2017	2018
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>					
Laba bruto / Penjualan neto	11,9	24,0	19,0	21,8	22,5
Laba usaha / Penjualan neto	-16,8	-0,4	-11,3	-6,3	-2,7
Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto	-17,3	-0,5	-12,4	-7,2	-3,8
Laba tahun berjalan / Penjualan neto	-17,2	-0,7	-11,6	-6,1	-3,4
Laba tahun berjalan / Total ekuitas	N/A	-4,8	-3.101,7	t.d.b	t.d.b
Laba tahun berjalan / Total aset	-41,9	-1,7	-39,1	t.d.b	t.d.b

**c. Rasio solvabilitas**

Keterangan	31 Desember			31 Maret	
	2015	2016	2017	2017	2018
<b>Rasio Solvabilitas (X)</b>					
Total Liabilitas / Total Aset	1,6	0,7	1,0	0,7	0,8
Total Liabilitas / Total Ekuitas	N/A	1,9	78,4	2,1	5,3
Total Aset / Total Liabilitas	0,6	1,5	1,0	1,5	1,2
Interest bearing debt / Total Ekuitas	N/A	1,2	47,2	1,4	2,9
Interest bearing debt / Total Aset	0,0	0,4	0,6	0,4	0,5
Interest bearing debt / Penjualan Neto	0,0	0,2	0,2	t.d.b	t.d.b
Interest bearing debt / EBITDA	-0.1	37.1	-1.8	t.d.b	t.d.b
Acid test ratio	0.5	4.6	1.8	4,1	2,0

**d. Rasio likuiditas**

Keterangan	31 Desember			31 Maret	
	2015	2016	2017	2017	2018
<b>Rasio Likuiditas (X)</b>					
Aset lancar / Liabilitas lancar	0,6	4,9	1,9	t.d.b	2,1
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	0,0	2,8	0,5	t.d.b	0,8
EBITDA / Interest	-52,3	2,3	-8,0	-5,0	-0,8

**e. Rasio modal kerja**

Keterangan	31 Desember			31 Maret	
	2015	2016	2017	2017	2018
<b>Rasio Modal Kerja</b>					
Beban pokok penjualan / Rata-rata persediaan (x)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rata-rata umur persediaan (hari)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penjualan neto / Rata-rata piutang dagang (x)	5,9	6,7	8,0	t.d.b	t.d.b
Rata-rata umur piutang dagang (hari)	61,9	54,5	45,6	t.d.b	t.d.b
Beban pokok penjualan / Rata-rata utang dagang (x)	414,1	257,7	54,8	t.d.b	t.d.b
Rata-rata umur utang dagang (hari)	0,9	1,4	6,7	t.d.b	t.d.b
Siklus konversi kas (hari)	61,0	53,1	38,9	t.d.b	t.d.b

**f. EBITDA**

Keterangan	31 Desember			31 Maret	
	2015	2016	2017	2017	2018
<b>EBITDA (Rp)</b>	<b>(9.394.137.308)</b>	<b>583.201.945</b>	<b>(14.415.519.494)</b>	<b>(1.692.536.751)</b>	<b>(421.330.740)</b>
Laba (rugi) tahun berjalan	(10.297.648.858)	(849.227.781)	(17.172.745.573)	(1.892.005.783)	(1.627.746.462)
Beban (manfaat) pajak	(105.312.749)	235.059.447	(1.243.347.192)	(369.219.210)	(202.217.405)
Beban bunga - neto	(179.692.625)	(250.819.128)	(1.811.507.131)	(341.196.300)	(543.443.342)
Penyusutan	829.131.674	946.551.151	2.189.066.140	227.491.942	865.189.785
Amortisasi	-	-	-	-	-

Secara umum, rasio-rasio keuangan Perseroan bervariasi dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan tahunan pada pendapatan dan beban sebesar dua digit. Pertumbuhan laba bersih Perseroan cenderung negatif disebabkan oleh aktivitas ekspansi Perseroan yang membutuhkan biaya dan investasi besar yang pada periode tersebut belum diimbangi dengan kenaikan pada pendapatan. Namun, di masa yang akan datang, Perseroan yakin akan membukukan laba bersih yang positif sebagai hasil dari upaya ekspansi usaha yang dilakukan sejak berdirinya Perseroan hingga saat ini.

## 6. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan menggunakan kas yang dimiliki terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal dan pajak Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari penambahan modal disetor, laba bersih hasil usaha, dan pinjaman eksternal termasuk pinjaman kepada pemegang saham.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui utang dari eksternal akan dipengaruhi oleh aktivitas operasional Perseroan. Jika Perseroan melakukan perjanjian pinjaman dengan pihak eksternal, tingkat bunga pinjaman akan memengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kewajiban.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perseroan, sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah pinjaman pihak ketiga baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang.

Perseroan belum memiliki sumber likuiditas eksternal berupa fasilitas pinjaman dari perbankan. Namun di masa yang akan datang, Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk mencari fasilitas pendanaan baru dari perbankan yang dapat mendukung usaha Perseroan

Perseroan tidak memiliki perikatan, permintaan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan. Namun terdapat kecenderungan adanya penurunan terhadap likuiditas dalam hal Perseroan melakukan belanja modal.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

## 7. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk pembelian bangunan prasarana, kendaraan, serta peralatan dan perlengkapan. Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu jasa titipan, ekspedisi, pergudangan, jasa keagenan dan pengangkutan. Jumlah belanja modal Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan pertama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp449.884.000, Rp9.353.096.734, Rp1.602.418.640, dan Rp1.400.903.266.

Tabel berikut merangkum belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

*(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018
	2015	2016	2017	
Bangunan prasarana	-	-	2.488.523.430	-
Kendaraan	1.003.542.146	1.064.065.390	5.170.026.994	-
Peralatan dan perlengkapan	397.361.120	538.353.250	1.694.546.310	449.884.000
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>1.400.903.266</b>	<b>1.602.418.640</b>	<b>9.353.096.734</b>	<b>449.884.000</b>

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan dan mungkin akan tetap akan terjadi di masa yang akan datang adalah untuk membeli kendaraan serta peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan pengiriman barang dan pengelolaan pergudangan, mengingat kedua investasi tersebut merupakan faktor utama pendukung perkembangan usaha Perseroan. Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal



Perseroan melalui kombinasi antara arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman pihak ketiga, dan pendanaan melalui pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan margin Perseroan. Perseroan selalu berupaya agar armada yang tersedia dapat beroperasi dengan baik dan tepat waktu, sehingga operasional pengantaran Perseroan tidak terganggu secara signifikan.

Jika kedepannya terjadi ketidaksesuaian fungsi dan kebutuhan, perseroan dapat melakukan alih fungsi terhadap aset tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi Perseroan tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi.

## 8. MANAJEMEN RISIKO

Sistem Manajemen Risiko merupakan metode yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan adanya risiko, yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari hal-hal penyebab potensi kerugian perusahaan.

Beberapa risiko yang berpotensi akan dihadapi Perseroan diantaranya:

1. Risiko utama, yaitu persaingan usaha dengan perusahaan sejenis.  
Salah satu risiko utama, yaitu persaingan usaha dengan perusahaan sejenis yang mungkin akan semakin ketat pada masa yang akan datang. Dalam rangka meminimalisir dampak risiko persaingan usaha ini adalah dengan terus berinovasi atas produk layanan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan keunggulan pelayanan dan tarif harga yang menarik pelanggan.

Beberapa hal yang dikembangkan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan jumlah dan jenis pelanggan baru yang selama ini belum digarap secara maksimal;
- b. Inovasi produk layanan kurir baru yang dapat dikustomisasi sesuai dengan permintaan pelanggan (layanan jemput paket, layanan kilat, dan lain-lain);
- c. Penetapan kebijakan harga atau tarif layanan yang bersaing dengan perusahaan lain dengan tetap memperhatikan konsep persaingan sehat dalam industri;
- d. Penerapan sistem teknologi informatika yang dapat memberikan informasi terkini mengenai status pengiriman dan order dari pelanggan yang juga berguna untuk pengaturan penjadwalan operasional yang efisien dan efektif;

Pengendalian mutu pelayanan dengan implementasi standar operasional dan prosedur serta membuka jalur komunikasi layanan konsumen untuk dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat pengguna jasa layanan.

2. Risiko usaha, meliputi:
  - a. Penurunan laba yang disebabkan oleh ketergantungan pada biaya operasional khususnya biaya transportasi dan biaya tenaga kerja.

Secara umum pengelolaan risiko keuangan sehubungan dengan peningkatan biaya operasional dapat dikendalikan dengan melakukan efisiensi biaya operasional dengan penerapan prinsip manajemen biaya yang berimbang atas pos-pos pengeluaran rutin. Perseroan memiliki sarana *budgeting* yang dilakukan setiap awal periode dan dimonitor pencapaiannya secara berkala. Segala deviasi dan penyimpangan akan dievaluasi untuk diselesaikan akar permasalahannya dan mengembalikan pencapaian sesuai *budget* awal atau revisi *budget* bilamana diperlukan.

Namun demikian, seberapa pun efisiensi manajemen biaya akan sangat tergantung dari pencapaian target pendapatan yang akan menjadi justifikasi utama atas segala biaya yang dibebankan.

b. Perubahan perilaku konsumen

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perubahan selera konsumen akan memberikan dampak besar pada kelangsungan bisnis jasa Perseroan. Sebagai contoh adalah dengan berkembang pesatnya transaksi belanja daring atau *online shopping* maka membuka peluang bisnis layanan kurir dari penjual ke pembeli yang menggantikan proses belanja secara tradisional yaitu pembeli dan penjual saling bertemu. Dengan pola yang sama, Perseroan senantiasa dituntut untuk peka terhadap pergeseran selera konsumen.

Guna menangkap potensi bisnis yang ada dipasar, Perseroan memiliki tim riset internal (*Research and Development*) yang bertanggungjawab untuk melakukan riset pasar dan mencoba memperkenalkan jenis layanan baru yang menjawab kebutuhan konsumen. Beberapa kanal informasi dapat dipergunakan oleh Perseroan untuk mempertimbangan jenis layanan baru semisal hasil umpan balik (*feedback*) dari konsumen yang diperoleh melalui layanan konsumen maupun survei kepuasan, hasil diskusi eksklusif dengan beberapa pelanggan utama dengan jumlah transaksi besar, maupun masukan dari asosiasi perusahaan logistik setempat.

Setelah pengenalan jenis layanan baru, Perseroan juga akan melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi layanan baru tersebut dengan memperhatikan faktor komersial dan *benefit* ekonomi yang diperoleh Perseroan.

c. Perubahan teknologi dan reliabilitas teknologi yang dimiliki Perseroan

Perseroan memiliki ketergantungan atas keandalan sistem teknologi dan informatika dalam operasional sehari mulai penerimaan order, distribusi paket dan penjadwalan jasa kurir hingga penerbitan tagihan atau *billing*. Karena skala operasional Perseroan yang besar maka dibutuhkan sistem operasional berbasis teknologi yang mampu membantu melakukan koordinasi sumber daya manusia yaitu tenaga kurir untuk memastikan semua paket terkirim sesuai dengan alamat dan jadwal yang ditentukan.

Perseroan memiliki divisi teknologi dan sistem informasi untuk senantiasa melakukan perawatan berkala dan pengembangan sistem operasional yang dimiliki agar mampu melakukan koordinasi segala sumber daya yang dimiliki terutama apabila dalam suatu saat terdapat lonjakan permintaan jasa layanan kurir sehingga tidak menyebabkan *system down* dan berpotensi menyebabkan gangguan operasional.

d. Dalam proses ini Perseroan dapat membuka asistensi dari pihak penyedia jasa teknologi dan informatika guna pendampingan dalam perawatan sistem dan (atau) pengembangan yang diperlukan. Dalam beberapa kapasitas tertentu tim internal Perseroan dapat melakukan pengembangan modul sistem operasional yang dipakai dan tentunya melewati serangkaian *user acceptance tests* dan *trial* untuk memastikan keandalannya.

3. Risiko umum, meliputi:

a. Kondisi moneter dan keuangan

Tim internal Perseroan melakukan pengendalian risiko keuangan dengan melakukan evaluasi pencapaian kinerja keuangan dan analisa faktor-faktor eksternal seperti tingkat bunga pinjaman perbankan dan (atau) lembaga pembiayaan non-bank, nilai tukar mata uang, kebijakan upah tenaga kerja.

Beberapa pendekatan dilakukan oleh tim internal Perseroan berkaitan dengan pengelolaan risiko keuangan yaitu dengan analisa pencapaian proyeksi dan *budgeting*, analisa *cost of revenue* berkaitan dengan efektivitas pendanaan pihak ketiga yang harus ditutupi dengan hasil operasional yang positif

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha dan ketenagakerjaan

Manajemen Perseroan melakukan konsolidasi kepada asosiasi perusahaan logistik untuk mendapatkan pengkinian kebijakan Pemerintah dan berupaya menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Hal serupa juga dilakukan dengan melakukan konsolidasi dengan instansi terkait pengelolaan sumber daya manusia termasuk serikat pekerja untuk dapat berkoordinasi dengan perwakilan karyawan untuk pencapaian tujuan organisasi dan sesuai ekspektasi karyawan.

c. Tuntutan atau gugatan hukum

Upaya Perseroan dalam mengantisipasi dampak yang timbul akibat risiko tuntutan hukum adalah dengan senantiasa mematuhi semua kewajiban hukum, perjanjian-perjanjian atau perikatan yang dimiliki dan juga menjalankan kewajiban dengan masyarakat sekitar lokasi operasional Perseroan sehingga tidak menimbulkan gugatan atau tuntutan dari pihak lain.

d. Hal lain yang dilakukan adalah dengan memperbaharui izin usaha yang diperlukan agar tidak terjadi interupsi atas operasional yang disebabkan oleh legalitas operasi Perseroan.

**9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS**

Pada tanggal 27 April 2018, Perseroan mengirimkan surat kepada GD Express Carrier Bhd, yang menyatakan rencana Perusahaan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di Indonesia dan rencana pelunasan dipercepat untuk obligasi konversi.

Lebih lanjut, berdasarkan surat GD Express Carrier Bhd kepada Perseroan pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan dan GD Express Carrier Bhd telah menyetujui jumlah pelunasan atas obligasi konversi tersebut dengan total pembayaran sekitar Rp67.200.000.000, terdiri dari Rp30.000.000.000 nilai nominal obligasi konversi dan Rp37.200.000.000 premi penebusan. Penyelesaian atas pelunasan obligasi konversi dan premi penebusan akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah saham Perseroan tercatat di BEI.

Sehubungan dengan surat GD Express Carrier Bhd kepada Perseroan pada tanggal 29 Juni 2018, seperti diuraikan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Nomor 2 tentang Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting, jika Perseroan menghapuskan instrumen dapat dikonversi sebelum jatuh tempo melalui penebusan atau pembelian kembali secara dini yang tidak mengubah hak konversi semula, maka Perseroan mengalokasikan imbalan yang dibayarkan dan biaya transaksi untuk pembelian kembali atau penebusan secara dini tersebut ke komponen liabilitas dan komponen ekuitas instrumen tersebut pada tanggal transaksi.

Pada tanggal 31 Maret 2018, jika nilai wajar utang obligasi konversi pada tanggal pelunasan dipercepat mendekati nilai wajarnya pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, dengan semua variabel konstan, akumulasi defisit Perseroan akan meningkat dari sebesar Rp38.330.096.435 menjadi sebesar Rp68.253.061.385, sedangkan komponen ekuitas dari transaksi obligasi konversi akan menurun dari saldo positif sebesar Rp7.257.434.643 menjadi saldo negatif sebesar Rp5.597.544.793. Selain itu, rugi sebelum pajak Perseroan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut akan meningkat dari sebesar Rp1.829.963.867 menjadi sebesar Rp33.612.243.613.

#### IV. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.*

*Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dimulai dari risiko utama yang dapat memberikan dampak paling besar hingga risiko yang dapat memberikan dampak yang paling kecil.*

#### **RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

##### **Risiko persaingan usaha dengan perusahaan sejenis yang mungkin akan semakin ketat pada masa yang akan datang**

Saat ini di Indonesia terdapat beberapa perusahaan logistik yang terdaftar di Kemenkominfo, dimana secara umum perusahaan logistik yang beroperasi memiliki jasa pelayanan yang serupa dan perbedaan hanya terletak pada segmen pasar yang dilayani. Bahkan saat ini terdapat banyak perusahaan penyedia jasa layanan logistik yang memiliki fokus segmen pasar yang beragam guna mendapatkan potensi pendapatan yang sebesar-besarnya. Pemisahan segmen pasar kerap dilakukan dengan membagi segmen ritel dan korporasi dimana keduanya dapat dibedakan kembali berdasarkan sumber pesanan yang diterima yaitu segmen ecommerce dan non-ecommerce. Seiring dengan berkembangnya perdagangan ecommerce di Indonesia, volume arus barang yang dikirim telah mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan permintaan jasa layanan kurir atau logistik yang ditanggapi oleh pelaku industri yaitu dengan maraknya bisnis logistik. Pertumbuhan bisnis layanan kurir membawa peta persaingan pelaku industri menjadi semakin ketat yang berakibat pada munculnya berbagai tantangan yang menguji kemampuan Perseroan untuk dapat mempertahankan pangsa pasar dan memperoleh pendapatan. Guna mempertahankan posisinya di pasar, Perseroan diharuskan untuk senantiasa berinovasi untuk dapat memberikan layanan jasa kurir yang unik dan memberikan berbagai nilai tambah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.

Salah satu dampak dari persaingan dikalangan pelaku usaha adalah terjadinya persaingan tarif layanan pengiriman yang ditawarkan kepada pelanggan. Ada kemungkinan dengan persaingan yang sangat ketat, maka beberapa perusahaan lain akan menawarkan harga tarif yang lebih rendah dan lebih menarik dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan oleh Perseroan dengan latar belakang jumlah pengiriman paket yang lebih banyak apabila dibandingkan oleh skala operasional Perseroan. Dengan demikian, Perseroan mungkin akan kehilangan pendapatan akibat persaingan bisnis tersebut.

Persaingan usaha dengan perusahaan sejenis yang mungkin akan semakin ketat pada masa yang akan datang. Dalam rangka meminimalisir dampak risiko persaingan usaha ini adalah dengan terus berinovasi atas produk layanan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan keunggulan pelayanan dan tarif harga yang menarik pelanggan.

## **RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG**

### **1. Risiko ketersediaan lahan tanah dan atau bangunan yang dipergunakan sebagai fasilitas dan sarana operasional karena Perseroan tidak memiliki aset properti sendiri**

Perseroan hingga saat ini menyewa aset properti yang dipergunakan sebagai fasilitas dan sarana operasional utamanya. Kontrak-kontrak tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan pemilik properti dengan Perseroan untuk jangka waktu yang sama atau berbeda.

Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan tidak dapat memperpanjang atau tidak diperbolehkan oleh pemilik properti untuk memperpanjang kontrak sewa untuk beberapa fasilitas operasional Perseroan. Apabila hal ini terjadi maka akan memberikan dampak bagi operasional dan kinerja keuangan Perseroan dalam hal perubahan lokasi fasilitas operasional dan kaitannya dengan biaya produksi Perseroan karena faktor jarak dan daerah tujuan distribusi paket yang berbeda dengan periode sebelumnya. Meskipun pengaruhnya terhadap profitabilitas Perseroan belum dapat dipastikan, namun terdapat kemungkinan bahwa biaya produksi menjadi semakin tinggi apabila Perseroan tidak dapat menemukan lokasi fasilitas yang baru dengan jarak terdekat dengan lokasi distribusi paket pengiriman.

### **2. Risiko perubahan kebijakan Pemerintah atas aktivitas pos dan pengiriman paket oleh pihak swasta**

Sebagai salah satu jenis usaha yang berada dalam pengawasan Pemerintah khususnya Kemenkominfo, industri Perseroan akan terpengaruh arah kebijakan Pemerintah melalui Menkominfo. Beberapa hal yang secara khusus berpotensi berpengaruh adalah pembatasan cakupan usaha jasa layanan kurir pos dan sejenisnya yang boleh dilakukan oleh pihak swasta (bukan BUMN atau BUMD), pembatasan struktur kepemilikan saham perusahaan pengiriman dan penerapan daftar negatif investasi (termasuk penerapan komposisi kepemilikan pihak asing dalam perusahaan pengiriman).

Di samping hal tersebut di atas, kebijakan Pemerintah secara umum dapat mempengaruhi dunia usaha semisal penetapan pajak pendapatan dan segala ketentuan perpajakan yang terkait dengan usaha Perseroan; arah kebijakan moneter berkaitan dengan penetapan suku bunga acuan untuk fasilitas pinjaman lembaga keuangan yang dapat menjadi pilihan alternative pendanaan bagi Perseroan.

### **3. Risiko perubahan perilaku konsumen**

Kondisi lalu lintas di Ibukota Jakarta dan berbagai kota besar lainnya di Indonesia menjadi salah satu alasan utama mengapa transaksi belanja dalam jaringan (*daring, online shopping*) menjadi semakin diminati masyarakat luas daripada berbelanja secara tradisional di pasar yang mempertemukan pembeli dan pedagang secara fisik. Hal ini kemudian dipermudah dengan semakin baiknya sistem sambungan internet dan penggunaan

Perubahan perilaku konsumen, khususnya konsumen ritel, yang semakin cenderung berbelanja secara *online* (*daring*) ini menjadi pemicu maraknya bisnis layanan kurir di Indonesia termasuk beberapa kota besar utama lainnya. Berdasarkan riset eMarketer tahun 2016, setidaknya terdapat 8,7 gerai *online shopping* juta. Jumlah ini telah meningkat dari sekitar 7,4 juta *online shopping* pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah situs *online shopping* meningkat rata-rata sekitar 24% per tahun. Pada tahun 2016 menurut MARS-SWA penetrasi belanja online adalah sekitar 29% atau sekitar 23,6 juta pelanggan yang melakukan transaksi belanja daring. Hal ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku konsumen untuk berbelanja melalui situs belanja ecommerce mendorong pertumbuhan industri Perseroan.

Hal sama juga terjadi pada segmen layanan kurir untuk target pasar korporasi khususnya jasa keuangan. Saat ini Perseroan menjadi mitra bagi beberapa penyedia jasa layanan keuangan semisal bank, perusahaan pembiayaan masyarakat untuk melakukan distribusi laporan bulanan (tagihan bulanan) atas saldo pembiayaan atau pemakaian fasilitas pembiayaan. Pengiriman laporan bulanan ini dalam beberapa saat banyak dilakukan dengan surat tercetak, namun bukan tidak mungkin seiring dengan penetrasi internet dalam masyarakat maka pengiriman laporan bulanan akan digantikan oleh distribusi surat elektronik yang lebih cepat diterima oleh konsumen. Apabila hal ini terjadi maka akan memberikan dampak penurunan order dari pelanggan korporasi Perseroan.

Operasional Perseroan akan selalu terimbas dari pergeseran perilaku konsumen dan akan senantiasa menyesuaikan dengan kondisi terkini terkait preferensi masyarakat.

**4. Kontrak-kontrak produksi dan penjualan kepada para pelanggan Perseroan dilakukan dengan termin jangka pendek sehingga Perseroan mungkin tidak dapat memperbarui kembali kontrak yang sama untuk menawarkan jasa layanan pengiriman di masa yang akan datang**

Khusus untuk pelanggan korporasi, Perseroan menetapkan tarif berdasarkan kontrak pengiriman paket yang ditetapkan di awal untuk sejumlah order pengiriman tertentu. Kontrak-kontrak ini diterbitkan untuk dalam jangka waktu yang relatif pendek sekitar 6-12 bulan dan dapat diperbarui untuk periode berikutnya. Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan tidak dapat memperpanjang kontrak-kontrak ini dengan pelanggan korporasi dengan berbagai alasan diantaranya adalah persaingan sesama pelaku industri dan komponen tarif yang kemudian menjadi tidak bersaing.

Apabila kontrak-kontrak dengan pelanggan korporasi menjadi tidak dapat diperpanjang, maka Perseroan akan hanya mengandalkan order pengiriman yang berasal dari pelanggan ritel saja yang mungkin jumlahnya menjadi sangat berkurang dan memberikan dampak negatif kepada kinerja keuangan Perseroan.

**5. Risiko perubahan teknologi dan reliabilitas teknologi yang dimiliki Perseroan**

Perseroan memiliki ketergantungan atas keandalan sistem teknologi dan informatika dalam operasional sehari mulai penerimaan order, distribusi paket dan penjadwalan jasa kurir hingga penerbitan tagihan atau *billing*. Karena skala operasional Perseroan yang besar maka dibutuhkan sistem operasional berbasis teknologi yang mampu membantu melakukan koordinasi sumber daya manusia yaitu tenaga kurir untuk memastikan semua paket terkirim sesuai dengan alamat dan jadwal yang ditentukan.

Dalam suatu kondisi tertentu, terdapat kemungkinan bahwa sistem informatika operasional Perseroan mengalami gangguan dan menyebabkan jadwal pengiriman mengalami kendala. Dampak yang paling jelas adalah menjadi terlambatnya pengiriman paket seperti yang dijanjikan kepada konsumen. Akibatnya mungkin Perseroan akan menerima komplain dari pelanggan yang menyebabkan tingkat kepuasan pelanggan menjadi menurun.

Disisi lain, dampak ekonomis adalah peningkatan biaya produksi yang tidak bisa ditentukan tergantung dari berapa lama waktu yang dibutuhkan Manajemen untuk mengembalikan fungsi sistem informatika operasional Perseroan ke kondisi normal.

**6. Risiko ketergantungan pada pelanggan besar**

Perseroan menjalankan usahanya dengan melayani berbagai segmen konsumen, mulai dari pelanggan korporasi, ecommerce, hingga pelanggan ritel. Secara umum persentase pendapatan dari segmen pelanggan korporasi pada tahun 2017 adalah sekitar 41%, berbanding dengan 59% kontribusi dari segmen lainnya yang terbagi ke segmen-segmen di luar korporasi.

Diantara pelanggan korporasi Perseroan yang secara berkala memberikan order pengiriman paket diantaranya berasal dari beberapa industri seperti perbankan, ecommerce, pelayanan jasa keuangan non-bank. Sementara nasabah ritel Perseroan bisa saja berasal dari berbagai macam kalangan.

Mengingat cukup signifikannya jumlah pendapatan yang dikontribusi oleh pelanggan korporasi, Perseroan mungkin saja memiliki ketergantungan secara finansial dengan beberapa nama pelanggan yang kerap memberikan order berulang (*repeat order*) untuk pengiriman yang bersifat terjadwal seperti pengiriman laporan bulanan, tagihan kartu kredit bulanan atau informasi nasabah lainnya yang dikirim berupa surat tercetak. Tidak ada kepastian bahwa pelanggan korporasi akan selalu menggunakan jasa Perseroan dalam penyampaian dokumentasi tersebut secara berkala. Kasus lain dapat berupa penurunan order atau hilangnya order pengiriman dari perusahaan ecommerce atau situs jual/ beli yang membutuhkan jasa kurir Perseroan seiring dengan perubahan selera atau perilaku konsumen.

## **7. Risiko ketergantungan pada biaya transportasi**

Profil struktur biaya produksi Perseroan sangat bergantung pada volume barang (paket titipan) dan jumlah pengiriman yang diterima Perseroan. Beberapa pos biaya adalah biaya tetap (*fixed cost*) yang akan menjadi semakin efisien dengan diterimanya jumlah order pengiriman yang semakin banyak. Perseroan mungkin saja tidak berhasil untuk memperoleh jumlah order pengiriman yang maksimal sehingga menyebabkan beban tetap menjadi tidak efisien dan memberikan tekanan pada profitabilitas pada suatu periode tertentu.

Salah satu pos biaya yang merupakan komponen biaya tetap adalah biaya transportasi dan biaya bahan bakar yang akan menjadi sangat tinggi rasionya apabila jumlah pengiriman sedikit. Contoh lain adalah biaya tenaga kerja kurir dengan pengaturan jumlah pegawai berdasarkan daerah operasi.

## **8. Ketidaktepatan mekanisme penetapan tarif jasa pengiriman paket (*pricing mechanism*) yang mungkin tidak selamanya dapat mengakomodasi kenaikan biaya produksi.**

Normalnya Perseroan akan melakukan kalkulasi biaya produksi untuk pengiriman suatu paket dengan tujuan tertentu dengan memperhitungkan jarak, biaya tenaga kerja dan biaya-biaya lain sebelum menentukan tarif pengiriman paket dimaksud. Namun disamping itu, penetapan harga juga memperhatikan beberapa hal lain yang kerap kali diluar kendali Manajemen seperti iklim persaingan dengan sesama perusahaan sejenis yang beroperasi dan berkompetisi dengan Perseroan. Faktor lain adalah kerap Perseroan harus memberikan pelayanan lebih kepada pelanggan utama (korporasi) maupun beberapa paket promosi yang diberikan kepada pelanggan ritel sebagai salah satu strategi marketing.

Dengan kompleksnya mekanisme penetapan harga, mungkin saja Perseroan tidak bisa selamanya mengakomodasi peningkatan biaya produksi kedalam komponen tarif kepada pelanggan. Apabila hal ini terjadi ada kemungkinan bahwa akan terdapat tekanan pada profitabilitas Perseroan pada masa-masa tertentu yang dianggap perlu oleh Manajemen.

## **RISIKO UMUM**

### **I. Kondisi makro ekonomi**

Seluruh pendapatan Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usahanya di Indonesia dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki sejarah dinamika politik yang panjang. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan pemerintah pada bisnis pengiriman barang;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur; dan
- kualitas perkembangan sumber daya manusia.

Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial, yang dapat menyebabkan informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang.

### **II. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha dan ketenagakerjaan**

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan cakupan pelayanan, standar baku usaha, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Industri Perseroan diawasi secara ketat oleh Pemerintah Republik Indonesia, khususnya melalui Kemenkominfo, dikarenakan

jasa titipan merupakan bagian dari bidang usaha strategis yang vital bagi negara. Pemerintah memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, tarif, cakupan wilayah kerja, izin penyelenggaraan usaha, hingga evaluasi penyelenggaraannya oleh pelaku usaha. Dengan demikian, Perseroan terpapar oleh risiko kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan di bidang usaha yang digeluti Perseroan.

Peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban tambahan bagi Perseroan dalam pemenuhan hak-hak karyawannya, dimana kegagalan dalam mengelola risiko tersebut dapat menyebabkan memburuknya hubungan ketenagakerjaan antara Perseroan dengan karyawan.

### **III. Tuntutan atau gugatan hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengirim, penerima, produsen, kurir, penyedia jasa logistik, hingga karyawan dan masyarakat tempat Perseroan beroperasi. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan.

### **RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

#### **1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri jasa layanan kurir secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang; putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

#### **2. Likuiditas saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Hingga tanggal 16 Juni 2017, nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal beberapa negara maju seperti Amerika Serikat senilai Rp337.676 triliun, Inggris senilai Rp42.804 triliun, Jepang senilai Rp68.445 triliun, Hong Kong senilai Rp57.926 triliun, memiliki nilai kapitalisasi saham yang relatif lebih besar dibandingkan dengan Indonesia yang senilai Rp5.969 triliun (*sumber: Bloomberg, 17 Juni 2017*). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasar Modal di Indonesia, walaupun sedang berkembang, nilai kapitalisasi pasar sahamnya relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga harga-harga saham yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia mungkin menjadi relatif lebih fluktuatif dibandingkan dengan saham-saham di negara maju.



### **3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

### **4. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan**

Setelah Penawaran Umum Perdana, mungkin saja akan terjadi perubahan Pemegang Saham Pengendali. Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

<b>RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.</b>
--

## **V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini tanpa modifikasi.

## VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Satria Antaran Prima berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Bambang Sularso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-21298.40.10.2014 tanggal 20 Agustus 2014 dan terdaftar pada Daftar Perseroan pada Nomor AHU-0077725.40.80.2014 tanggal 20 Agustus 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kantor pusat di Kalibata Office Park Blok G, Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G, RT 001, RW 008, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan 58 kantor cabang dan 12 kantor cabang perwakilan yang berlokasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Akta Pendirian Perseroan untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar Perseroan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0012650.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214433 tanggal 8 Juni 2018 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214434 tanggal 8 Juni 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0080101.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018 ("**Akta 32/2018**"). Akta 32/2018 memuat persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan hal-hal berikut:

1. Persetujuan pemegang saham atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham melalui pasar modal dengan pengeluaran saham baru dalam simpanan (portepel) Perseroan dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana termasuk pelaksanaan ESA dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan;
2. perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas tertutup/ non publik menjadi perseroan terbatas terbuka/ publik;
3. perubahan nama Perseroan yang sebelumnya PT Satria Antaran Prima menjadi PT Satria Antaran Prima Tbk;
4. Menyetujui pelaksanaan pencatatan saham Perseroan (*company listing*) yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32 Tahun 2014 dan POJK No. 33 Tahun 2014 dan juga memenuhi ketentuan UUPT, termasuk perubahan status Perseroan sehingga nama Perseroan menjadi PT Satria Antaran Prima Tbk dan perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan uraian pada kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
6. perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan sampai dengan perubahan terakhir selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Jasa Titipan, Ekspedisi dan Pergudangan, Transportasi, Percetakan, Keagenan, *Outsourcing* dan Transaksi Keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

1. Menjalankan usaha dalam Jasa Titipan:
  - Menjalankan kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan dan penyampaian informasi berupa surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, dokumen dan/atau sekogram.
  - Menjalankan kegiatan layanan pengambilan, penerimaan dan atau pengantaran barang.
  - Menjalankan kegiatan perencanaan, penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan pengiriman barang, termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi terkait.
  - Menjalankan kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindah-bukuan, pendistribusian dan pembayaran uang dari atau untuk penggunaan jasa.
2. Menjalankan usaha dalam Ekspedisi dan Pergudangan:
  - Menjalankan kegiatan ekspedisi pengiriman barang kargo dan *warehousing*.
3. Menjalankan usaha dalam bidang Transportasi dan Pengangkutan:
  - Menjalankan kegiatan pengambilan, pengiriman dan/atau pemrosesan barang-barang lewat moda transportasi darat, udara dan laut serta kegiatan lainnya.
4. Menjalankan usaha dalam bidang Percetakan:
  - Menjalankan kegiatan pencetakan dokumen dan/atau percetakan umum lainnya.
5. Menjalankan usaha dalam bidang Keagenan:
  - Menjalankan kegiatan yang bertindak sebagai distributor, agent dan menempatkan perwakilan-perwakilan baik badan-badan perusahaan lain atau perorangan, baik dari dalam maupun luar negeri.
6. Menjalankan usaha dalam bidang *Outsourcing*:
  - Menjalankan usaha dibidang jasa keamanan (*security*), jasa recruiting dan penyaluran tenaga kerja, jasa pelatihan dan keterampilan kerja.
7. Menjalankan usaha dalam bidang Transaksi Keuangan:
  - Menjalankan kegiatan layanan berupa uang, giro dan wesel melalui kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian dan pembayaran dari dan/atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan usaha penunjang:

Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Jakarta Selatan, sementara itu Kantor Pusat Operasional dan Pergudangan Perseroan berlokasi di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

## **B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

Perkembangan permodalan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### **Tahun 2016**

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Veronika Sri Hartati, SH., Notaris di Serang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0024433.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151959.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 ("**Akta 39/2016**"), para pemegang saham Perseroan telah setuju atas i) konversi pinjaman dari pemegang saham yang diberikan oleh Budiyanto Darmastono sebesar Rp27.000.000.000 atau sebanyak 270.000 saham dengan masing-masing nilai nominal sebesar Rp100.000, ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp3.000.000.000 menjadi sebesar Rp120.000.000.000 atau sebanyak 1.200.000 saham dengan disertai penerbitan 270.000 saham baru kepada Budiyanto Darmastono dan iii) peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp3.000.000.000 menjadi Rp30.000.000.000.

Dengan dilakukannya peningkatan modal dasar serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui konversi pinjaman pemegang saham tersebut, maka berdasarkan Akta 39/2016, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Budiyanto Darmastono	298.500	29.850.000.000	99,50
Yuwono Darmastoto	1.500	150.000.000	0,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>900.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	

### Tahun 2018

- Berdasarkan Akta No. 94 tanggal 26 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Veronika Sri Hartati, SH., Notaris di Serang, sebagaimana diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0128182 tanggal 28 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044252.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Maret 2018 ("**Akta 94/2018**"), para pemegang saham Perseroan telah setuju untuk melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) sehingga yang semula sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) yang mana peningkatan tersebut diperoleh dari setoran masing-masing pemegang saham Perseroan yaitu: i) Budiyanto Darmastono sebesar Rp9.950.000.000 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan ii) Yuwono Darmastoto sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Akta 94/2018 struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.200.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Budiyanto Darmastono	398.000	39.800.000.000	99,50
Yuwono Darmastoto	2.000	200.000.000	0,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>800.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0012650.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214433 tanggal 8 Juni 2018 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214434 tanggal 8 Juni 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0080101.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dan merubah nilai nominal saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Budiyanto Darmastono	398.000.000	39.800.000.000	99,50
Yuwono Darmastoto	2.000.000	200.000.000	0,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	

### C. KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tahun	Kejadian
2015	Perseroan mulai beroperasi sebagai penyelenggara kiriman dan paket dengan mengedepankan teknologi Android dan web yang dibekali pada setiap kurirnya. Perseroan mulai melayani pelanggan dari sektor perbankan dan asuransi. Jumlah cabang berkembang menjadi 40 cabang.
2016	Berbekal jaringan yang bertambah luas, Perseroan berpartisipasi dalam program distribusi Kartu Indonesia Pintar yang dipelopori oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, Perseroan mulai melayani pelanggan dari sektor ecommerce baik secara COD maupun Non-COD. Jumlah cabang bertambah menjadi 46 cabang.
2017	Perseroan mulai melayani pelanggan dari sektor farmasi dan <i>consumer goods</i> . Perseroan mulai mendapatkan manfaat yang signifikan dari jasa pengiriman COD. Jumlah cabang Perseroan bertambah menjadi 58 cabang dan 3 sub-cabang.
2018	Perseroan mulai melayani pelanggan dari sektor alat berat dan otomotif. Hingga Maret 2018, kurir Perseroan telah menjangkau pengiriman ke seluruh daerah di Indonesia melalui 58 cabang dan 12 sub-cabang yang tersebar di semua provinsi dan beberapa kabupaten yang ada di Indonesia.

### D. IZIN-IZIN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No	IZIN	KETERANGAN
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")	<p>Perseroan telah memperoleh SIUP berdasarkan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta No. 17296-04/PM/1.824.271 tanggal 1 September 2014 ("SIUP Menengah").</p> <p>Berdasarkan SIUP Menengah, Perseroan berusaha dalam kegiatan usaha Jasa Pengepakan (bukan industri dan tidak terkait jasa transportasi). SIUP Menengah berlaku sampai dengan 1 September 2019.</p> <p>Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menjalankan kegiatan pengepakan sebagaimana dimaksud dalam SIUP Menengah.</p>
2.	Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")	<p>Perseroan telah memiliki TDP untuk Kantor Pusat Perseroan dengan No. 09.03.1.82.93269 tanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Jakarta Selatan, dengan kegiatan usaha pokok yaitu Jasa Pengepakan yang berlaku hingga 1 September 2019 ("TDP Pusat").</p> <p>Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menjalankan kegiatan pengepakan sebagaimana dimaksud dalam TDP Pusat.</p> <p>Sehubungan dengan TDP kantor cabang dan kantor cabang perwakilan Perseroan yang belum dilakukan pendaftaran kepada instansi terkait pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selanjutnya Perseroan akan melakukan proses pengurusan atas TDP kantor cabang dan kantor cabang perwakilan sebagaimana dimaksud.</p>
3.	Izin Penyelenggaraan Pos	<p>Perseroan telah memperoleh izin penyelenggaraan pos berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("DJPP") No. 001 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 ("Surat Persetujuan 001/2015"). Berdasarkan Surat</p>

No	IZIN	KETERANGAN
		<p>Persetujuan 001/2015, Perseroan memperoleh izin untuk menyelenggarakan usaha pos dengan cakupan wilayah nasional paling sedikit di provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jenis layanan: i) komunikasi tertulis dan/ atau surat elektronik, ii) paket dan iii) logistik.</p> <p>Surat Persetujuan 001/2015 berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan pos dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Republik Indonesia dapat melakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun terhadap Surat Persetujuan 001/2015.</p> <p>Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DJPPI. Sehubungan dengan kewajiban menyampaikan laporan kegiatan operasional, Perseroan telah menyampaikan laporan kegiatan operasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Kegiatan Operasional semester II Tahun 2016 sebagaimana disampaikan kepada Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, DJPPI tertanggal 14 Februari 2017;</li> <li>b. Laporan Kegiatan Operasional semester I Tahun 2017 sebagaimana disampaikan kepada Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, DJPPI tertanggal 7 Agustus 2017; dan</li> <li>c. Laporan Kegiatan Operasional semester II Tahun 2017 sebagaimana disampaikan kepada Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, DJPPI tertanggal 17 Januari 2018.</li> <li>d. Laporan Kegiatan Operasional semester I Tahun 2018 sebagaimana disampaikan kepada Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, DJPPI tertanggal 17 Juli 2018.</li> </ol>
4.	Nomor Induk Berusaha	<p>Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha No. 8120104792678 tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> ("NIB"). Berdasarkan NIB tersebut, Perseroan terdaftar atas usaha pos komersial.</p> <p>NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.</p>

#### Kantor Pusat

Perseroan telah memiliki SKDP untuk Kantor Pusat Perseroan dengan No. 13/27/1BU.1/31.74.08.1002/-071.562/e/2016 tanggal 5 September 2016 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kalibata yang berlaku sampai dengan 5 September 2021. Alamat Kantor Pusat Perseroan sebagaimana tertera dalam SKDP adalah di Kalibata Office Park Blok G, Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G, RT 001, RW 008, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

#### Kantor Cabang

Perseroan telah memperoleh SKDP untuk masing-masing kantor cabang Perseroan yang terdiri dari:

No.	Lokasi	SKDP
1.	AMBON	SKDP No. 510/08/Pem.Neg.BTM-Sket tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Batumerah. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Ambon beralamat di RT 005/RW 08, Negeri Batumerah, Kota Ambon
2.	BALIKPAPAN	SKDP No. 600/179/Dbr tertanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Damai Baru. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Balikpapan beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 72, RT 33, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balik Papan Barat, Kota Balikpapan
3.	BANDA ACEH	SKDP No. 517/613/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan Lurah Lueng Bata Gampong Blang Cut Kota Banda Aceh. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Aceh beralamat di Jl. T. Imum Lueng Bata No. 30 Kota Banda Aceh
4.	BANDAR LAMPUNG	SKDP No. 503/07/V.17.VI.109/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Gading. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Bandar Lampung beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 136, RT 001, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung
5.	BANDUNG	SKDP No. 001/DP/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Turangga. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Bandung beralamat di Jl. Maskumbang No. 29, RT 07, RW 10, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung
6.	BANJARMASIN	SKDP No. 503-2632/SKTU/BV/DPMPSTP/2017 tertanggal 4 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Banjarmasin. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Banjarmasin beralamat di Jl. Pramuka Komplek Melati Indah No. 27, RT 006, kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur No. 70249
7.	JAKARTA BARAT (PROTOKOL)	SKDP No. 01/22/05/2018 tertanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT Kemanggisan. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Barat (Protokol) beralamat di RT 01/05, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
8.	BATAM	SKDP No. 167/DOM/517/BK/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Batam beralamat di Komplek Tanah Mas, Blok B No.10, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota
9.	BEKASI	SKDP No. 503/0217/KCBB tertanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Bekasi Barat. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Bekasi 1 beralamat di Jl. Bintara Jaya Raya No.3, RT 004, RW 008, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi
10.	BENGKULU	SKDP No. 474/80/III/1019/2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kampung Bali. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Bengkulu beralamat di Jl. Bali, RT 05, RW 02, No.17, Kelurahan Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu
11.	BOGOR	SKDP No. 503/25-TGN/2018 tertanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Gundil. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Bogor beralamat di Jl. Achmad Adnawijaya, RT 02, RW 05, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara



No.	Lokasi	SKDP
12.	BONTANG	SKDP No. 536/14/Kel-BB tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Bontang. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Bontang beralamat di Jl. Awang Long No.1, RT 06, kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara
13.	CIANJUR/ SUKABUMI	SKDP No. 474/067/KS/2018 tertanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Ciwalen. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Cianjur/Sukabumi beralamat di Jl. Raya Cianjur-Sukabumi KM 6, Kp. Cibanban RT 001/RW 008, Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur
14.	CIKAMPEK	SKDP No. 536/72/Desa tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaluyu. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Cikampek beralamat di Perumnas Bumi Telukjambe Blok B No. 306, RT 004, RW 010, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang
15.	CIKARANG	SKDP No. 503/473/I/PMD/2018 tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Telaga Asih. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Bekasi 2 beralamat di Jl. Imam Bonjol, No.14, RT 003, RW 001, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi
16.	CILEGON	SKDP No. 470/015/Ekbang/2018 tertanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Drangong. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Cilegon beralamat di Jl. Raya Serang-Cilegon, KM 3, Ruko Legok Sukmajaya, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang, Banten
17.	CIREBON	SKDP No. 140/009/I/Ds.PMK.2018 tertanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Cirebon beralamat di Ruko Citraland Blok D7, RT 006, RW 009, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon
18.	DENPASAR	SKDP No. 500/270/XII/2016 tertanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumerta Kauh. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Denpasar beralamat di Jl. Dahlia No.5, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar
19.	DEPOK	SKDP No. 503/79-Ekbang tertanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Baktijaya. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Depok beralamat di Kp. Sugutamu, RT 008, RW 021, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
20.	GORONTALO	SKDP No. 475/LH/I/89 tertanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa Luhu. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Gorontalo beralamat di Jl. H. U. Mootalu, Dusun V, Desa Luhu, Kecamatan Telaga
21.	HALIM	SKDP No. 11/01/08/II/18 tertanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT Kebon Pala II. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Jakarta Timur beralamat di Jl. Komodor Udara, No. 28, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
22.	JAMBI	SKDP No. 503/22/2018 tertanggal 1 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Handil. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Jambi beralamat di Jl. Yunus Sanis, RT 03, Kelurahan Kebon Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi
23.	JAYAPURA	SKDP No. 503/396/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Asano. Berdasarkan SKDP tersebut,

No.	Lokasi	SKDP
		Kantor Cabang Jayapura beralamat di Jl. Raya Tanah Hitam, RT 002, RW 05, Kelurahan Asano, Kota Jayapura
24.	JEMBER	SKDP No. 422/902/01/2001/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangli. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Jember beralamat di Jl. Otista No. 95, RT 001, RW 007, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
25.	KEDIRI	SKDP No. 470/78/419.407/2018 tertanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Campurejo. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Kediri beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 130, RT 011, RW 002, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri
26.	KENDARI	SKDP No. 474.4/07/2018 tertanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Anduonohu. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Kendari beralamat di Jl. Kelapa Komp, BTN Taman Celebes Blok C5, RT 04, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari
27.	KUDUS	SKDP (tidak terdapat nomor) tertanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loram Kulon. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Kudus beralamat di Jl. Patimura, No. 467, Loram Kulon, RT 01, RW 04, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
28.	KUPANG	SKDP No. Kel.KL.500/01/1/2017 tertanggal 9 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelapa Lima. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Kupang beralamat di RT 017, RW 007, Kelurahan Kelapa Lima, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
29.	MADIUN	SKDP No. 473/87/401.403.2/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pandean. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Madiun beralamat di Serayu Timur PGM Blok B-12, RT 043, RW 015, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun
30.	MAKASAR	SKDP No. 503/388/KD/XII/2016 tertanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Daya. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Makassar beralamat di Jl. Kapasa Raya Ruko Pagodam Blok C2 No.16, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar
31.	MALANG	SKDP No. 530/29/35.73.01.1007/2014 tertanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Purwantoro. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Malang beralamat di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, Kavling H, No. 8, RT 09, RW 13, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang
32.	MANADO	SKDP No. 474/7171.05.03/282/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tikala Baru. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Manado beralamat di Jl. Daan Mogot No 44, Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado
33.	MANOKWARI	SKDP No. 511/086/2017 tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Manokwari Barat. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Manokwari beralamat di Jl. Reremi Pemda, RT 003, RW 012, Kelurahan Manokwari Barat
34.	MEDAN	SKDP No. 474/346/SM2016 tertanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Suka Maju. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Medan beralamat di Jl. Sisingamaraja No. 480 Lingkungan I, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan

No.	Lokasi	SKDP
35.	MERAUKE	SKDP No. 530/014 tertanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mandala. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Merauke beralamat di Jl. Biak RT 005, RW 001, Kelurahan Mandala, Merauke
36.	PADANG	SKDP No. 600/26/UKS/2018 tertanggal 1 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Ulak Karang Selatan. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Padang beralamat di Jl. Jhoni Anwar Q/8, RT 003, RW 012, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang
37.	PALANGKARAYA	SKDP No. 138.474/98/Jkr- Yanmas/V/2017 tertanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Jekan Raya. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Palangkaraya beralamat di Jl. Temanggung Tilung III No. 01 A, RT 006, RW 011, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
38.	PALEMBANG	SKDP No. 510/45/DLD/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Demang Lebar Daun. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Palembang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kota Palembang
39.	PANGKAL PINANG	SKDP No. 474.4/10/SKDP/Kel.SLD/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Selindung. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Pangkalpinang beralamat di Jl. Raya Selindung, RT 04/03, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang
40.	PEKALONGAN	SKDP No. 045.2/122/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Podosugih. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Pekalongan beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 18, kelurahan Podosugih, Kecamatan pekalongan Barat, Kota Pekalongan
41.	PEKANBARU	SKDP No. 349/503-BR/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Bukitraya. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Pekanbaru beralamat di Jl. Brigjen Katamso, No. 40A, RT 01, RW 03, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru
42.	PONTIANAK	SKDP No. 582/10/EkBang/KT/I/2017 tertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Tengah. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Pontianak beralamat di Jl. Merdeka Barat No. 501, RT 002, RW 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota
43.	PURWOKERTO	SKDP No. 420.3/010/II/2018 tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Purwokerto beralamat di Jl. Gerilya Barat No. 17, RT 001, RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas
44.	JAKARTA PUSAT	SKDP No. 238/SP/V/2018 tertanggal 24 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kwitang. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Pusat/ Utara beralamat di Jalan Kramat IV No. 8. RT 005, RW 09, Kwitang, Jakarta Pusat
45.	SAMARINDA	SKDP No. 500/110/AP-XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Putih. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Samarinda beralamat di Jl. Juanda II RT 1, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
46.	JAKARTA SELATAN I	SKDP No. 48/SKD/004-08/U/2018 tertanggal 22 Mei 2018 yang

No.	Lokasi	SKDP
		dikeluarkan oleh Kepala Lurah Pasar Minggu. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Selatan 1/2 beralamat di Jalan Teluk Bayur I/7, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
47.	JAKARTA SELATAN II	SKDP No. 43/KT/007/07/2015 tertanggal 06 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua RT Gandaria Utara. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Selatan 3/4 beralamat di Jalan H. Syahrir No. 9, Jakarta Selatan
48.	SEMARANG	SKDP No. 970/31/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Semarang Barat. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Semarang beralamat di Jl. Muradi Raya No. 47, Kota Semarang
49.	SOLO (SURAKARTA)	SKDP No. 510/036 tertanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Manahan. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Solo beralamat di Jalan Cemara 18 RT 01, RW 02, Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
50.	SORONG	SKDP No. 500/41/2018 tertanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Klawuyuk. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Sorong beralamat di Jl. Basuki Rahmat KM 10, RT 001, RW 001, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat
51.	SURABAYA	SKDP No. 510/93/436.10.75/2016 tertanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Jemurwonosari. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Surabaya beralamat di Jl. Jemursari Selatan IV/32, Surabaya
52.	TANGERANG	SKDP No. 503/88/I/PU/2018 tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Cibodas. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Tangerang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 99, RT 002, RW 006, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang
53.	TANJUNG PINANG	SKDP No. 593/DP/III/2018 tertanggal 6 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjungpinang Barat. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Tanjungpinang beralamat di Jl. Borobudur No. 44, RT 004, RW 008, Kelurahan Kemboja, kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang
54.	TARAKAN	SKDP No.474/07/Kel.Sbk/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sebengkok. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Tarakan beralamat di Jl. P. Diponegoro, RT 19, RW 07, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah
55.	TASIKMALAYA	SKDP No. 474/26/Pemtrantib tertanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukamanah. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Tasikmalaya beralamat di Jl. Moch. Hatta RT001/RW001 No. 127 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya
56.	TERNATE	SKDP No. 407/236/2017 tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalumata. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Ternate beralamat di Kelurahan Kalumata, RT 007, RW 003, Kota Ternate
57.	TIMUR	SKDP No. 2503/1.755.02 tertanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Klender. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Timur beralamat di Jl. KH Maisin No.4A, RT 003, RW 016, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur.

No.	Lokasi	SKDP
58.	YOGYAKARTA	SKDP No. 01/03/2018 tertanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT Caturtunggal. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Yogyakarta beralamat di Jl. Cempaka No. 14A, Deresan Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Kantor Cabang Perwakilan

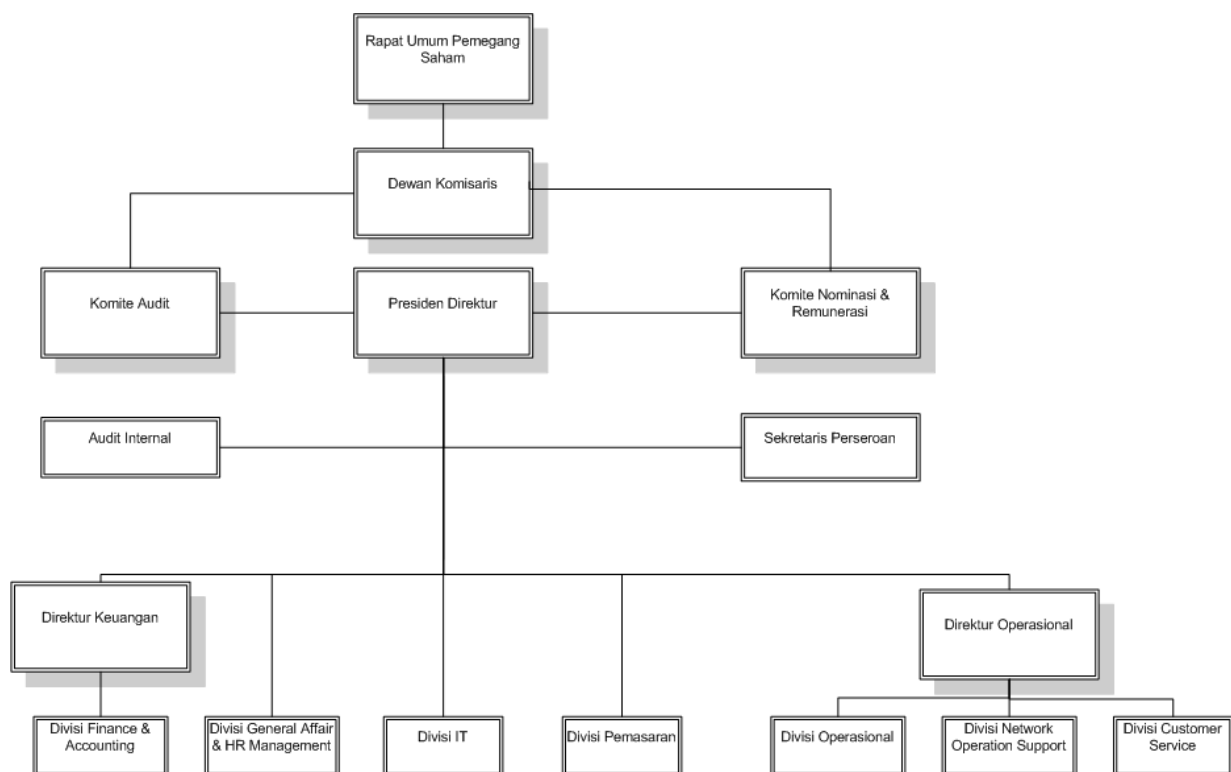
Perseroan telah memperoleh SKDP untuk masing-masing kantor cabang perwakilan Perseroan yang terdiri dari:

No.	Lokasi	SKDP
1.	PALOPO	SKDP No. 470/75/KSL/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Salekoe. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Perwakilan Palopo beralamat di Jalan Pemuda 2, Perum Fortuna Blok A1, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur
2.	PASURUAN	SKDP No. 146/06/423.401.03/2018 tertanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa'an Kota Pasuruan. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Perwakilan Pasuruan beralamat di Jalan Juanda Ruko PTC, Blok D-13, RT 03, RW 02, Kelurahan Tapa'an, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan
3.	PEMATANG SIANTAR	SKDP No. 145/527/V/2181/2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sumber Jaya. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Perwakilan Pematang Siantar beralamat di Jalan Medan Km 3.5, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martaba, Kota Pematang Siantar
4.	RANTAU PRAPAT	SKDP (tidak terdapat nomor) tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Binaraga, Kelurahan Cendana. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Perwakilan Rantau Prapat beralamat di Jl. Urip Sumodiharjo No. 14, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara
5.	SINGKAWANG	SKDP No. 122/Y/2018 tertanggal 23 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Sekip Lama. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Perwakilan Singkawang beralamat di RT 015, RW 005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang, Kota Singkawang
6.	TEGAL	SKDP No. 140/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagongan. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Perwakilan Tegal beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal
7.	BUKIT TINGGI	SKDP No. 503/136/PPME-AK/II-2018 tertanggal 5 Februari 2018. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Perwakilan Bukit Tinggi beralamat di Jl. M. Yamin, SH No. 57, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo, Kota Bukittinggi.
8.	MOJOKERTO	SKDP No. 0199/031/05/2018 tertanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kedundung. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Perwakilan Mojokerto beralamat di Desa Sumur, RT 009, RW 003, Kecamatan Karas, Kelurahan Kedundung
9.	PARE PARE	SKDP No. 461/5/2/C.Gig tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Perwakilan Pare-Pare beralamat

No.	Lokasi	SKDP
		di Mattirotasi, RT 001, RW 001, Kelurahan Cappa Galung, Kota Pare-Pare
10.	PAYAH KUMBUH	SKDP No. 510/00.88/SKU-BBK/I/2018 tertanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan Lurah Bulakan Balai Kandi. Berdasarkan SKDP tersebut Kantor Cabang Perwakilan Payah Kumbuh beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 227, RT 01, RW 01, Kelurahan Balai Kandi.
11.	SANGGAU/SOSOK	SKDP No. 140/25/01/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Perwakilan Sanggau/Sosok beralamat di Dusun Tahan, RT 001, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau
12.	TANJUNG PANDAN	SKDP No. 115/AK/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aik Ketekok. Berdasarkan SKDP tersebut, Kantor Cabang Perwakilan Tanjung Pandan beralamat di Jalan Sijuk, RT 019, RW 005, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung

## E. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Nency Christanti  
 Komisaris Independen : Prilli Budi Pasravita Soetantyo

## Direksi

Presiden Direktur	: Budiyanto Darmastono
Direktur Operasional	: Untung Santoso
Direktur Keuangan (Independen)	: Alfried Taftazani

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

## Dewan Komisaris



**Nancy Christanti**  
*Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 43 tahun.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2018. Saat ini menjabat sebagai Direktur pada PT Putra Nusa Sejati (2008-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sales Manager pada PT BTMU BRI Finance (2000-2012) dan Staff Corporate Secretary Division pada PT Masaro Radiokom (1999-2000). Meraih gelar Master Bidang Marketing dari Universitas Trisakti, Indonesia pada tahun 2008 dan gelar Sarjana Bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti, Indonesia pada tahun 1998.



**Prilli Budi Pasravita Soetantyo**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 42 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2018. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Interkayu Nusantara (2005-sekarang) dan Direktur Utama pada PT Pratama Abadi Nusa Industri (2000-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur pada PT Bali Indonesia Food (2009-2011), International Marketing pada Yapi Kredit Bank AG, Jerman (2002-2011), Direktur pada PT National Food Packers (1999-2009), Deputi Direktur pada PT Blambangan Food Packers Indonesia (1999-2009), Finance Manager pada PT Putera Darma (1999-2009). Meraih gelar Sarjana Bidang Business Study dari University of Hertfordshire, Inggris pada tahun 1998.

## Direksi



**Budiyanto Darmastono**  
*Presiden Direktur*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 51 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018. Saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Solid Logistics (2010-sekarang) dan Direktur Utama pada PT Sinergi Layanan Integrasi (2005-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan (2014-2018), Direktur Utama pada PT Nusantara Card Semesta (1994-2012), dan Financial Controller pada PT Diners Jaya Indonesia International (1990-1994). Meraih gelar Ahli Madya Bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 1990 dan Sarjana Bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, Indonesia tahun 2000.



**Untung Santoso**  
*Direktur Operasional*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 46 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Manager Operation & Air Freight pada Ninja Express (PT Andiarta Muzizat) (2016-2018), Commercial Director pada PT Global Maju Bersama (2015-2016), Deputy Director Cargo & Logistics pada PT Angkasa Pura Solusi (2014-2015), Logistics Manager pada PT Yusen Air Service (2010-2014), General Manager pada PT CPX Indonesia (2007-2009), Deputy General Manager pada PT Citra Pembina Pengangkutan Industri (2005-2006), Branch Manager pada PT Nippon Express Indonesia (2002-2005), General Manager pada PT EAS International Transportation (2001-2002), Forwarding Manager pada PT Bahtera Overseas Line (1999-2001), Cargo Sales and Operation Manager pada Pakistan International Airlines (1996-1999), dan Cargo Sales and Operation pada United Airlines (1995-1999). Meraih gelar Sarjana Bidang Air Transport Management dari STMT Trisakti, Indonesia pada tahun 1995.



**Alfried Taftazani**  
*Direktur Keuangan (Independen)*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 38 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan (Independen) Perseroan sejak tahun 2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Group Head Finance and Operation pada PT Scheneider Electric Indonesia (2016-2017), Country Commercial Deputy Director pada PT PZ Cussons Indonesia (2014-2015), Deputy Finance Director pada PT Graha Layar Prima Tbk (2013-2014), Group Finance Controller pada PT Wood Group Kenny Indonesia (2013), Country Finance Head pada PT Wrigley Indonesia (2011-2013), berbagai posisi senior pada kantor akuntan publik dalam negeri (2002-2011), dan Staf Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran (2001-2002). Meraih gelar Master Bidang Business Administration dari Universitas Bina Nusantara, Indonesia pada tahun 2009 dan gelar Sarjana Bidang Ekonomi dari Universitas Mercu Buana, Indonesia pada tahun 2006.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi POJK 33 Tahun 2014. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif diangkat melalui Akta 32/2018 tanggal 7 Juni 2018.

Terdapat hubungan keluarga antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dimana Presiden Komisaris merupakan pasangan dari Presiden Direktur.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan / atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

#### Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.



4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan.

#### Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali.

Adapun rekapitulasi rapat komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Kehadiran</b>	<b>Presentase Tingkat Kehadiran</b>
Nency Christanti*	-	-	-
Prilli Budi Pasravita Soetantyo*	-	-	-
Yuwono Darmastoto**	3	3	100%

\*) Menjabat sejak bulan Juni 2018

\*\*) Menjabat hingga bulan Juni 2018

Selama tahun 2018 hingga selesai masa jabatannya, Yuwono Darmastoto telah menerbitkan surat keputusan Dewan Komisaris pengganti Rapat Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Nency Christanti dan Prilli Budi Pasravita Soetantyo belum melakukan rapat Dewan Komisaris sejak diangkat pada bulan Juni 2018.

#### Rapat Dewan Direksi

Rapat Dewan Direksi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2018, Dewan Direksi telah melakukan rapat internal Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) kali.

Adapun rekapitulasi rapat direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Kehadiran</b>	<b>Presentase Tingkat Kehadiran</b>
Budiyanto Darmastono	3	3	100%
Untung Santoso*	-	-	-
Alfried Taftazani*	-	-	-

\*) Menjabat sejak bulan Juni 2018

Selama tahun 2018, Budiyanto Darmastono telah menerbitkan surat keputusan Direksi pengganti Rapat Direksi sebanyak 3 (tiga) kali. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Untung Santoso dan Alfried Taftazani belum pernah menghadiri rapat Direksi sejak diangkat pada bulan Juni 2018.

#### **SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 074/SK-DIR/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, telah ditunjuk Denny Parhan sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35 Tahun 2014. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

#### **Kantor**

*Corporate Secretary*

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA TBK**

Jl. Komodor Udara No. 28, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, 13650

Telepon : (021) 2280 6611

Email: corp.secretary@sap-express.com

Website: www.sap-express.id

#### Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:

1. Hubungan Masyarakat
  - a. Meneliti dan mengkoordinasikan pelaksanaan kehumasan; dan
  - b. Meneliti dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi dan publikasi untuk pembentukan menjaga dan meningkatkan citra perusahaan.
2. Hubungan antar lembaga dan kepatuhan
  - a. Meneliti dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan GCG; dan
  - b. Meneliti dan mengkoordinasikan pelaksanaan hubungan antar lembaga dan hubungan internasional.
3. Hubungan investor
  - a. Menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada investor, analisis serta media masa; dan
  - b. Memberikan saran kepada manajemen terkait dengan saham perseroan.

#### **KOMITE AUDIT**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 122/SK-DIR/VI/2018 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan tanggal 22 Juni 2018 dalam rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Prilli Budi Pasravita Soetantyo

Anggota : Didi Achjari

Warga Negara Indonesia, 47 tahun.

Saat ini menjabat sebagai Academic Staff di Universitas Gadjah Mada (1994-sekarang), Ketua Komite Audit di PT Pertamina Patra Niaga (2016-sekarang), Komisioner di PT Pertamina Patra Niaga (2016-sekarang), dan Komisaris di PT Gamatechno Indonesia (2007-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat pada berbagai posisi kependidikan dan kelembagaan di Universitas Gadjah Mada. Meraih gelar Doctor of Business Administration dari Curtin University of Technology, Australia pada tahun 2003, Master of Commerce dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1999, dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 1993.

Anggota : Hirdjan Syafi'i

Warga Negara Indonesia, 68 tahun.

Saat ini menjabat sebagai Partner pada KAP Maksum, Suyamto dan Hirdjan (2002-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (1997-2018), Pimpinan di KAP Hirdjan Syafi'i Ak., M.M. (1992-2002), Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STEI) (1978-1997), dan Kepala Sub Bagian Analisa Keuangan Perantara (1977-1987). Meraih gelar Magister Management dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 1990 dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 1977.

Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan dan melakukan telaah atas efektivitas system pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan juga eksternal auditor dan internal auditor;
2. Melakukan penilaian kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal/Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen;
4. Memastikan telah terdapat prosedur yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
5. Menyusun Piagam Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta memutakhirkannya dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan Perseroan; dan

6. Meninjau, mengkaji ulang secara berkala prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan *Corporate Governance* yang berlaku di Perseroan serta memastikan bahwa prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan tersebut masih relevan serta telah dilaksanakan sepenuhnya di Perseroan.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 124/SK-DIR/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Piagam Komite Audit Perseroan, yang mengatur antara lain, tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit Perseroan:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Sejak pembentukan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit belum melaksanakan Rapat Komite Audit.

**UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERNAL)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 123/SK-DIR/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 56 Tahun 2015 tentang Penunjukkan Unit Audit Internal Perseroan, Perseroan telah membentuk Audit Internal, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Arie Akbar  
Warga Negara Indonesia, 32 tahun.  
Menjabat sebagai Internal Audit Perseroan sejak 2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Internal Audit pada PT Astra Graphia Tbk (2010-2018). Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjajaran pada tahun 2010.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No.125/SK-DIR/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018. Tugas Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya;
2. Berkoordinasi dengan Komite Audit Perseroan;
3. Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu;
4. Melakukan audit khusus apabila diperlukan dan atas permintaan dari manajemen;
5. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
6. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
7. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
8. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
9. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
10. Meyakinkan semua harta Perseroan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
11. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
12. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur Perseroan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
14. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Tanggung jawab Unit Audit Internal:

Internal audit tidak bertanggung jawab dalam perkembangan rinci dan penerapan suatu sistem dan prosedur. Dalam hal ini, hanya berfungsi sebagai konsultan dan katalis.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor; dan
5. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 128/SK-DIR/VI/2018 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 22 Juni 2018, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua Komite : Prilli Budi Pasravita Soetantyo  
Anggota : Nancy Christanti

Febby Anita Malik

Warga Negara Indonesia, 40 tahun.

Menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 2018. Saat ini menjabat sebagai HR Development pada PT Hariff Daya Tunggal Eng (2008-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Recruitment and Training Officer pada PT Global Maju Bersama (2005-2008) dan Psikolog/Konselor pada Andira Consultant (2001-2005). Meraih gelar Profesi (Psikologi) dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2005 dan Sarjana dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2001.

Masa jabatan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi di atas terhitung sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 22 Juni 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.126/SK-DIR/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
8. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi:

1. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

#### Remunerasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Perseroan memberikan kompensasi imbalan kerja jangka pendek kepada Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Remunerasi	31 Desember			31 Maret 2018
	2015	2016	2017	
Dewan Komisaris	180.000.000	204.000.000	204.000.000	51.000.000
Dewan Direksi	600.000.000	780.000.000	780.000.000	195.000.000
<b>Total</b>	<b>780.000.000</b>	<b>984.000.000</b>	<b>984.000.000</b>	<b>246.000.000</b>

## G. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (“SDM”) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Maret 2018, Perseroan memiliki 2.480 karyawan yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.

Dalam hal fasilitas dan kesejahteraan karyawan, Perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan standar upah minimum pada masing-masing tempat Perseroan beroperasi.

### Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 menurut menurut status hubungan kerja, jenjang jabatan, usia, jenjang pendidikan, dan lokasi:

#### Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja

Keterangan	31 Desember			31 Maret 2018
	2015	2016	2017	
Tetap	638	530	466	458
Tidak Tetap	176	489	1.506	2.022
<b>Jumlah</b>	<b>614</b>	<b>1.019</b>	<b>1.972</b>	<b>2.480</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember			31 Maret 2018
	2015	2016	2017	
Komisaris	1	1	1	1
Direksi	1	1	1	1
Manager & Supervisor	47	55	79	91
Branch Manager	9	22	38	39
Koordinator & Leader	82	94	117	119
Staff	203	387	742	894
Kurir	271	459	994	1.335
<b>Jumlah</b>	<b>614</b>	<b>1.019</b>	<b>1.972</b>	<b>2.480</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Keterangan	31 Desember			31 Maret 2018
	2015	2016	2017	
>50	13	15	20	29
41-50	124	169	251	311
31-40	270	410	720	831
<31	207	425	981	1.309
<b>Jumlah</b>	<b>614</b>	<b>1.019</b>	<b>1.972</b>	<b>2.480</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember			31 Maret 2018
	2015	2016	2017	
Pasca Sarjana	2	2	3	4
Sarjana	41	85	238	323
Diploma	46	74	151	177
SLTA	525	858	1.580	1.976
<b>Jumlah</b>	<b>614</b>	<b>1.019</b>	<b>1.972</b>	<b>2.480</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi Perseroan

Keterangan	31 Desember			31 Maret 2018
	2015	2016	2017	
Kantor Pusat	179	268	407	434
Jawa & Bali	380	614	897	1.218
Sumatera	45	91	392	480
Kalimantan	4	20	96	124
Sulawesi	6	24	96	122
Papua, Ambon & Nusa Tenggara	-	2	84	102
<b>Jumlah</b>	<b>614</b>	<b>1.019</b>	<b>1.972</b>	<b>2.480</b>

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

### Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Terdapat beberapa perbedaan dalam komponen remunerasi/fasilitas yang diberikan Perseroan kepada karyawan menurut status kekaryawannya (tetap dan tidak tetap). Karyawan tetap Perseroan mendapatkan komponen remunerasi/fasilitas yang lebih unggul dibandingkan karyawan tidak tetap. Perbedaan komponen remunerasi/fasilitas antara karyawan tetap dan tidak tetap yaitu sebagai berikut:

#### Komponen remunerasi/fasilitas Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak Tetap
1	Gaji Pokok	√	√
2	Insentif / Bonus	√	-
<b>Tunjangan</b>			
1	Tunjangan Produktivitas	√	√
2	Tunjangan Tengah Tahun	-	-
3	Tunjangan Hari Raya	√	√
4	Tunjangan Jabatan Struktural	√	√
5	Tunjangan Pajak	√	√
6	Bantuan Istirahat Tahunan ( <i>Annual Leave</i> )	-	-
7	Uang Perjalanan Dinas	√	√
8	Upah Kerja Lembur	√	√
9	Bantuan Uang Transport Khusus	√	√
10	Tunjangan Kerja <i>Shift</i>	√	√
<b>Fasilitas/Benefit</b>			
1	Pakaian Seragam dan/atau Pakaian Kerja	√	√
2	Asuransi Tenaga Kerja	√	√
3	Asuransi Kesehatan untuk Karyawan dan Keluarga	√	√

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak Tetap
4	Fasilitas mutasi (uang pindah, perumahan / penggantian perumahan)	√	-
5	Bantuanacamata	-	-
6	Iuran Dana Kesehatan Pensiun	√	√
7	Program kemudahan ( <i>soft loan</i> ) ibadah umroh/pilgrim	-	-
8	Bantuan Kepemilikan Kendaraan (COP)	√	√
9	Apresiasi Momen Khusus Pegawai (pernikahan, kelahiran anak, & ulang tahun pernikahan)	√	√
<b>Cuti</b>			
1	Cuti Tahunan	√	√
2	Cuti Istimewa	-	-
3	Cuti Sakit	√	√
4	Cuti di luar tanggungan	√	√
5	Cuti Ibadah	√	√
<b>Lain-Lain</b>			
1	Iuran Pasti (Pensiun)	√	√
2	Penghargaan Masa Bakti 10, 20, 30, dan 35 Tahun	-	-
3	Bantuan Duka Cita	√	√

### Serikat Pekerja dan Koperasi

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Karyawan Perseroan tergabung dalam Koperasi karyawan yang sifatnya wajib diikuti bagi setiap karyawan.

### Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Perseroan, baik program-program pelatihan yang diwajibkan oleh pihak berwenang maupun program-program pelatihan yang opsional, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pelatihan	Kategori Pelatihan
1.	Kurir Pick Up	Delivery
2.	Training Lapangan	
3.	On Job Training Aspek-Aspek COD	
4.	Ready For Carriage, Dangerous Good Awareness, Weight Computation Refer IATA	
5.	Aspek-Aspek GA Dan HRD	GA & HRD
6.	Coresys	IT
7.	IT Help Desk System	
8.	On Job Training Aspek-Aspek Network	
9.	Finance, Accounting, Cod Monitoring System, SOP	Keuangan
10.	On Job Training Kartu Kredit	
11.	Aspek-Aspek Legal Dan Collection	Legal
12.	On Job Training Aspek-Aspek Legal	
13.	Training Leadership Leader	Manajemen
14.	Time Management	
15.	Business Process, SOP, Complaint DII	
16.	Process Cs, Ds, Complain Handling & Closing SLA	
17.	On Job Training Aspek-Aspek Operation	
18.	Supervision & Leadership	
19.	Time & Stress Management	
20.	Aspek-Aspek Sales Marketing	Sales
21.	On Job Training/Aspek-Aspek Customer Service	
22.	Digital Marketing	
23.	Customer Focused Selling	
24.	Negotiation Skills	



No.	Pelatihan	Kategori Pelatihan
25.	Sales Procees & Pipeline Management	
26.	The Best Selling Skills	
27.	Interpersonal & Communication Skills	
28.	The Seven Habits Of Highly Effective People	
29.	Customer Service Excellent	

## H. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Budiyanto Darmastono melalui kepemilikan langsung pada saham Perseroan.

## I. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan
Nency Christanti	PK
Prilli Budi Pasravita Soetantyo	KI
Budiyanto Darmastono	PD, PSU
Untung Santoso	D
Alfried Taftazani	DI
Yuwono Darmastoto	PS

Keterangan:

- PK : Presiden Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- PD : Presiden Direktur
- D : Direktur
- DI : Direktur Independen
- PSU : Pemegang Saham Utama
- PS : Pemegang Saham

## J. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum Indonesia.

## K. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

### 1. PERJANJIAN PINJAMAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan dan Budiyanto Darmastono (“**Pemberi Pinjaman**”) selaku pemegang saham Perseroan telah membuat perjanjian pemegang saham No. 015/SAP-LGL/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 (“**Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham**”) dengan rincian sebagai berikut:

#### Obyek Perjanjian

Perseroan meminta pinjaman sebesar Rp7.741.628.494 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) dari Pemberi Pinjaman untuk tujuan membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan dan Pemberi Pinjaman sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, dan tunduk pada syarat dan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pemberi Pinjaman telah setuju untuk meminjamkan kepada Perseroan uang sebesar Rp7.741.628.494 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
- b. Pemberi Pinjaman dan Perseroan setuju bahwa utang yang harus dibayar oleh Perseroan adalah jumlah dari pinjaman tanpa disertai dengan bunga dan biaya-biaya lainnya.

#### Jaminan

Tidak ditentukan secara khusus.

#### Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham adalah 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham. Pemberi Pinjaman atas kehendaknya dapat menambah jangka waktu pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham.

#### Hak dan Kewajiban

- a. Pinjaman dapat ditarik oleh Perseroan pada saat dana tersebut dibutuhkan untuk modal kerja perusahaan dan dapat diambil pada hari kerja dengan pemberitahuan tertulis dari Perseroan kepada Pemberi Pinjaman;
- b. Perseroan hanya dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Seluruh pembayaran dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham ini dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah;
- d. Penunjukkan bank dan tempat pembayaran akan diberitahukan secara periodik oleh Pemberi Pinjaman kepada Perseroan;
- e. Apabila Perseroan membayar dengan mata uang yang berbeda, Perseroan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemberi Pinjaman;
- f. Terkecuali jangka waktu pinjaman diperpanjang oleh kehendak Pemberi Pinjaman, maka Perseroan wajib membayarkan utang pada hari terakhir jangka waktu pinjaman yaitu jatuh pada tanggal 31 Desember 2018.

#### Pembatasan-Pembatasan

- a. Perseroan wajib menunjukkan legalitasnya kepada Pemberi Pinjaman sebagai dasar berlakunya Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham;
- b. Perseroan menjamin kepada Pemberi Pinjaman bahwa Perseroan tidak sedang terlibat dengan keadaan wanprestasi;
- c. Perseroan menyatakan kepada Pemberi Pinjaman bahwa Perseroan tidak sedang terlibat sengketa hukum di Indonesia;
- d. Setelah mengikatkan diri pada Perjanjian Pemegang Saham, Perseroan dilarang untuk menjual, menggadaikan, dan mentransfer seluruh aset yang dimiliki Perseroan kepada pihak lain;
- e. Perseroan wajib memberikan detail informasi mengenai segala kejadian hukum yang sedang dijalani;
- f. Perseroan wajib memberitahukan segala kehilangan, pengeluaran, penyusutan dan pembiayaan yang terjadi sebagai konsekuensi dari berbagai bentuk wanprestasi.

#### Keadaan Cedera Janji

Perihal yang tergolong sebagai keadaan cedera janji berdasarkan Pinjaman Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak dapat menjalankan seluruh atau sebagian dari ini Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham;
- b. Informasi yang diberikan Perseroan dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham ialah salah atau tidak benar;

- c. Perseroan tidak mampu membayar pinjaman pada saat jatuh tempo;
- d. Perseroan dinyatakan bangkrut atau pailit;
- e. Segala bentuk pengambilalihan, pengurangan, kesulitan, penyitaan yang berpengaruh pada aset Perseroan dan tidak dapat dikembalikan pada waktu 30 (tiga puluh hari);
- f. Perseroan tidak mampu meneruskan usahanya dengan alasan apapun;
- g. Apabila terjadi keadaan cedera janji, Pemberi Pinjaman berhak untuk menyegerakan pembayaran utang yang masih harus dibayar oleh Perseroan.

## 2. PERJANJIAN OBLIGASI KONVERSI

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Obligasi Yang Dapat Dikonversi tertanggal 24 November 2016 dengan GD Express Carrier Bhd (“**GDEX**”) yang mana Perseroan bertindak sebagai penerbit dan GDEX sebagai pemegang obligasi (“**Perjanjian Obligasi Konversi**”).

### Obyek Perjanjian

- Tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian Obligasi Konversi, Perseroan wajib menerbitkan, untuk kepentingan GDEX, suatu obligasi yang dapat dikonversi sejumlah Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) (“**Obligasi**”), yang terdiri dari 20 (dua puluh) Obligasi, masing-masing memiliki nilai nominal Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah).
- Obligasi akan diterbitkan melalui sertifikat Obligasi yang membuktikan hutang Perseroan kepada GDEX.
- Masing-masing Obligasi akan:
  - o Diterbitkan atas nama GDEX;
  - o Dapat dialihkan (tunduk pada Ketentuan Perjanjian Obligasi Konversi);
  - o Dijamin oleh masing-masing Dokumen Jaminan (sebagaimana didefinisikan di bawah);
  - o Tidak dapat dibeli kembali oleh Perseroan; dan
  - o Jatuh tempo dan terhutang kepada GDEX dan berada para urutan lebih dahulu dari setiap klaim oleh pemegang saham Perseroan untuk pengembalian modal dalam hal likuidasi, pembubaran atau penutupan oleh Perseroan.

### Jaminan

Untuk menjamin Perjanjian Obligasi Yang Dapat Dikonversi, GDEX dan Pak Budiyanto Darmastono sebagai penjamin telah membuat jaminan sebagaimana berikut:

1. Perjanjian Gadai Saham tertanggal 21 Desember 2016 yang dibuat antara Pak Budiyanto Darmastono dan GDEX (“**Perjanjian Gadai Saham**”); dan
2. Kuasa Untuk Menjual Saham tertanggal 21 Desember 2016 yang dibuat antara Budiyanto Darmastono dan GDEX (“**Kuasa Untuk Menjual**”).

(Perjanjian Gadai Saham dan Kuasa Untuk Menjual secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Jaminan**”).

### Jangka Waktu

Perjanjian Obligasi Konversi jatuh tempo pada tahun ke-5 (kelima) tanggal Perjanjian Obligasi Konversi atau pada tanggal 24 November 2021 (“**Tanggal Jatuh Tempo**”).

### Hak dan Kewajiban

Selama Perjanjian Obligasi Konversi berlaku, GDEX memiliki hak:

- (i). Kecuali dikonversi sebelumnya atau suatu Pemberitahuan Konversi diterbitkan (sebagaimana didefinisikan di bawah), Perseroan wajib untuk menebus Obligasi secara penuh (i) pada Tanggal Jatuh Tempo; atau (ii) pada saat selesainya Penawaran Umum Perdana atas Perseroan (mana yang lebih dulu); atau (iii) tanggal lain yang disepakati oleh para pihak. Apabila Perseroan tidak menebus Obligasi berdasarkan ketentuan diatas, ketika telah jatuh tempo yang dibuktikan dengan pemberitahuan sebelumnya dari Perseroan namun tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja

sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Perseroan wajib membayar premi penebusan pada harga yang akan ditentukan oleh para pihak pada waktu tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo dalam jumlah yang belum dibayar dari waktu ke waktu yang masih ada untuk periode yang dimulai satu hari setelah jatuh temponya dan berakhir pada tanggal dimana GDEX menerima pembayaran.

- (ii). Tunduk kepada sebagaimana yang dinyatakan setelah ini, GDEX (atau penerima pengalihannya) memiliki hak untuk mengonversi Obligasi menjadi saham pada Perseroan ("**Hak Konversi**") sewaktu-waktu selama Periode Konversi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang dinyatakan di bawah ini.

Tunduk pada diperolehnya setiap persetujuan hukum atas pemenuhan ketentuan dalam Perjanjian Obligasi Konversi, Hak Konversi yang melekat pada suatu Obligasi dapat (dan tidak wajib) dilaksanakan (secara keseluruhan atau sebagian), atas diskresi tunggal dari GDEX, sewaktu-waktu dari tanggal penerbitan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo atau selesainya Penawaran Umum Perdana (mana yang lebih dulu) ("**Periode Konversi**").

- (iii). Jumlah saham yang akan diserahkan pada konversi Obligasi adalah 10.000 (sepuluh ribu) saham pada Perseroan. Untuk menghindari keraguan, Obligasi akan mewakili 40% (empat puluh persen) dari saham pada Perseroan setelah konversi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham. Hak Konversi dapat dilakukan sehubungan dengan satu atau lebih Obligasi. Apabila terdapat lebih dari satu Obligasi yang dimiliki oleh GDEX yang dikonversi pada satu waktu yang sama, maka jumlah saham yang akan diserahkan pada saat konversi tersebut akan dihitung berdasarkan jumlah pokok agregat dari Obligasi yang akan dikonversi; dan
- (iv). Untuk tujuan konversi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Obligasi Konversi, GDEX wajib memberitahukan Perseroan atas maksudnya untuk melaksanakan Hak Konversi tidak kurang dari 20 hari kerja sebelum tanggal konversi ("**Pemberitahuan Konversi**").
- (v). Setelah menerima Pemberitahuan Konversi, Perseroan diwajibkan untuk:
- Mengambil setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan, mendapatkan setiap dan seluruh persetujuan dan pemberitahuan yang diperlukan untuk memberlakukan konversi Obligasi ke dalam saham Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada, memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham Perseroan dan Menkumham serta pemerintah terkait, dan melaporkan ke Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
  - Mempersiapkan dan menandatangani dokumen yang diperlukan untuk memberlakukan penerbitan saham Perseroan dari modalnya untuk kepentingan GDEX;
  - Mengubah Anggaran Dasar Perseroan (termasuk sehubungan dengan peningkatan modal Perseroan) dan memperoleh seluruh persetujuan pemerintah, perusahaan dan pihak ketiga yang diperlukan;
  - Mengeluarkan sertifikat(-sertifikat) baru atau sertifikat(-sertifikat) kolektif saham atas nama GDEX, menyerahkan sertifikat- sertifikat saham baru kepada GDEX; dan
  - Mendaftarkan GDEX sebagai pemegang saham baru dari Perseroan dalam daftar pemegang saham Perseroan.
- (vi). Perseroan wajib menggunakan upaya terbaiknya untuk mendapatkan seluruh persetujuan yang diperlukan dari pemerintah terkait dan pihak ketiga sehubungan dengan penerbitan saham Perseroan sesuai dengan konversi Obligasi.

#### Pembatasan-Pembatasan

Perseroan selanjutnya berjanji bahwa sejak tanggal Perjanjian Obligasi Konversi hingga Perjanjian Obligasi Konversi berakhir, Perseroan tidak akan melakukan atau menyebabkan timbulnya tindakan berikut tanpa persetujuan tertulis dari GDEX, yang mana persetujuan tersebut tidak boleh dihambat tanpa alasan yang wajar:

- a) Penerbitan Saham Baru:  
Penerbitan saham baru dalam permodalan atau surat berharga lainnya dalam bentuk apapun yang dapat dikonversi menjadi atau ditukar dengan saham dalam permodalan kecuali untuk konversi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dan konversi Obligasi;
- b) Struktur Modal:  
Mengubah atau menyesuaikan struktur permodalan (termasuk nilai nominal masing-masing saham dalam permodalan Perseroan), kecuali untuk tujuan konversi Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, penawaran umum perdana atau untuk konversi Obligasi;
- c) Anggaran Dasar:  
Mengubah atau menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku dan Perjanjian Obligasi Konversi;
- d) Penggabungan:  
Melakukan rekonstruksi, peleburan, reorganisasi, penggabungan, pengambilalihan, perubahan substansial pemegang saham atau skema kompromi lainnya atau pengaturan yang mempengaruhi komposisi yang ada saat ini;
- e) Manajemen:  
Melakukan perubahan dalam komposisi direksi dan dewan komisaris dan anggota seniornya saat ini dari Perseroan kecuali diwajibkan berdasarkan Perjanjian Obligasi Konversi;
- f) Penciptaan Hutang Lain:  
Memperoleh tambahan fasilitas kredit lain (termasuk leasing) dalam bentuk apapun dari kreditur lain (selain GDEX) kecuali dalam kegiatan bisnis normal;
- g) Larangan:  
Perseroan setuju, selama terdapat jumlah berapapun dari Obligasi manapun:
  - i. Pihaknya tidak akan (kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau berdasarkan keputusan pengadilan) mengalihkan, menjual, mentransfer, menyelesaikan berdasarkan kepercayaan, atau menghapus atau memberikan atau mengizinkan adanya pilihan lain, terkait kepentingan saham yang dimiliki atau dokumen yang terkait atau bermaksud untuk melakukannya, atau mengizinkan pihak lain untuk terdaftar sebagai pemegang setiap saham tersebut; atau memberikan kepada pihak ketiga suatu kepentingan dalam atau hak terkait Saham tersebut yang tidak sesuai dengan Perjanjian Obligasi Konversi (kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku atau keputusan pengadilan);
  - ii. Pihaknya tidak akan dan tidak akan setuju untuk membuat, mengadakan, menanggung, atau menerima adanya suatu pembebanan atas atau sehubungan dengan properti, pendapatan, atau sehubungan dengan properti, pendapatan, atau asetnya (nyata, pribadi atau campuran berwujud atau tidak berwujud) baik yang sekarang dimiliki atau setelah diakuisisi;
  - iii. Pihaknya tidak akan melakukan penggabungan, peleburan, konsolidasi, reorganisasi modal atau keuangan, rekonstruksi, skema pengaturan, atau sebaliknya.
- h) Pelepasan:  
Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau menghapus seluruh atau sebagian besar asetnya maupun sebagian dari aset, baik sendiri atau digabungkan dengan semua penghapusan yang memerlukan pertimbangan berdasarkan ayat ini, merupakan sesuatu yang substansial dalam kaitannya dengan aset atau penghapusan (baik sendiri-sendiri atau secara keseluruhan) yang dapat berpengaruh secara material, kecuali dalam kegiatan bisnis normal;
- i) Investasi:  
Membeli, memperoleh atau memesan saham dari anak perusahaan atau perusahaan afiliasi atau melakukan suntikan ekuitas atau investasi lain, kecuali untuk pinjaman subordinasi yang telah disepakati dalam proyeksi keuangan yang diusulkan pada tahun tersebut atau dalam kegiatan bisnis normal;

- j) Pembayaran Awal:  
Secara sukarela mempercepat pembayaran setiap pinjaman yang tidak berhubungan dengan kegiatan bisnis normal; dan
- k) Pembayaran Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham:  
Secara sukarela membayar pinjaman pokok beserta bunga atas setiap pinjaman kepada pemegang saham, kecuali Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham.

#### Catatan

Terkait pembatasan kepada Perseroan sehubungan dengan: (i) penerbitan saham baru, (ii) perubahan struktur modal, (iii) perubahan anggaran dasar dan (iv) perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Perjanjian Obligasi Konversi, Perseroan telah memperoleh pengesampingan dari GDEX sebagaimana termaktub dalam surat dari GDEX kepada Perseroan tertanggal 3 Juli 2018.

### **PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

#### **1. PERJANJIAN KERJASAMA BANK MANDIRI**

Perseroan telah menandatangani perjanjian pengiriman billing statement dan dokumen kartu kredit melalui surat perjanjian kerjasama jasa pengiriman No. 0829/SPP/OPS.SPC.GSS/2016 tanggal 23 Desember 2016 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Mandiri**") ("**Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri**").

#### Obyek Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri, Mandiri setuju untuk menggunakan jasa Perseroan guna mengirimkan billing statement dan dokumen kartu kredit kepada nasabah Mandiri.

#### Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Pengiriman Mandiri adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.

#### Biaya dan Denda

- a. Denda sebagai sanksi ketidaksiksesan pengiriman barang;
- b. Keterlambatan pengiriman akan mengakibatkan perseroan akan mendapatkan denda dari Mandiri, dengan nilai denda berbeda – beda berdasarkan tipe pengiriman yang dilaksanakan. Adapun keterlambatan lain selain keterlambatan pengiriman yang dapat didenda yaitu, (i) keterlambatan penyampaian closing report (laporan pengiriman), (ii) keterlambatan pelaporan barang yang berhasil diterima oleh nasabah Mandiri, (iii) keterlambatan pengembalian barang;
- c. Denda keterlambatan resi tanda terima untuk keperluan investigasi;
- d. Keterlambatan penyerahan laporan hasil investigasi;
- e. Penyalahgunaan data;
- f. Kelalaian – kelalaian lain yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri.

#### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Mandiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Berhak untuk memperoleh jasa pengiriman dengan sistem ikatan harga satuan tanpa volume pasti (open contract) dengan ruang lingkup wilayah;
  - 1. Paket A : Jabodetabek;
  - 2. Paket B : Wilayah kota besar;
  - 3. Paket C : Wilayah kota *forward*.
- b. Mandiri tidak berkewajiban untuk melaksanakan sebagian atau keseluruhan pengiriman kartu kredit melalui Perseroan;
- c. Wajib membayar tagihan atas pekerjaan yang dilaksanakan perseroan;
- d. Wajib memberikan pernyataan dan jaminan yang benar, yang menjadi bagian dari Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri; dan
- e. Mandiri berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri sewaktu – waktu apabila Perseroan tidak memenuhi *target services level*.

Hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan (performance bond) yang diterbitkan oleh bank pemerintah selain Mandiri atau bank swasta, lembaga keuangan non-bank yang disetujui oleh Mandiri, dengan nilai minimal 5% (lima persen) dari nilai perjanjian;
- b. Wajib menyerahkan fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, dan fotokopi izin – izin perusahaan sebagai kondisi awal yang harus terpenuhi;
- c. Wajib menghapus data pengiriman yang diperoleh dari bank dengan usia lebih dari 6 (enam) bulan, yang dibuktikan dengan berita acara penghapusan data; dan
- d. Wajib memberikan pernyataan dan jaminan yang benar, yang menjadi bagian dari Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri.

#### Pembatasan – Pembatasan

- a. Perseroan tidak dapat mengalihkan pekerjaan yang diberikan Mandiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri dengan cara apapun sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri;
- b. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh Perseroan selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri, kecuali bila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

#### Keadaan Cedera Janji

- a. Bilamana tidak menyediakan jasa pengiriman sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut – turut tidak ada perbaikan dari Perseroan; dan
- b. Perseroan dinyatakan melakukan pelanggaran yang mendasar, yang meliputi, (i) satu atau lebih pernyataan jaminan yang diberikan perseroan adalah tidak benar, (ii) Perseroan menghentikan kegiatan usahanya, (iii) izin – izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan dicabut, atau tidak dapat diperbarui atas kelalaian Perseroan, (iv) Perseroan mempengaruhi Mandiri dalam rangka melakukan praktik korupsi dan kecurangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri dan (v) Perseroan melanggar salah satu ketentuan Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri.

#### Pengakhiran

- a. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri ini dapat diakhiri secara sepihak bilamana perseroan dinyatakan cedera janji;
- b. Jika kepemilikan, manajemen, atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan salah satu pihak dalam Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri dipindahtangankan kepada pihak lain;
- c. Jika salah satu pihak dinyatakan pailit atau dilikuidasi dan status demikian membuat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- d. Bilamana terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan kewajiban – kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Bank Mandiri ini tidak dapat dilaksanakan selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

## **2. PERJANJIAN KERJASAMA ISS**

Perseroan telah menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan PT ISS Indonesia (“ISS”) mengenai jasa pengiriman dokumen/paket dengan Surat Perjanjian Kerjasama No. 077/PKS/D/SAP/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 (“**Perjanjian Kerjasama ISS**”).

#### Obyek Perjanjian

Ruang lingkup pekerjaan Perseroan yang menjadi objek perjanjian ialah memberikan jasa pengiriman dokumen/ paket sesuai dengan kebutuhan ISS.

#### Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ISS adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018, dengan kemungkinan perpanjangan atas kesepakatan para pihak.

#### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban ISS berdasarkan Perjanjian Kerjasama ISS adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menerima jasa pengiriman dokumen/paket dari Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ISS;
- b. Berhak menerima laporan atas pelaksanaan pekerjaan;
- c. Wajib melakukan pembayaran atas jasa yang diterima dari Perseroan;
- d. ISS bertanggung jawab penuh atas substansi isi dokumen/paket yang dikirim Perseroan.

Hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ISS adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menerima pembayaran dari ISS atas jasa yang diberikan;
- b. Wajib melaksanakan pengiriman;
- c. Wajib memberikan laporan tentang hasil pengiriman, dan memberikan weekly report serta summary tagihan sebelum di fakturkan kepada ISS;
- d. Perseroan bertanggung jawab penuh atas tindakan petugas/ kurir pengirim dokumen/paket.

#### Pembatasan – Pembatasan

Perseroan wajib menjaga kerasiahan semua informasi, data, laporan dan/atau dokumen lainnya yang diberikan oleh ISS. Kecuali yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku wajib untuk diberitahukan kepada pemerintah.

### **3. PERJANJIAN KERJASAMA HMS**

Perseroan telah menandatangani perjanjian penyediaan jasa Ref. 05779/HMS/12/2017 tertanggal 29 Desember 2017 dengan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (“HMS”) mengenai jasa pengiriman barang (“Perjanjian Kerjasama HMS”).

#### Obyek Perjanjian

Ruang lingkup pekerjaan Perseroan adalah memberikan jasa pengiriman kurir untuk HMS.

#### Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama HMS adalah 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan kemungkinan perpanjangan. Perpanjangan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) dan ditentukan berdasarkan kinerja Perseroan.

#### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban HMS berdasarkan Perjanjian Kerjasama HMS adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menerima jasa pengangkutan oleh Perseroan;
- b. Berhak untuk meminta Perseroan mengganti tenaga kerja bilamana tenaga kerja perseroan terbukti melakukan tindak pidana kriminal;
- c. Wajib membayar Perseroan atas nilai sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan;

Hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama HMS adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menerima pembayaran dari HMS atas jasa yang diberikan;
- b. Wajib menyiapkan armada yang disesuaikan dengan jadwal pick up – cut off yang telah disepakati para pihak;
- c. Wajib memberikan arahan kepada tenaga kerja Perseroan untuk tidak melakukan hal – hal yang dilarang dalam Perjanjian Kerjasama HMS;
- d. Wajib menyiapkan peralatan kerja yang sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku guna pelaksanaan pekerjaan;
- e. Wajib memberi tahu HMS atas premi asuransi yang ditambahkan apabila nilai barang per pengiriman adalah di atas Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

#### Pembatasan – Pembatasan

Tidak diatur secara khusus.



#### 4. PERJANJIAN KERJASAMA PERMATA

Perseroan telah menandatangani surat perjanjian penyediaan jasa dengan PT Bank Permata Tbk (“**Permata**”), yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama No. PUM/SKU/0931 tertanggal 16 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Terhadap Lampiran II No. PVM.CS/5003695/ADD/151005 tertanggal 23 Oktober 2015 (“**Perjanjian Kerjasama Permata**”).

##### Obyek Perjanjian

Adapun ruang lingkup pekerjaan Perseroan adalah memberikan jasa pengiriman dokumen dan/ atau *Personal Identification Number* (PIN) kepada nasabah Permata.

##### Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Permata adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018.

##### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Permata berdasarkan Perjanjian Kerjasama Permata adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menerima jasa pengangkutan oleh Perseroan;
- b. Wajib membayar Perseroan atas nilai sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan;
- c. Wajib memberikan pernyataan dan jaminan yang benar sesuai dengan yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama Permata.

Hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Permata adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menerima pembayaran dari Permata atas jasa yang diberikan;
- b. Wajib memberikan pernyataan dan jaminan yang benar sesuai dengan yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama Permata;
- c. Wajib menyimpan dan memelihara catatan – catatan dan dokumen – dokumen terkait dengan transaksi keuangan dan transaksi non keuangan sehubungan dengan pekerjaan perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Permata untuk kepentingan audit;
- d. Wajib menjamin untuk tidak memerintahkan atau mengizinkan atau membantu pihak lain untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak atau membahayakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Permata;
- e. Wajib membuat perencanaan kontijensi yang berisi prosedur – prosedur yang dapat dilakukan Perseroan di saat Perseroan tidak dapat melakukan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama Permata pada masa terjadinya *force majeure*.

##### Pembatasan – Pembatasan

- a. Perseroan tidak diperbolehkan men-subkontrakkan sebagian maupun seluruh dari pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama Permata tanpa persetujuan dari Permata.
- b. Perseroan memiliki kewajiban menjaga informasi rahasia yang diperoleh dari pekerjaannya untuk Permata. Adapun informasi rahasia didefinisikan sebagai semua data, laporan, dan atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana disepakati pada Perjanjian Kerjasama Permata maupun yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama Permata namun tidak terbatas pada rahasia bank. Pengecualian dari kewajiban ini adalah apabila Perseroan harus membuka informasi rahasia tersebut dikarenakan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### 5. PERJANJIAN KERJASAMA BCA

Perseroan telah menandatangani surat penunjukan No. 048/DPC/2015 tertanggal 20 Februari 2015 oleh PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”) perihal penunjukan Perseroan untuk mengirimkan rekening koran kepada nasabah BCA (“**Perjanjian Kerjasama BCA**”).

##### Obyek Perjanjian

Adapun ruang lingkup dari pekerjaan Perseroan ialah untuk mengirimkan rekening koran kepada nasabah BCA, dengan wilayah pengiriman di daerah Jabodetabek.

#### Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama BCA efektif berlaku sejak tanggal 1 Maret 2015 dan tidak ditentukan mengenai kapan berakhirnya Perjanjian Kerjasama BCA.

#### Hak dan Kewajiban

Tidak diatur secara khusus.

#### Pembatasan – Pembatasan

Tidak diatur secara khusus

### **6. PERJANJIAN KERJASAMA AMINDOWAY**

Perseroan telah menandatangani surat perjanjian kerjasama pengiriman barang dengan PT Amindoway Jaya (“**Amindoway**”), yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman Barang No. 103/IV/AJ-SAP/AGR/2017 tertanggal 1 Februari 2017 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama No. 071/SAP/LGL-C/ADD-I/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018 (“**Perjanjian Kerjasama Amindoway**”).

#### Obyek Perjanjian

Adapun ruang lingkup pekerjaan Perseroan adalah memberikan jasa pengiriman atas barang atau produk lainnya dari Amindoway ke alamat yang ditentukan oleh Amindoway sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Amindoway.

#### Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Amindoway adalah 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2020. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Amindoway dapat diperpanjang dengan berdasarkan kesepakatan para pihak.

#### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Amindoway berdasarkan Perjanjian Kerjasama Amindoway adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menerima jasa pengangkutan oleh Perseroan atas perintah *pick – up* produk dari *hub* Amindoway;
- b. Berhak sewaktu – waktu melakukan inspeksi atas fasilitas pengiriman yang dilakukan Perseroan;
- c. Berhak menggunakan jasa pengiriman dari pihak lain, mengingat Perjanjian Kerjasama Amindoway antara Perseroan dan Amindoway adalah non-eksklusif;
- d. Wajib membayar Perseroan atas nilai sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan;
- e. Wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai isi dan jenis barang, termasuk jumlah dan jenis produk yang akan dikirimkan;
- f. Wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai barang berbahaya yang dikirim serta cara pengendalian barang berbahaya yang benar.

Hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Amindoway adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menerima pembayaran dari Amindoway atas jasa yang diberikan;
- b. Wajib menerbitkan resi atas setiap pengiriman yang disertai dengan nomor pelacakan yang dapat diakses melalui sistem pelacakan yang disediakan oleh Perseroan. Sistem pelacakan dimaksud harus dapat diakses oleh Amindoway dan semua pengguna produk Amindoway.
- c. Wajib memberikan pernyataan dan jaminan yang benar sesuai dengan yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama Amindoway;
- d. Wajib memenuhi standar yang ditentukan oleh Amindoway termasuk dalam menangani pengiriman barang berbahaya (*dangerous goods*);
- e. Wajib memberikan laporan pengiriman barang kepada Amindoway secara mingguan;
- f. Wajib menyediakan moda transportasi dan tempat penyimpanan yang sesuai dan aman untuk pengiriman produk yang tergolong barang berbahaya.

#### Pembatasan – Pembatasan

- a. Perseroan tidak diperbolehkan mengalihkan atau mendelegasikan sebagian maupun seluruh dari pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama Amindoway kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari Amindoway;
- b. Perseroan memiliki kewajiban untuk menjaga informasi rahasia yaitu (i) nama dan alamat penerima, (ii) jumlah dan frekuensi pengiriman barang dan (iii) uraian dan nama produk.

### **7. PERJANJIAN KERJASAMA MAYBANK**

Perseroan dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“**Maybank**”) telah menandatangani perubahan pertama perjanjian kerjasama pengiriman dokumen dan kartu kredit No. SPJ.2017.001-01/DIR OPS/001/SAP/LGL-B/I/2018 tertanggal 15 Mei 2017 (“**Perjanjian Kerjasama Maybank**”).

#### Obyek Perjanjian

Perseroan wajib memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman Dokumen, Kartu ATM dan/atau Kartu Kredit ke tempat tujuan yang ditentukan oleh Maybank baik dalam kota maupun luar kota sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

#### Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama Maybank berlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2019.

#### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Perseroan dan Maybank ialah sebagai berikut:

- a. Perseroan dengan ini menyatakan akan memberikan prioritas kepada Maybank dalam hal melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, Perseroan harus mendahulukan permintaan Maybank daripada permintaan pengguna jasa Perseroan lainnya;
- b. Perseroan wajib melaksanakan pengambilan dokumen, kartu ATM dan/atau kartu kredit di kantor cabang Maybank untuk dikirim pada tempat yang ditentukan oleh Maybank antara jam 08.30 sampai dengan 16.30 WIB pada setiap hari kerja atau waktu-waktu lain atas permintaan Maybank. Apabila pengambilan dokumen, kartu ATM dan/atau kartu Kredit melewati jam 16.30 WIB, maka waktu pengambilan akan dihitung keesokan harinya. Perseroan wajib melaksanakan pengambilan dokumen, kartu ATM dan/atau kartu kredit untuk dikirim pada tempat yang ditentukan oleh Maybank sesuai jam/waktu yang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Maybank;
- c. Perseroan wajib mengambil dokumen, kartu ATM dan/atau kartu kredit berdasarkan pemberitahuan Maybank, melalui telepon dan email dalam waktu maksimum 2 (dua) jam sejak pemberitahuan disampaikan;
- d. Perseroan wajib melaporkan status pengantaran dokumen, kartu ATM dan/atau kartu kredit tertentu dalam waktu 1 (satu) hari kerja berdasarkan permintaan cek pengiriman (inquiry) yang disampaikan oleh Maybank kepada Perseroan. Perseroan wajib mengirimkan tanda terima pengantaran dokumen, kartu ATM dan/atau kartu kredit tertentu dalam waktu 1 (satu) hari kerja berdasarkan permintaan cek pengiriman (inquiry) yang disampaikan oleh Maybank kepada Perseroan;
- e. Jika diminta oleh Maybank, Perseroan wajib menyelesaikan investigasi atau verifikasi atas pengantaran dokumen, kartu ATM dan/atau kartu kredit selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja untuk area Jabodetabek dan 7 (tujuh) hari kerja untuk area luar Jabodetabek untuk memastikan bahwa dokumen, kartu ATM dan/atau kartu kredit telah diantar sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Maybank;
- f. Setiap dokumen, kartu ATM dan/atau kartu kredit yang tidak dapat diserahkan kepada cardholder, dengan alasan pindah alaman atau alasan lainnya, wajib dikembalikan kepada Maybank dalam keadaan baik dan lengkap paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pengiriman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Maybank;
- g. Melaporkan status pengantaran dokumen dan/atau kartu kredit yang telah dikirimkan atau masih dalam proses pengantaran atau dikembalikan kepada Maybank sebanyak 2 (dua) kali sehari melalui perangkat lunak disket (disc), cakram padat (compact disk), atau surat elektronik (e-mail). Perseroan wajib menyerahkan dan melaporkan seluruh hasil pengiriman Dokumen dan kartu kredit dengan jangka waktu maksimum sebagai berikut:

- (i) 6 (enam) Hari Kerja sejak tanggal pengambilan dokumen untuk laporan Jabodetabek;
  - (ii) 9 (sembilan) Hari Kerja sejak tanggal pengambilan dokumen untuk laporan luar Jabodetabek;
  - (iii) 9 (sembilan) Hari Kerja sejak tanggal pengambilan kartu kredit untuk laporan Jabodetabek;
  - (iv) 11 (sebelas) Hari Kerja sejak tanggal pengambilan kartu kredit untuk laporan luar Jabodetabek.
- h. Perseroan wajib melaporkan status pengantaran kartu ATM yang telah dikirimkan atau masih dalam proses pengantaran atau dikembalikan kepada kantor cabang Maybank setiap hari melalui surat elektronik (e-mail) dengan alamat: dmsar@maybank.co.id;
- i. Perseroan wajib mengirimkan waybill yang telah ditandatangani penerima kartu ATM beserta nama penerima dan nomor identitas penduduk yang ditulis tangan kepada kantor cabang Maybank. Waybill tersebut harus sudah diterima oleh kantor cabang Maybank 6 (enam) hari kerja setelah Perseroan melaksanakan pengambilan kartu ATM di kantor cabang Maybank.

#### Pembatasan – Pembatasan

- a. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan data dan pengamanan informasi milik/dari Maybank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mengenai rahasia bank dan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- b. Maybank, termasuk direksi/karyawannya atau pihak lain manapun yang mewakili Maybank dilarang untuk meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Perseroan diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Maybank. Setiap tindakan/perbuatan meminta dan/atau menerima sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun dari Perseroan diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Maybank merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran atas kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Maybank;
- c. Perseroan dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/ atau hadiah atau sesuatu dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian, kepada direksi/ karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili Maybank.

## **8. PERJANJIAN KERJASAMA BANK MEGA**

Perseroan dan PT Bank Mega Tbk ("**Bank Mega**") telah menandatangani perjanjian kerjasama jasa pengiriman dokumen sebagaimana tertera dalam Surat Penawaran Nomor 024/SAP-AWP/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018 ("**Perjanjian Kerjasama Bank Mega**").

#### Obyek Perjanjian

Perseroan menyanggupi penunjukan dari Bank Mega untuk melakukan pekerjaan pengiriman kartu kredit regular atau voucher yang sudah dalam keadaan siap kirim berlokasi di kantor Bank Mega, bertempat di Menara Bank Mega Kuningan Lt. 8, Jl RS Aini Kav 5-6 Setiabudi Jakarta Selatan 12910 atau pada tempat yang ditunjuk oleh Bank Mega untuk diantarkan menuju alamat Penerima Barang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1-10 Hari Kerja ("**Perjanjian Kerjasama Bank Mega**"). Prosentase SLA (*Service Level Agreement*) pengiriman tersebut adalah:

- a. Regular
  - 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja (H+5) = 80%
  - 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja (H+10) = 20%
- b. Urgent
  - 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Hari Kerja (H+2) = 85%, apabila lewat dari 2 (dua) Hari Kerja maka dianggap sebagai pengiriman regular

#### Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama Bank Mega berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018.

#### Hak dan Kewajiban

- a. Perseroan wajib menjaga dan bertanggung jawab atas kelengkapan, kerahasiaan dan keamanan kartu kredit regular atau voucher dari penyalahgunaan, kehilangan, kerusakan dan keterlambatan pengiriman sejak kartu kredit regular atau voucher tersebut diserahkan oleh Bank Mega kepada Perseroan.

- b. Perseroan wajib melakukan konfirmasi tertulis kepada Bank Mega apabila terjadi perubahan data atau alamat dari penerima barang.
- c. Perseroan harus bersedia melakukan pencetakan ulang kartu kredit regular atau voucher berdasarkan permintaan penerima barang, yang diakibatkan oleh tidak diterimanya bukti tanda terima atau hasil investigasi. Terhadap biaya pencetakan ulang ini, Bank Mega dibebaskan atas biaya pengiriman kartu kredit regular atau voucher tersebut.
- d. Perseroan wajib memberikan laporan-laporan sebagai berikut:
  - Laporan hasil pengiriman harian dalam bentuk softcopy (text file) yang terdiri dari laporan rinci (yang dilengkapi dengan nama nasabah, nama penerima, status penerima, tanggal pengambilan, tanggal terima, alamat nasabah, nomor unik dari Bank Mega). Laporan ini harus disampaikan ke pihak Bank Mega setiap hari mulai H (tanggal pick up) + 3 sampai dengan batas kartu kredit regular atau voucher jatuh tempo;
  - Laporan rekapitulasi hasil pengiriman (jumlah yang sukses dan gagal) setiap minggu yang terdiri dari laporan rekapitulasi berdasarkan kota dan tanggal pengambilan dokumen; dan
  - Laporan akhir diserahkan kepada Bank Mega pada H-2 hari kalender sebelum kartu kredit regular atau voucher jatuh tempo.

Pembatasan – Pembatasan

Tidak ditentukan secara khusus

**9. PERJANJIAN KERJASAMA CIMB NIAGA**

Perseroan dan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB Niaga**") telah menandatangani perjanjian kerjasama jasa pengiriman No. 001/PKS/SAP/D/IX/2017 tertanggal 11 September 2017 ("**Perjanjian Kerjasama CIMB Niaga**").

Obyek Perjanjian

Perseroan sepakat untuk memberikan jasa pengiriman kepada nasabah CIMB Niaga yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan proses dan jadwal serta prosedur yang telah ditentukan oleh CIMB Niaga kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama CIMB Niaga.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2019 yang akan ditinjau setiap 12 (dua belas) bulan oleh Para Pihak. Perjanjian dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak, kesepakatan akan dituangkan dalam suatu perjanjian baru/ perubahan Perjanjian Kerjasama CIMB Niaga.

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban Perseroan ialah sebagai berikut:

- a. Perseroan melakukan pengiriman dokumen/barang yang diberikan CIMB Niaga kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu, tata cara dan prosedur yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama CIMB Niaga.
- b. Perseroan menjamin sepenuhnya bahwa dokumen/barang akan disampaikan kepada nasabah dalam jangka waktu sesuai dengan kriteria pengiriman.
- c. Apabila dokumen/barang tidak dapat diserahkan pada pengiriman pertama, maka Perseroan wajib melakukan komunikasi dengan telepon (*follow up*) kepada nasabah (data nomor telepon akan diberikan oleh CIMB Niaga kepada Perseroan pada saat serah terima dokumen) dan wajib memberikan laporan konfirmasi secara tertulis bersamaan pemberian laporan pertanggungjawaban pekerjaan kepada CIMB Niaga. Nomor telepon nasabah hanya boleh digunakan sebagai media komunikasi dari kantor pusat Perseroan kepada nasabah, dan tidak diperkenankan diinformasikan kepada petugas kurir yang melakukan pengantaran dokumen di lapangan dan tidak diperkenankan untuk dicetak pada media apapun termasuk *way bill*.

Hak dan kewajiban CIMB Niaga ialah sebagai berikut:

- a. CIMB Niaga wajib membayar tarif jasa pengiriman yang akan ditagih oleh Perseroan setiap bulan sesuai jasa pengiriman yang telah dilakukan/diselesaikan oleh Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak penagihan diterima oleh CIMB Niaga dan setelah diperhitungkan potongan pajak penghasilan dan/atau sanksi denda yang timbul.
- b. Pembayaran tarif jasa pengiriman Perseroan yang dibayar oleh CIMB Niaga adalah tagihan Perseroan atas jasa pengiriman yang dilakukan pada 1 (satu) bulan sebelumnya dan status laporan pertanggungjawaban pekerjaannya telah selesai dilaporkan ke CIMB Niaga (penyelesaian closing report).
- c. CIMB Niaga berhak untuk sewaktu-waktu melakukan investigasi terhadap prosedur pengiriman, inspeksi lapangan atau mengevaluasi kinerja terhadap Perseroan. Apabila dari hasil investigasi ini diketahui bahwa Perseroan tidak dapat memenuhi standar kualitas yang disepakati, seperti yang tercantum dalam Perjanjian, maka CIMB Niaga berhak untuk mengurangi dan/atau menghentikan pengiriman seluruhnya yang dilakukan oleh Perseroan.

#### Pembatasan – Pembatasan

- a. Perseroan tidak diperbolehkan memberikan atau menginformasikan tarif biaya kirim dalam bentuk softcopy atau bentuk apapun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari CIMB Niaga.
- b. Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia (Perseroan) karena melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya (CIMB Niaga).

### **10. PERJANJIAN KERJASAMA HCI**

Perseroan dan PT Home Credit Indonesia (“HCI”) telah menandatangani jasa pengiriman barang dengan Surat Perjanjian Kerjasama No. 73/SAP/LGL-C/X/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Adendum Perjanjian Kerjasama No. 085/LGL-HCID/PKS/07-2018 tertanggal 25 Juli 2018 (“**Perjanjian Kerjasama HCI**”).

#### Obyek Perjanjian

Adapun ruang lingkup pekerjaan Perseroan adalah memberikan jasa pengiriman barang dengan wilayah tertentu melalui darat dan/atau udara sesuai dengan kebutuhan HCI yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama HCI.

#### Jangka Waktu

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama HCI adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2019, dengan kemungkinan perpanjangan. Perpanjangan adalah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun tiap masa perpanjangan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban HCI berdasarkan Perjanjian Kerjasama HCI adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menerima jasa pengiriman oleh Perseroan;
- b. Wajib mengemas barang kiriman secara sempurna sebelum dikirimkan dengan jasa Perseroan;
- c. Wajib menjamin barang yang dikirim tidak termasuk barang – barang yang melanggar hukum;
- d. Wajib membayar atas jasa yang diberikan Perseroan;
- e. Wajib memberitahukan dengan jelas isi, nilai, serta cara penanganan barang yang bersifat resiko tinggi.

Hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama HCI adalah sebagai berikut:

- a. Berhak menerima pembayaran dari HCI atas jasa yang diberikan;
- b. Wajib menyiapkan armada yang disesuaikan dengan jadwal *pick up – cut off* yang telah disepakati para pihak;
- c. Perseroan bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang timbul atas pengangkutan, beserta segala resiko yang timbul;
- d. Wajib menyediakan kondisi kendaraan yang layak secara operasional dan memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pembatasan – Pembatasan  
Tidak diatur secara khusus

#### PERJANJIAN-PERJANJIAN KREDIT

Pada dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kredit dengan pihak ketiga manapun.

#### PERJANJIAN-PERJANJIAN SEWA

Pada dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga sehubungan dengan bangunan kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang perwakilan.

##### Kantor Pusat

No.	Lokasi	Nilai Perjanjian Sewa	Masa Berlaku Sewa	Catatan
1.	Kantor Pusat	Rp64.000.000	37 bulan terhitung sejak 10 Juni 2014 sampai dengan 10 Juli 2017	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Pusat

##### Kantor Cabang

No.	Lokasi	Nilai Perjanjian Sewa	Masa Berlaku Sewa	Catatan
1.	AMBON	Rp64.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 1 Maret 2019	-
2.	BALIKPAPAN	Rp35.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan 20 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Balikpapan
3.	BANDA ACEH	Rp22.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 Oktober 2018	-
4.	BANDAR LAMPUNG	Rp30.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 10 Januari 2020	-
5.	BANDUNG	Rp195.000.000	3 tahun terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 15 September 2019	-
6.	BANJARMASIN	Rp35.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 21 April 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan

No.	Lokasi	Nilai Perjanjian Sewa	Masa Berlaku Sewa	Catatan
				perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Banjarmasin
7.	JAKARTA BARAT (PROTOKOL)	Tidak ditentukan	2 tahun terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Jakarta Barat (Protokol)
8.	BATAM	Rp120.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 30 September 2018	-
9.	BEKASI	Rp150.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 22 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Bekasi
10.	BENGKULU	Rp30.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Bengkulu
11.	BOGOR	Rp100.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 23 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Bogor
12.	BONTANG	Rp10.200.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan 21 September 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Bontang
13.	CIANJUR/SUKABUMI	Rp30.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 9 Januari 2019	-
14.	CIKAMPEK	Rp23.500.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 2 Februari 2019	-
15.	CIKARANG	Rp140.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan 16 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam



No.	Lokasi	Nilai Perjanjian Sewa	Masa Berlaku Sewa	Catatan
				pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Cikarang
16.	CILEGON	Rp35.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 30 November 2018	-
17.	CIREBON	Rp45.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan 1 November 2017	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Cirebon
18.	DENPASAR	RP132.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 1 September 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Denpasar
19.	DEPOK	Rp60.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Depok
20.	GORONTALO	Tidak ditentukan	1 tahun terhitung sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan 6 Januari 2019	-
21.	HALIM	Rp68.731.200 per tahun	5 tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2021	-
22.	JAMBI	Rp38.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Jambi
23.	JAYAPURA	Rp75.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan 11 Mei 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Jayapura
24.	JEMBER	Rp22.500.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan 24 Juni 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan

No.	Lokasi	Nilai Perjanjian Sewa	Masa Berlaku Sewa	Catatan
				masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Jember
25.	KEDIRI	Rp40.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2019	-
26.	KENDARI	Rp25.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 1 Mei 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Kendari
27.	KUDUS	-	-	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Kudus
28.	KUPANG	Rp40.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 9 Januari 2019	-
29.	MADIUN	Rp25.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan 6 Maret 2019	-
30.	MAKASAR	Rp45.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan 17 April 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Makasar
31.	MALANG	Rp 132.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 1 September 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Malang
32.	MANADO	Rp110.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 15 Januari 2020	-
33.	MANOKWARI	-	-	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor

No.	Lokasi	Nilai Perjanjian Sewa	Masa Berlaku Sewa	Catatan
				Cabang Manokwari
34.	MEDAN	Rp. 100.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Medan
35.	MERAUKE	Tidak ditentukan	1 tahun terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Juli 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Merauke
36.	PADANG	Rp 90.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2018	-
37.	PALANGKARAYA	Rp 25.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan 10 Mei 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Palangkaraya
38.	PALEMBANG	Rp 80.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 1 November 2019	-
39.	PANGKAL PINANG	Rp 20.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan 8 April 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Pangkal Pinang
40.	PEKALONGAN	Rp 35.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Pekalongan
41.	PEKANBARU	Rp 35.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 19 Februari 2019	-
42.	PONTIANAK	Rp 65.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai	Sampai dengan tanggal Prospektus ini

No.	Lokasi	Nilai Perjanjian Sewa	Masa Berlaku Sewa	Catatan
			dengan 31 Juli 2018	diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Pontianak
43.	PURWOKERTO	Rp14.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019	-
44.	JAKARTA PUSAT	Rp 390.000.000	3 tahun terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 22 Agustus 2019	-
45.	SAMARINDA	Rp 35.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan 21 Februari 2019	-
46.	JAKARTA SELATAN I	-	-	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Jakarta Selatan I
47.	JAKARTA SELATAN II	Rp205.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 24 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Jakarta Selatan II
48.	SEMARANG	Rp 160.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Semarang
49.	SOLO (SURAKARTA)	Rp 45.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 1 Mei 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Solo (Surakarta)
50.	SORONG	Rp 30.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 1 Mei 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Sorong

No.	Lokasi	Nilai Perjanjian Sewa	Masa Berlaku Sewa	Catatan
51.	SURABAYA	Rp 270.000.000	3 tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan 20 Agustus 2019	-
52.	TANGERANG	Rp 80.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan 8 September 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Tangerang
53.	TANJUNG PINANG	-	-	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Tanjung Pinang
54.	TARAKAN	Rp 27.500.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Tarakan
55.	TASIKMALAYA	Rp 23.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Tasikmalaya
56.	TERNATE	Rp 38.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 17 Februari 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Ternate
57.	TIMUR	Rp 98.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 16 Agustus 2019	-
58.	YOGYAKARTA	Rp 155.000.000	2 tahun terhitung sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan 19 September 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Yogyakarta

Kantor Cabang Perwakilan

No.	Lokasi	Nilai Perjanjian Sewa	Masa Berlaku Sewa	Catatan
1.	PALOPO	Rp 21.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 1 September 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Perwakilan Palopo
2.	PASURUAN	-	-	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Perwakilan Pasuruan
3.	PEMATANG SIANTAR	Rp 13.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2018	-
4.	RANTAU PRAPAT	Rp 12.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2018	-
5.	SINGKAWANG	-	-	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Perwakilan Singkawang
6.	TEGAL	Rp 5.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2017	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Perwakilan Tegal
7.	BUKIT TINGGI	Rp24.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan 28 April 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Perwakilan Bukit Tinggi
8.	MOJOKERTO	Rp 25.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 10 Januari	-

No.	Lokasi	Nilai Perjanjian Sewa	Masa Berlaku Sewa	Catatan
			2019	
9.	PARE PARE	Rp 25.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 12 Juni 2018	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Perwakilan Pare Pare
10.	PAYAH KUMBUH	Rp 18.000.000	1 tahun terhitung sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan 18 September 2018	-
11.	SANGGAU/SOSOK	-	-	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Perwakilan Sanggau/Sosok
12.	TANJUNG PANDAN	-	-	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam pengurusan perjanjian sewa menyewa Kantor Cabang Perwakilan Tanjung Pandan

#### L. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengasuransikan sebagian besar aset yang disewanya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dimana Perseroan menjadi pihak tertanggung:

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1.	990118001067	PT Asuransi Adira Dinamika	Meliputi perlindungan atas i) bangunan, ii) inventory kantor dan iii) stock untuk kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang perwakilan Perseroan	<i>Property All Risk</i> (asuransi semua risiko properti)	<u><b>Rp42.500.000.000</b></u> atas bangunan  <u><b>Rp 18.750.000.000</b></u> atas <i>inventory</i> Kantor  <u><b>Rp 23.750.000.000</b></u> atas <i>stock</i>	22 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2019

Selanjutnya Perseroan sedang dalam tahapan untuk menyelesaikan perlindungan asuransi sehubungan dengan kendaraan operasional yang dimilikinya.

#### M. ASET TETAP

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap dalam bentuk tanah maupun bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan, kecuali bangunan semi-permanen yang dibangun di atas tanah dan bangunan yang disewa oleh Perseroan demi menunjang operasional Perseroan dengan masa pakai lebih dari satu tahun. Perseroan juga tidak memiliki harta kekayaan dalam bentuk mesin dan peralatan material, kecuali aset berbentuk inventoris kantor dan kendaraan penunjang kegiatan operasional. Dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga sehubungan dengan sewa bangunan kantor dan *consumer financing* sehubungan dengan kendaraan.

#### N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak pernah dan/ atau tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan pajak pada lembaga-lembaga Peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim lainnya dari pihak manapun, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di dalam maupun di luar lembaga Peradilan yang bersifat material ataupun berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

#### O. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, antara lain, sebagai berikut:

##### a. Utang lain-lain

Pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, akun ini merupakan utang lain-lain kepada Budiyanto Darmastono, masing-masing sebesar Rp7.871.735.250, Rp7.634.912.494, Rp4.906.683.784 dan Rp37.382.443.132. Utang ini merupakan pinjaman tanpa bunga dan jaminan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Persentase terhadap total liabilitas masing-masing sebesar 16,63%, 17,58%, 14,79% dan 92,85%.

##### b. Sewa

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan melakukan perjanjian sewa kantor di Jl. Sisingamangaraja No. 48, Medan dengan Budiyanto Darmastono. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, jumlah beban sewa masing-masing sebesar Rp25.000.000, Rp25.000.000, Rp100.000.000, Rp53.333.332 dan Rp 30.000.000. Persentase terhadap total beban langsung masing-masing sebesar 0,07%, 0,10%, 0,08%, 0,06% dan 0,06%.

Sehubungan dengan sewa tersebut di atas, saldo liabilitas yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, masing-masing sebesar Rp58.333.331 dan Rp33.333.332. Persentase terhadap total liabilitas masing-masing sebesar 0,12% dan 0,08%.

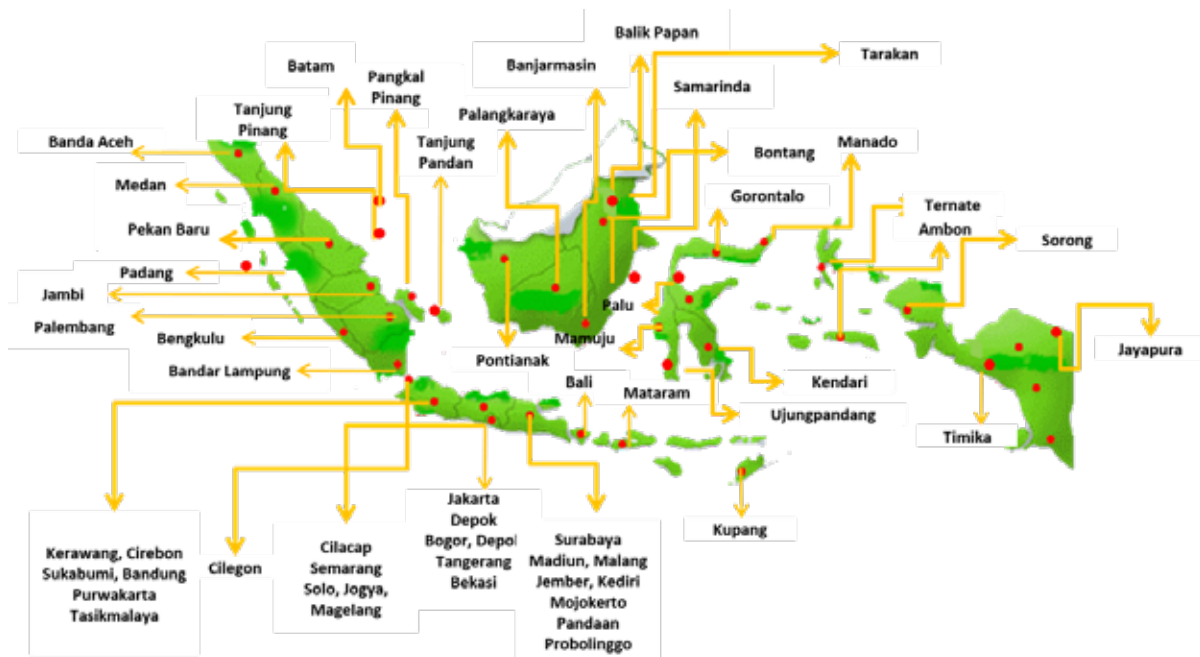
Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Saldo Akun dan Transaksi
Budiyanto Darmastono	Pemegang saham dan Direktur	Utang lain-lain, Liabilitas yang masih harus dibayar Sewa

#### P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

##### a. Kegiatan usaha Perseroan

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam jasa titipan, ekspedisi, pergudangan, jasa keagenan, dan pengangkutan. Perseroan dikelola oleh manajemen yang sudah berpengalaman dalam bidang kurir dan logistik selama lebih dari 30 tahun. Perseroan memiliki harga yang kompetitif diantara para pesaingnya yang bergerak di bidang yang sama, dengan jangkauan luas yang dapat menjangkau hingga pelosok daerah di seluruh Indonesia.










Hingga saat ini, Perseroan memiliki 58 kantor cabang dan 12 perwakilan cabang yang tersebar di seluruh provinsi dan beberapa kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

**b. Jasa dan produk yang ditawarkan**

Perseroan menawarkan jasa pengiriman, pengelolaan distribusi barang, dan pergudangan secara terintegrasi melalui 58 cabang, 12 sub-cabang, dan lebih dari 100 konter ritel. Perseroan menerima pengiriman domestik hingga internasional, melalui kerjasama dengan kurir internasional.

Berikut ini adalah kategori jasa dan produk yang ditawarkan oleh Perseroan:

No	Nama Produk	Keterangan	Target Pengguna
1.	 Kurir Dalam Kota dan Domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melayani pengiriman dokumen hingga paket dalam volume besar</li> <li>Jangkauan hingga ke semua kecamatan di Indonesia</li> <li>Memiliki berbagai pilihan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan</li> <li>Memiliki garansi layanan dan kecepatan</li> <li>Didukung oleh ribuan kurir yang tersebar hingga pelosok Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritel</li> <li>Korporasi</li> <li>Kantor Pemerintahan</li> <li>Ecommerce</li> </ul>
2.	 Pengiriman Internasional Ekspres dan Kargo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melayani kiriman dokumen hingga paket dalam volume besar</li> <li>Jangkauan hingga ke berbagai tujuan di luar negeri</li> <li>Memiliki garansi layanan dan kecepatan</li> <li>Bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi global terbaik di dunia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritel</li> <li>Korporasi</li> <li>Kantor Pemerintahan</li> <li>Ecommerce</li> </ul>
3.	 Warehouse Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menawarkan tenaga pengelolaan gudang yang terlatih</li> <li>Menawarkan efisiensi dalam pengelolaan barang kiriman dan barang masuk, karena pelanggan tidak perlu menyediakan tempat yang luas untuk barang-barangnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korporasi</li> <li>Kantor Pemerintahan</li> <li>Rumah sakit</li> <li>Apotek</li> <li>Distributor</li> <li>Pabrik</li> <li>Ecommerce</li> </ul>

No	Nama Produk	Keterangan	Target Pengguna
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menawarkan asuransi dan keamanan 24 jam, sehingga barang milik pelanggan terlindungi dari pencurian dan kerugian akibat kecelakaan</li> <li>Lokasi pusat pergudangan yang terletak di Halim Perdanakusuma merupakan lokasi yang strategis dan dekat dengan bandara</li> </ul>	
4.	 <p>Layanan Pengelolaan Mailroom</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menawarkan efisiensi waktu dan biaya bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan <i>mailroom</i></li> <li>Dapat melayani kiriman masuk maupun kiriman keluar dari lokasi pelanggan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korporasi</li> <li>Kantor Pemerintahan</li> </ul>
5.	 <p>Transportasi Darat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menawarkan efisiensi biaya pengiriman dalam jumlah besar</li> <li>Dapat berbagi biaya pengiriman dengan pengguna lain dengan tujuan yang sama</li> <li>Menawarkan waktu pengiriman yang relatif lebih singkat karena menggunakan kendaraan yang didedikasikan khusus</li> <li>Menjangkau hingga ke lokasi yang diinginkan pelanggan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korporasi</li> <li>Distributor</li> <li>Pabrik</li> <li>Ecommerce</li> </ul>
6.	 <p>Kargo Laut dan Udara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menawarkan kemudahan dalam pengiriman barang melalui SDM terlatih dan berpengalaman dalam <i>cargo handling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korporasi</li> <li>Distributor</li> <li>Pabrik</li> </ul>
7.	 <p>Cash On Delivery</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan layanan pembayaran tunai saat paket diterima di tempat</li> <li>Memudahkan transaksi untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan finansial digital</li> <li>Memudahkan penjual melalui layanan <i>Seller Pickup</i>, dimana kurir langsung mengambil barang pesanan ke tempat penjual</li> <li>Memudahkan pembeli dalam hal <i>Buyer Pickup</i>, dimana kurir menjemput barang yang dikembalikan oleh pembeli ke tempat kediaman pembeli dalam proses <i>refund</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecommerce</li> </ul>
8.	 <p>Kurir Terdedikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menawarkan layanan kurir yang ditempatkan khusus di domisili pelanggan untuk bertanggung jawab dalam hal pengiriman dan pengambilan barang</li> <li>Skema yang ditawarkan melalui <i>outsourcing</i>, dimana Pengguna jasa tidak dibebankan dengan tambahan kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korporasi</li> <li>Pabrik</li> <li>Kantor Pemerintahan</li> </ul>

Selain layanan-layanan tersebut di atas, Perseroan juga menawarkan berbagai pilihan pengiriman untuk segmen ritel, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Produk	Keterangan	Target Pengguna
1.	 Same Day Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen/paket dapat diterima pada hari yang sama</li> <li>Mendapatkan prioritas penanganan</li> <li>Pengiriman menggunakan jalur udara</li> <li>Hanya dapat ditangani jika paket diterima sebelum pukul 13.00 siang</li> <li>Tersedia untuk pengiriman dari-dan-ke ibukota provinsi di seluruh Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korporasi</li> <li>Kantor pemerintahan</li> <li>Ecommerce</li> </ul>
2.	 One Day Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen/paket dapat diterima dalam satu hari kerja</li> <li>Mendapatkan prioritas penanganan</li> <li>Pengiriman menggunakan jalur udara</li> <li>Dapat ditangani kapanpun tanpa batas waktu penerimaan</li> <li>Tersedia untuk pengiriman dari-dan-ke kota utama di seluruh Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korporasi</li> <li>Kantor pemerintahan</li> <li>Ecommerce</li> </ul>
3.	 Reguler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen/paket membutuhkan waktu yang lebih untuk tiba, antara 1-2 hari untuk dalam kota, 2-5 hari untuk area kabupaten, dan 2-7 hari untuk daerah terpencil</li> <li>Dapat ditangani kapanpun tanpa batas waktu penerimaan</li> <li>Tersedia hingga ke daerah terpencil di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korporasi</li> <li>Kantor pemerintahan</li> <li>Ecommerce</li> <li>Kargo</li> </ul>

### c. Fasilitas

Perseroan memiliki berbagai fasilitas dalam menunjang operasional sehari-hari, seperti mobil, motor, untuk mengirim paket hingga ke tujuan, gudang untuk menyimpan barang dan mendistribusikannya dalam jumlah besar, dan server serta *data center* untuk menunjang efisiensi operasional Perseroan.

#### Armada kendaraan operasional

Perseroan mengandalkan armada mobil dalam mengantarkan kiriman dalam jumlah besar antar titik distribusi utama. Untuk pengantaran hingga ke *last mile*, Perseroan menggunakan armada kurir yang mengendarai sepeda motor. Perseroan menggunakan sistem sewa dan pembiayaan konsumen dalam pengadaan mobilnya, sehingga mampu mengefisienkan beban perawatan dan penggantian suku cadang rutin.

Perseroan memiliki ribuan armada motor yang siap untuk mengantarkan paket kiriman hingga ke titik pengantaran terakhir dan daerah paling pelosok. Pada saat rekrutmen kurir, Perseroan mewajibkan calon pegawai kurir untuk memiliki motor pribadi dan SIM C, sehingga Perseroan tidak perlu untuk membeli dan merawat motor untuk operasional. Selain itu, kepemilikan pribadi armada motor juga menjamin perawatan dan kelayakan armada untuk operasional pengiriman. Kurir Perseroan mendapatkan manfaat tambahan jika memiliki motor sendiri, yaitu komponen kompensasi operasional motor pada gaji bulannya.



**Mobil Blind Van Perseroan**



**Mobil Box Perseroan**



**Armada Sepeda Motor**

Berikut ini adalah detail jumlah armada mobil Perseroan, jumlah kurir, dan jumlah serta volume kiriman Perseroan:

Tahun	2015	2016	2017	Januari-Maret 2018
<b>Jumlah Armada</b>				
Blind Van	7	54	105	112
CDD, CDE & Carry Box	2	16	33	67
MPV	13	32	62	67
<b>Total Armada</b>	<b>22</b>	<b>102</b>	<b>200</b>	<b>246</b>
<b>Jumlah Kurir</b>	<b>271</b>	<b>459</b>	<b>994</b>	<b>1.335</b>
<b>Volume Kiriman (kg)</b>	<b>3.127.472</b>	<b>12.282.410</b>	<b>20.643.650</b>	<b>6.412.926</b>
<b>Jumlah Kiriman (koli)</b>	<b>2.411.481</b>	<b>8.758.231</b>	<b>14.226.653</b>	<b>4.219.694</b>

Pusat Pergudangan, Cabang, dan Konter Ritel

Perseroan memiliki pusat pergudangan yang berlokasi di kawasan Halim Perdanakusuma. Lokasi tersebut bersebelahan dengan bandara tersibuk ke dua di Jakarta, yang cocok digunakan untuk pusat distribusi kiriman. Selain itu, Perseroan memiliki cabang dan konter ritel yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.



Server dan data center

Perseroan bergantung pada keandalan sistem *server* dan *data center* yang dimilikinya. Saat ini Perseroan mengoperasikan sebanyak dua buah *server* yang terletak di Jakarta. Selain itu, Perseroan telah memiliki teknologi *data center* dengan dukungan *cloud service* yang mampu menghindarkan Perseroan dari kerugian terkait dengan kerusakan dan kehilangan data akibat *human error* maupun bencana alam. Saat ini server dan data center Perseroan mampu memproses antara 2,5 juta hingga 5 juta transaksi setiap bulannya. *Data Center* Perseroan dikelola dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam pengelolaan *data center* dan *cloud service*.

**d. Keunggulan kompetitif**

Kurir berbasis Android pertama di Indonesia



**2014:** Memulai bisnis dengan kemampuan status pengiriman online untuk setiap kurir.



**2015-2016:** Meningkatkan sistem IT dengan menambahkan lokasi tepat ke tujuan pengiriman



**2017:** Menambahkan fitur pick up Online untuk memanggil kurir dan menyediakan akses API ke pelanggan.



**2018:** Menambah pelayanan "Pick up dari Penjual" dan kemampuan "Pengembalian ke Pembeli" untuk meningkatkan kualitas layanan.

Perseroan merupakan perusahaan kurir pertama yang membekali armada kurirnya dengan *smartphone* berbasis Android, dimana melalui *smartphone* tersebut, kurir bisa melakukan *update* status pengiriman secara online dan *realtime*. Hal tersebut merupakan terobosan baru pada masanya, dimana perusahaan sejenis hanya dapat melayani *tracking* secara tidak langsung melalui pelacakan nomor resi. Dengan dibekali *smartphone* Android tersebut, pengguna dapat dengan mudah melacak kirimannya melalui sistem yang disediakan untuk pelanggan melalui platform CoreSYS. Selain itu, integrasi sistem melalui API juga memungkinkan pelanggan mendapatkan konfirmasi pengiriman langsung di *platform* masing-masing tanpa harus melakukan update manual di sistem Perseroan.

### Sistem Online & Tracking Realtime yang Terintegrasi

#### Integrasi canggih antara SAP dengan pelanggan



Perseroan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi pengiriman *realtime* dan terintegrasi sebagai hasil dari penggunaan aplikasi di *smartphone* yang dibekali pada masing-masing kurir. Hal ini memberikan keunggulan bagi Perseroan yang belum dimiliki oleh perusahaan lain.

### Penetrasi yang kuat pada segmen ecommerce

- Portofolio pelanggan ecommerce yang besar dan beragam  
Saat ini pelanggan dari segmen ecommerce berkontribusi lebih dari 11% dari total pendapatan, dimana hingga saat ini ecommerce adalah salah satu segmen pelanggan dengan pertumbuhan kontribusi pendapatan paling cepat. Hingga saat ini, Perseroan melayani sebagian besar pelanggan ecommerce besar di Indonesia.
- Sistem dan model pergudangan yang cocok untuk ecommerce  
Perseroan menawarkan layanan terintegrasi secara penuh kepada pelanggan ecommerce, mulai dari pengelolaan pergudangan & penanganan persediaan, penjemputan penjual dan pembeli, *refund*, dan integrasi API. Ini adalah faktor penentu untuk SAP untuk memenangkan dan mempertahankan pangsa pasar untuk segmen ecommerce.
- Pembayaran COD untuk memfasilitasi pelanggan yang tidak memiliki akses perbankan  
Indonesia adalah salah satu negara terendah dalam hal penetrasi perbankan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Dengan hanya 36% dari warganya yang memiliki akses ke bank, pembayaran COD telah menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan, meningkatkan omset untuk ecommerce sambil mempertahankan kepercayaan pelanggan untuk membeli barang secara online. Perseroan dikenal baik dalam industri pengiriman karena jangkauan luas pelayanan COD-nya yang dapat diandalkan.

### Manajemen yang solid

Walaupun Perseroan baru berdiri kurang dari 5 tahun, manajemen Perseroan telah memiliki pengalaman di industri pengiriman dan logistik selama lebih dari 30 tahun. Budiyanto Darmastono sebagai pendiri sekaligus Presiden Direktur Perseroan, dibantu oleh Untung Santoso sebagai Direktur, memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman yang intensif di bidang logistik dan kurir.

#### e. Prospek usaha Perseroan

##### Meningkatnya volume dan frekuensi online shopping di Indonesia yang memacu penjualan Perseroan

Peningkatan volume dan frekuensi online shopping di Indonesia, yang didukung oleh keterjangkauan internet hingga ke pelosok dan kecepatan koneksi yang dapat diandalkan, memicu pertumbuhan industri pengiriman di Indonesia. Online shopping dapat menjadi solusi yang baik bagi pembeli maupun penjual. Pembeli tidak harus repot keluar rumah atau harus keluar kota untuk membeli barang tertentu, karena semua sudah tersedia dan dapat dibeli di internet. Bagi penjual, mereka tidak perlu repot membayar biaya sewa pembukaan cabang dan menanggung biaya transportasi barang yang tidak efisien. Dengan demikian, kehadiran perusahaan kurir seperti Perseroan sangat dibutuhkan oleh industri perdagangan pada saat ini dan beberapa tahun yang akan datang.

##### Perbaikan infrastruktur yang memungkinkan efisiensi biaya transportasi

Indonesia saat ini sedang gencar dalam menggalakkan pembangunan infrastruktur yang terpusat di luar pulau Jawa. Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur tersebut adalah untuk mengurangi biaya distribusi darat yang umumnya sebesar 30% dari harga jual barang. Sebagai contoh, Perseroan akan diuntungkan dengan pembangunan tol trans-jawa dan trans-sumatera karena dapat mengurangi beban *cargo handling* jika melalui udara.

##### Semakin terbukanya perdagangan ritel online internasional dari luar negeri via online

Industri kurir dan jasa pengiriman di Indonesia merupakan industri yang terlindungi dari investasi asing, sehingga perusahaan jasa kurir asing tidak dapat mendistribusikan pengiriman secara langsung ke tujuan akhir. Perseroan dapat diuntungkan dengan kerjasama pengiriman barang dari luar negeri untuk diantarkan ke tujuan akhir di dalam negeri, sehingga Perseroan mendapat manfaat *fee sharing* dari perusahaan ekspedisi luar negeri. Selain itu, perdagangan ekspor ke luar negeri juga memberikan manfaat bagi Perseroan, karena Perseroan pada saat ini menjalin kerjasama pengiriman internasional dengan perusahaan ekspedisi luar negeri.

#### f. Strategi Bisnis Perseroan

##### Memperkaya portfolio klien dari berbagai bidang industri

Perseroan menargetkan peningkatan signifikan dari pendapatan yang dikontribusikan oleh industri ecommerce, dimana industri ecommerce di Indonesia dan dunia saat ini sedang bertumbuh dengan cepat dan mungkin akan memiliki pengaruh lebih besar terhadap perekonomian nasional. Perkembangan ecommerce tersebut harus ditopang oleh pelayanan pengiriman barang yang dapat diandalkan dan dapat tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan industri ecommerce itu sendiri. Demi mewujudkan target tersebut, Perseroan menggunakan strategi penawaran harga yang kompetitif, sistem IT yang lebih baik, layanan pengiriman yang dapat diandalkan, serta dengan keterjangkauan yang luas.

Khusus untuk pelayan kepada pelanggan retail, Perseroan mengedepankan konsep pembukaan konter retail, dimana konter retail memungkinkan Perseroan untuk menjangkau pelanggan retail yang tersebar di pusat-pusat pemukiman. Adapun konsep konter retail dibuka dengan skema franchise dan terbuka bagi siapapun yang akan menjadi mitra Perseroan, dengan skema bagi hasil yang sama-sama menguntungkan bagi Perseroan maupun pemilik bisnis. Hal tersebut memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan jumlah cabang, titik pelayanan dan pangsa pasar tanpa harus mengeluarkan belanja modal yang signifikan.



Contoh konter retail SAP yang dijalankan dengan mitra bisnis

#### Memperluas dan memperbanyak fasilitas operasional

Sebagai perusahaan kurir yang selalu berupaya untuk menyediakan layanan terbaik, Perseroan membutuhkan beberapa fasilitas pendukung dalam operasional pengirimannya, seperti pergudangan, pusat distribusi, dan armada pengiriman. Perseroan bergantung pada ketersediaan fasilitas gudang untuk menjamin ketepatan waktu pengiriman dan jumlah pesanan yang dapat dilayani dalam waktu bersamaan. Saat ini, beberapa cabang Perseroan yang berlokasi di kota-kota besar telah memiliki kemampuan untuk menyimpan barang yang akan atau belum di kirim, namun dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, Perseroan juga saat ini memiliki pusat pergudangan di daerah Halim Perdanakusuma, dimana fasilitas tersebut saat ini mampu melayani transit barang dari maupun ke Jakarta. Perseroan menargetkan untuk dapat memperluas kapasitas gudang utama dan gudang-gudang yang tersebar di cabang, sehingga arus pengiriman barang dapat lebih terkendali dan lancar. Selain itu, Perseroan juga menargetkan pertumbuhan jumlah cabang-cabangnya, sehingga memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasarnya di industri kurir.

#### Mempromosikan sistem kemitraan dengan pihak ketiga dan memperkuat sistem IT

Perseroan menawarkan sistem kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki niat dan kompetensi untuk dapat menjadi mitra Perseroan melalui investasi di konter retail, dimana konter retail tersebut memungkinkan mitra usaha untuk menjadikan tempat usahanya sebagai gerai penerimaan pengiriman barang. Melalui skema ini, mitra bisnis mendapatkan manfaat kompensasi atas penjualan di konter retail tersebut, pemanfaatan fasilitas ruang usaha, dan pengelolaan profesional terhadap investasinya. Pada akhirnya, Perseroan menargetkan untuk dapat memenangkan pangsa pasar yang lebih besar sehubungan dengan pembukaan gerai yang pada dasarnya tidak membutuhkan investasi yang terlalu banyak bagi Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki rencana untuk merambah aplikasi dengan sistem operasi iOS agar dapat membuka akses kepada pengguna iOS di Indonesia sekaligus menjamin penerimaan publik terhadap jasa yang ditawarkan Perseroan. Sebagai upaya untuk mendukung operasional pergudangan, Perseroan juga memiliki rencana untuk mengadopsi *advanced warehouse management system*, dimana pengguna jasa pergudangan bisa langsung mengetahui keadaan barangnya di gudang yang disewa melalui Perseroan. Hal-hal tersebut diatas merupakan kunci pertumbuhan Perseroan agar dapat terus memberikan nilai tambah bagi *shareholders* dan *stakeholders*.

### **Q. TEKNOLOGI INFORMASI**

Teknologi informasi merupakan salah satu bidang mendapatkan perhatian lebih oleh Perseroan, karena Perseroan mengandalkan teknologi informasi dalam menyediakan feedback informasi mengenai kiriman pelanggan dan dalam menyediakan platform untuk mendapatkan order. Beberapa teknologi informasi yang telah diterapkan oleh Perseroan antara lain:

- Sistem pelaporan kiriman instan bagi kurir menggunakan CORESYS (*Courier Response Express System*) yang dikembangkan secara *native* di *platform* Android
- Sistem untuk penanganan keluhan pelanggan oleh *customer service* menggunakan CORESYS
- Sistem pengembangan aplikasi pelanggan secara *native* di *platform* Android
- Implementasi sistem API untuk pengecekan harga pada aplikasi pihak ketiga
- Kemampuan pelanggan individu maupun institusi dalam menggunakan website untuk melakukan request pickup, cek harga pengiriman, cek status pengiriman, mengatur saldo kredit, dan mengimpor data pengiriman
- Implementasi sistem *fingerprint* dan *faceID* dalam untuk absensi yang langsung dapat terintegrasi dengan sistem *payroll*
- E-SPT untuk pelaporan dan perhitungan pajak perusahaan dan pajak karyawan

Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan sistem teknologi yang lebih canggih dan efisien di masa yang akan datang, terutama untuk menunjang kegiatan pengiriman.

### **R. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mendaftarkan merek jasa “SAP Express Courier” pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Permintaan Pendaftaran Merek No. J002016050272 tertanggal 19 Oktober 2016 dan sampai saat ini merek jasa tersebut sedang dalam proses pendaftaran pada direktorat terkait.

**TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen di masa yang akan datang sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Profitabilitas tahun berjalan;
2. Kewajiban penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;
3. Saldo laba ditahan; dan
4. Kebutuhan belanja modal dan modal kerja Perseroan.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas hanya dapat dilakukan jika Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen, dimana Perseroan diwajibkan untuk mengalokasikan dana cadangan sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, Perseroan mencatatkan akumulasi defisit, sehingga pembagian dividen akan dilakukan secepat-cepatnya pada tahun buku 2018, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan belum memiliki riwayat pembayaran dividen yang dilakukan selama 3 tahun terakhir.



## VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 104 tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 102 tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 26 tanggal 7 Agustus 2018, sebagaimana diubah dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 34 tanggal 12 September 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikat diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan		
		Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
<b>PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK</b>				
1.	PT RHB Sekuritas Indonesia	432,893,300	108,223,325,000	99,90
<b>Sub Total</b>		<b>432,893,300</b>	<b>108,223,325,000</b>	<b>99,90</b>
<b>PENJAMIN EMISI EFEK</b>				
1.	PT Artha Sekuritas Indonesia	200.000	50.000.000	0,05
2.	PT KGI Sekuritas Indonesia	80.000	20.000.000	0,02
3.	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	80.000	20.000.000	0,02
4.	PT Onix Sekuritas	80.000	20.000.000	0,02
<b>Sub Total</b>		<b>440.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>433.333.300</b>	<b>108,333,325,000</b>	<b>100,00</b>

PT RHB Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta PT Artha Sekuritas Indonesia, PT KGI Sekuritas Indonesia, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, dan PT Onix Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## II. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 31 Agustus - 10 September 2018 pada kisaran harga Rp220 (dua ratus dua puluh Rupiah) hingga Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp260 (dua ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Proyeksi kinerja keuangan Perseroan setelah Penawaran Umum ini;
- Permintaan dari calon Investor yang berkualitas;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pengiriman di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen serta kualitas pengelolaan Perseroan, baik pada masa lalu maupun prospek di masa yang akan datang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

## IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### 1. AKUNTAN PUBLIK

**Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*)**

Cyber 2 Tower 20th Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5  
Jakarta 12950  
Indonesia

STTD	:	Nomor STTD.AP-27/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Suhartanto
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI Nomor 1802 atas nama Suhartanto
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	070/SK-DIR/V/2018 tanggal 15 Mei 2018

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### 2. KONSULTAN HUKUM

**Hiswara Bunjamin & Tandjung**

23rd Floor, Gedung BRI II  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210, Indonesia

STTD	:	Nomor STTD.KH-163/PM.2/2018 atas nama Tjahjadi Bunjamin, S.H., LL.M. Tanggal STTD: 8 Juni 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200506
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.
Surat Penunjukan	:	072/SK-DIR/V/2018 tanggal 15 Mei 2018

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

### 3. NOTARIS

**Yulia, S.H.**

Multivision Tower Lantai 3 Suite 05  
Jl. Kuningan Mulia Kav.9B  
Jakarta 15412

STTD : STTD.N-1/PM.22/2018  
Tanggal STT : 07 Februari 2018  
Keanggotaan Asosiasi : 0039719720806  
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
  
Surat Penunjukan : 073/SK-DIR/V/2018 tanggal 15 Mei 2018

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

**PT Raya Saham Registra**

Gedung Plaza Sentral Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48  
Jakarta 12930

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor No. ABI/IV/2011-004 tertanggal 6 April 2011  
Pedoman Kerja : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep- 79/PM/1991 tertanggal 18 September 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Raya Saham Registra  
  
Surat Penunjukan : No. 032/CORSEC-SAP/V/2018 Tanggal 19 Mei 2018

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Masing-masing Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal telah memenuhi kewajiban pungutan OJK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perseroan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

### **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

### **3. JUMLAH PESANAN**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Saham-saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
  - 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
  - 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
  - 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

- 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## **5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berhak menolak untuk memberikan FPPS kepada Masyarakat setelah pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan pemesanan.

## **6. MASA PENAWARAN UMUM**

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 27 September 2018. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

## **7. TANGGAL PENJATAHAN**

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 1 Oktober 2018.

## **8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**PT Bank UOB Indonesia Cabang Plaza UOB**  
**Nomor Rekening: 327-305-422-5**  
**Atas Nama: RHBSI - IPO SAP**

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/giro sudah harus “*in good fund*” pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk nasabah ritel dan nasabah institusi, kecuali untuk nasabah institusi internasional yang menerima penjatahan pasti.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

## 9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT RHB Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk juga jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu:
  - 1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - 2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

## **B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa saham dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan-satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham tersebut akan tercatat.
  - 2) Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

## **11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :
  - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
  - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
    - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.



- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

## **12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (hari) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing – masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan,

dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan. Untuk menghindari keragu – ragan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesanan retail yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (*pooling*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

### **13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM**

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

### **14. LAIN-LAIN**

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

## **XI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT RHB Sekuritas Indonesia**

Wisma Mulia, Lantai 20  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42  
Jakarta 12710  
Telepon: (021) 2783 0888  
Faksimili: (021) 2783 0777  
Website: [www.rhbtradesmart.co.id](http://www.rhbtradesmart.co.id)

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT Artha Sekuritas Indonesia**

Equity Tower Lantai 22 E-F  
Sudirman Central Business District Lot 9  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12910  
Telp. (021) 515 2338  
Faks. (021) 515 2338

#### **PT KGI Sekuritas Indonesia**

Sona Topas Tower Lantai 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920  
Telepon: (021) 250 6337  
Faksimili: (021) 250 6351

#### **PT NH Korindo Sekuritas Indonesia**

Wisma Korindo Lantai 7  
Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran  
Jakarta 12780  
Telp. (021) 797 6202  
Faks. (021) 797 6206

#### **PT Onix Sekuritas**

Deutsche Bank Building #15-04  
Jl. Imam Bonjol No.80  
Jakarta 10350  
Telp. (021) 3190 1777  
Faks. (021) 3190 1616

### **GERAI PENAWARAN UMUM**

Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan FPPS dapat diperoleh di Gerai Penawaran Umum yang bertempat di kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 pada tanggal dan jam yang ditentukan selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

25 September 2018

No. Ref.: 46/09/18

Kepada: **PT Satria Antaran Prima Tbk**  
Kalibata Office Park, Blok G  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G  
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran  
Jakarta Selatan  
U.p.: Direksi

Dengan hormat,

**Pendapat Dari Segi Hukum  
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana  
PT Satria Antaran Prima Tbk ("Perseroan")**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bertandatangan di bawah ini, **Tjahjadi Bunjamin, S.H. LL.M.**, Rekan pada kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 03.10250 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH-163/PM.2/2018 tanggal 8 Juni 2018 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan Nomor 200506, telah ditunjuk oleh Perseroan selaku konsultan hukum independen berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 072/SK-DIR/V/2018 tanggal 15 Mei 2018, untuk melakukan uji tuntas ("Uji Tuntas") terhadap Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal ("**Pendapat dari Segi Hukum**") berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana**") sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Perseroan, melalui Penawaran Umum Perdana, berencana untuk menerbitkan sebanyak 433.333.300 saham baru dari total saham yang ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp100 ("**Saham Yang Ditawarkan**") dan dengan harga penawaran yang ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp250, dimana 0,74% dari Saham Yang Ditawarkan tersebut akan ditawarkan kepada karyawan Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation* ("**Program ESA**"), yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT RHB Sekuritas Indonesia ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"), PT Artha Sekuritas Indonesia ("**Artha**"), PT KGI Sekuritas Indonesia ("**KGI**"), PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia ("**Korindo**"), dan PT Onix Sekuritas ("**Onix**") (secara bersama-sama Artha, KGI, Korindo dan Onix disebut sebagai "**Para Penjamin Emisi Efek**"). Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana yang disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana telah dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") melalui Surat Keputusan

Menkumham No. AHU-0012650.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018, sebagaimana dibuktikan dengan Perenerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214433 tanggal 8 Juni 2018 dan Perenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214434 tanggal 8 Juni 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0080101.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018 ("**Akta 32/2018**").

Dana hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan biaya emisi efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana, akan digunakan oleh Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

1. sekitar 62,03% (enam puluh dua koma nol tiga persen) akan digunakan untuk pelunasan seluruh utang kepada GD Express Carrier Bhd ("**GDEX**") berdasarkan Perjanjian Obligasi Yang Dapat Dikonversi tertanggal 24 November 2016 ("**Perjanjian Obligasi Konversi**") yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 November 2021, dengan nilai nominal sebesar Rp30.000.000.000 dan telah memperoleh persetujuan pelunasan dari GDEX sebagai pemegang obligasi konversi berkaitan dengan pelunasan dipercepat. Sehubungan dengan percepatan pelunasan atas obligasi konversi tersebut, Perseroan akan membayarkan premi penebusan sesuai dengan surat GDEX kepada Perseroan tertanggal 29 Juni 2018. Total pembayaran yang akan dilakukan adalah sekitar Rp67.200.000.000, terdiri dari Rp30.000.000.000 nilai nominal obligasi konversi dan Rp37.200.000.000 premi penebusan; dan
2. sekitar 37,97% (tiga puluh tujuh koma sembilan tujuh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta laporan pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan, serta pernyataan atau keterangan lisan dan/atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan Perseroan (sebagaimana relevan), yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah ("**POJK 53/2017**").

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami sebelumnya No. Ref.:22/09/18 tanggal 13 September 2018.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian akhir dari Pendapat dari Segi Hukum kami, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

## 1. **PERSEROAN**

- 1.1. Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum di Indonesia dengan nama PT Satria Antaran Prima, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Bambang Sularso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-21298.40.10.2014 tanggal 20 Agustus 2014 dan terdaftar pada Daftar Perseroan pada Nomor AHU-0077725.40.80.2014 tanggal 20 Agustus 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").



Akta Pendirian Perseroan untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar Perseroan. Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta 32/2018 ("**Anggaran Dasar Perseroan**"). Berdasarkan Akta 32/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal diantaranya sebagai berikut:

1. Persetujuan pemegang saham atas rencana Penawaran Umum Perdana melalui pasar modal dengan pengeluaran saham baru dalam simpanan (portepel) Perseroan dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana termasuk pelaksanaan Program ESA dengan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan;
2. Perubahan status Perseroan yang semula perseroan terbatas tertutup/ non publik menjadi perseroan terbatas terbuka/ publik;
3. Perubahan nama Perseroan yang sebelumnya PT Satria Antaran Prima menjadi PT Satria Antaran Prima Tbk;
4. Menyetujui pelaksanaan pencatatan saham Perseroan (*company listing*) yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No: KEP- 179/BL/2008 tentang Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 32/2014**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**") dan juga memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU 40/2007**"), termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan uraian pada kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Berdasarkan UU 40/2007, perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana disetujui Akta 32/2018 tersebut di atas berlaku sejak dilaksanakan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 32/2018 telah memenuhi ketentuan (i) UU 40/2007, (ii) Peraturan IX.J.1; (iii) POJK 32/2014; dan (iv) POJK 33/2014 serta telah dilakukan secara sah dan memperoleh persetujuan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta 32/2018, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa titipan, ekspedisi dan pergudangan, transportasi, percetakan, keagenan, *outsourcing* dan transaksi keuangan dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Kegiatan usaha utama:**

a. Menjalankan usaha dalam jasa titipan:

- Menjalankan kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan dan penyampaian informasi berupa surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, dokumen dan/atau sekogram;
- Menjalankan kegiatan layanan pengambilan, penerimaan dan atau pengantaran barang;
- Menjalankan kegiatan perencanaan, penanganan dan pengendalian terhadap pengiriman dan pengiriman barang, termasuk informasi, jasa pengurusan dan administrasi terkait;
- Menjalankan kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindah-bukuan, pendistribusian dan pembayaran uang dari atau untuk penggunaan jasa.

b. Menjalankan usaha dalam ekspedisi dan pergudangan;

- Menjalankan kegiatan ekspedisi pengiriman barang kargo dan *warehousing*.

c. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi dan pengangkutan:

- Menjalankan kegiatan pengambilan, pengiriman dan/atau pemrosesan barang-barang lewat moda transportasi darat, udara dan laut serta kegiatan lainnya;

d. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan:

- Menjalankan kegiatan percetakan dokumen dan/atau percetakan umum lainnya.

e. Menjalankan usaha dalam bidang keagenan:

- Menjalankan kegiatan yang bertindak sebagai distributor, agen dan menempatkan perwakilan-perwakilan baik badan-badan perusahaan lain atau perorangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

f. Menjalankan usaha dalam bidang *outsourcing*:

- Menjalankan usaha dibidang jasa keamanan (*security*), jasa *recruiting* dan penyaluran tenaga kerja, jasa pelatihan dan keterampilan kerja.

g. Menjalankan usaha dalam bidang transaksi keuangan:

- Menjalankan kegiatan layanan berupa uang, giro dan wesel melalui kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian dan pembayaran dari dan/atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Kegiatan usaha penunjang**, menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas.

- 1.3. Sebagaimana tercantum dalam Akta 32/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat sebelum Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>160.000.000.000</b>	
1. Budiyanto Darmastono	398.000.000	39.800.000.000	99,5
2. Yuwono Darmastoto	2.000.000	200.000.000	0,5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	-

Setiap perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang.

- 1.4. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 32/2018 yaitu sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Budiyanto Darmastono  
 Direktur : Untung Santoso  
 Direktur Independen : Alfried Taftazani

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Nancy Christanti  
 Komisaris Independen : Prilli Budi Pasravita Soetantyo

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas dengan telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak yang berwenang.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum di atas juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam POJK 33/2014 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan I-A**") termasuk pemenuhan Direktur Independen dan Komisaris Independen.

Sehubungan dengan perubahan riwayat permodalan, pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris serta anggaran dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU 3/1982**"), perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Selanjutnya dengan berlakunya UU 40/2007, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan yang dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain

tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UU 40/2007.

Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 UU 40/2007, Daftar Perseroan yang diselenggarakan Menkumham tidak dapat dikaitkan dengan pendaftaran perusahaan yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Berdasarkan UU 3/1982 kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal Rp 3.000.000.

- 1.5. Dalam rangka peningkatan *good corporate governance* sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit ("POJK 55/2015"), Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 122/SK-DIR/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, yang terdiri dari:

1. Ketua : Prilli Budi Pasravita Soetantyo
2. Anggota : Didi Achjari
3. Anggota : Hirdjan Syafi'i

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 124/SK-DIR/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Piagam Komite Audit Perseroan.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi ketentuan pembentukan Komite Audit sebagaimana ditentukan dalam POJK 55/2015.

- 1.6. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal ("POJK 56/2015"); dengan mengangkat Arie Akbar sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 123/SK-DIR/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan turut menandatangani Surat Keputusan Direksi Perseroan tersebut.

Unit Audit Internal Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan POJK 56/2015 yang disahkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No.125/SK-DIR/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.

- 1.7. Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Denny Parhan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan 074/SK-DIR/VI/2018 tanggal 15 Mei 2018.

Dengan telah ditunjuk dan diangkatnya Denny Parhan sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan tersebut, maka Perseroan juga telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan I-A.

- 1.8. Dalam rangka peningkatan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014"), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 128/SK-DIR/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu:

1. Ketua : Prilli Budi Pasravita Soetantyo
2. Anggota : Nancy Christanti
3. Anggota : Febby Anita Malik

Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi yang mana pembentukannya telah

sesuai dengan POJK 34/2014 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.126/SK-DIR/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ditentukan dalam POJK 34/2014.

- 1.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang masih berlaku dan melakukan kewajiban pelaporan yang penting dan material untuk menjalankan kegiatan usaha atas kantor pusat Perseroan, sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yakni (i) surat izin usaha perdagangan ("SIUP") dan (ii) izin penyelenggaraan pos.
- 1.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 58 kantor cabang dan 12 kantor cabang perwakilan yang berlokasi di berbagai wilayah di Indonesia. Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan penting sehubungan dengan kantor cabang dan kantor cabang perwakilan Perseroan, kecuali Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") atas kantor cabang Perseroan dan kantor cabang perwakilan Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 1 yang belum dilakukan proses pengurusan.

Selama Perseroan tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan kantor cabang Perseroan dan kantor cabang perwakilan Perseroan dalam daftar perusahaan, maka Direksi Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal sebesar Rp 3.000.000 sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 UU 3/1982.

- 1.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, sehubungan dengan SIUP yang dimiliki Perseroan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta No. 17296-04/PM/1.824.271 tanggal 1 September 2014 berkaitan dengan jasa pengepakan, berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan, saat ini Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha pengepakan. Selanjutnya dalam menjalankan kegiatan usaha jasa titipan, Perseroan hanya cukup memiliki izin penyelenggaraan pos.
- 1.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham di perusahaan manapun.
- 1.13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan, Perseroan tidak memiliki aset dalam bentuk apapun (termasuk tanah, bangunan, mesin dan alat berat), kecuali kepemilikan atas kendaraan operasional berupa mobil dengan berbagai macam jenis untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengadakan penutupan perlindungan asuransi atas kendaraan termasuk bangunan yang disewa dari pihak ketiga dan sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan, jumlah pertanggungan atas penutupan asuransi Perseroan tersebut telah memadai untuk mengganti aset-aset yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan. Kepemilikan atas kendaraan aset berupa kendaraan operasional oleh Perseroan adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan tidak sedang dijaminkan dan tidak dalam keadaan sengketa atau perkara apapun.
- 1.14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu antara lain:
  1. Perjanjian-perjanjian kerjasama pengiriman barang dengan: (i) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; (ii) PT ISS Indonesia; (iii) PT Hanjaya Mandala Sampoerna; (iv) PT Bank Permata Tbk; (v) PT Bank Central Asia Tbk; (vi) PT Amindoway Jaya; (vii) PT Bank Maybank Indonesia Tbk; (viii) PT Bank Mega Tbk; (ix) PT Bank CIMB Niaga Tbk dan (x) PT Home Credit Indonesia;
  2. Perjanjian Obligasi Yang Dapat Dikonversi tertanggal 24 November 2016 antara Perseroan sebagai penerbit obligasi dan GDEX sebagai pemegang obligasi ("**Perjanjian Obligasi Konversi**"); dan
  3. Perjanjian sewa kantor dan bangunan dengan pihak ketiga.

Perjanjian ataupun kesepakatan yang penting dan material yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut, kecuali untuk perjanjian sewa kantor dan bangunan untuk: (i) Kantor Pusat, (ii) Kantor Cabang yang berlokasi di Banjarmasin, Bengkulu, Cirebon, Jayapura, Jember, Kendari, Kudus, Makasar, Manokwari, Merauke, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Pekalongan, Pontianak, Jakarta Selatan 1, Solo, Sorong, Tanjung Pinang, Tarakan, Ternate, Balikpapan, Jakarta Barat, Bekasi, Bogor, Cikarang, Denpasar, Depok, Jambi, Malang, Medan, Jakarta Selatan 2, Semarang, Tangerang, Tasikmalaya dan (iii) Kantor Cabang Perwakilan yang berlokasi di Pasuruan, Singkawang, Tegal, Bukit Tinggi, Pare-Pare, Sanggau, Tanjung Pandan dan Palopo, yang masih sedang dalam proses untuk dilakukan perpanjangan.

Berdasarkan Pasal 1573 dan 1598 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun jangka waktu perjanjian sewa sudah berakhir dan dalam status perpanjangan, saat ini Perseroan masih tetap dapat menikmati sewa tersebut. Hal ini telah menciptakan akibat-akibat sewa yang baru diatur menurut ketentuan perjanjian sewa sebelumnya.

Perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan tersebut bersifat teknis terkait dengan operasional Perseroan. Rencana Penawaran Umum Perdana tidak akan bertentangan atau melanggar suatu syarat dan ketentuan dan/atau tidak merupakan kelalaian berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut serta tidak akan merugikan hak pemegang saham publik.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, terkait pembatasan kepada Perseroan sehubungan dengan: (i) penerbitan saham baru, (ii) perubahan struktur modal, (iii) perubahan anggaran dasar dan (iv) perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Perjanjian Obligasi Konversi, Perseroan telah memperoleh pengesampingan dari GDEX sebagaimana termaktub dalam surat dari GDEX kepada Perseroan tertanggal 3 Juli 2018. Selain hal tersebut, Perjanjian Obligasi Konversi tidak memuat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan atau membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.

- 1.15. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi yaitu Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 015/SAP-LGL/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 ("**Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham**") dengan rincian sebagaimana berikut:

Pihak Terafiliasi	Batas Waktu	Hubungan Afiliasi	Keterangan
Budyanto Darmastono sebagai pemberi pinjaman (" <b>Pemberi Pinjaman</b> ")	2 (dua) tahun dari tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, namun Pemberi Pinjaman atas kehendaknya dapat menambah jangka waktu Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham.  Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan, Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham ini masih berlaku.	Pemegang Saham Perseroan	Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, Pemberi Pinjaman meminjamkan kepada Perseroan uang sebesar 7.741.628.494 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, tanpa disertai dengan bunga maupun biaya-biaya lainnya.

Perjanjian dengan pihak afiliasi tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut serta tidak akan merugikan hak pemegang saham publik.

Sifat dari perjanjian dan/atau transaksi tersebut adalah transaksi yang berkelanjutan, dimana perjanjian dan/atau transaksi tersebut telah diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana. Apabila di kemudian hari setelah Penawaran Umum Perdana, terdapat perubahan syarat dan kondisi perjanjian di atas atau adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**").

1.16. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku terhadap Perseroan di bidang ketenagakerjaan antara lain:

1. telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**UU 7/1981**");
2. telah memenuhi upah minimum propinsi (UMP) kabupaten/ kota di Jakarta dan daerah-daerah lainnya dimana kantor cabang dan kantor cabang perwakilan Perseroan berdomisili; dan
3. telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") sesuai dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tersebut.

Kecuali untuk kantor cabang Perseroan yang berlokasi di (i) Jakarta Barat, (ii) Jakarta Pusat dan (ii) Jakarta Selatan 2, Perseroan belum melakukan pelaporan ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 10 UU 7/1981, perusahaan yang tidak menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada instansi/ dinas tenaga kerja yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp1.000.000.

1.17. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki peraturan perusahaan yang sah dan mengikat serta telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sampai 29 September 2018.

1.18. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, berdasarkan Uji Tuntas sebagaimana didukung dengan surat pernyataan Direksi Perseroan dan surat tidak terlibat perkara Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dalam suatu (i) perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") atau Badan-badan Arbitrase lainnya, (iii) perkara gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") yang terdaftar di Pengadilan Niaga; (iv) sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak; (v) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara ("**PTUN**"); dan (vi) perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial ("**PHI**"), serta tidak sedang menerima somasi atau klaim yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

## 2. PENAWARAN UMUM PERDANA

- 2.1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta 32/2018.
- 2.2. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan/atau dimiliki oleh pemegang saham Perseroan pada saat dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
- 2.3. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:
  1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 104 tanggal 29 Juni 2018, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No 102 tanggal 23 Juli 2018, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No 26 tanggal 7 Agustus 2018, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 34 tanggal 12 September 2018 antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, yang seluruhnya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
  2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 105 tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 103 tanggal 23 Juli 2018 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 35 tanggal 12 September 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek;
  3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia No.SP-055/SHM/KSEI/0518 tanggal 26 Juni 2018 dibuat dibawah tangan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
  4. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan BEI.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, penyelenggara pos dapat menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka setelah mendapatkan izin dari Menkominfo.

Perseroan telah memperoleh izin dari Menkominfo mengenai perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana dibuktikan oleh Surat Menkominfo No.S-1052/M.KOMINFO/PI.01.02/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menkominfo ("**Surat 1052/2018**"). Surat 1052/2018 menyatakan bahwa permohonan Perseroan untuk menjadi perusahaan terbuka dapat diproses lebih lanjut kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.5. Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagai emiten dengan aset skala menengah sebagaimana diatur dalam POJK 53/2017 dengan mempertimbangkan:
  1. Keseluruhan total aset yang dimiliki Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana diaudit



oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyanaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ialah sebesar **Rp56.265.576.747**. Jumlah keseluruhan aset Perseroan tersebut tidaklah melebihi Rp250.000.000.000 sebagaimana ditentukan dalam POJK 53/2017. Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan UU 40/2007, dimana telah di hadir dan disetujui secara sah oleh para pemegang saham atau kuasanya yang mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal rapat yang memutuskan persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali untuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2018, berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan, laporan keuangan ini akan disahkan paling lambat bulan Juni 2019 sebagai bagian dari Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tahun 31 Desember 2018 di rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan; dan

2. Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: i) pengendali dari perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah; dan/ atau ii) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000.

Estimasi manajemen Perseroan mengenai target dana yang akan dihimpun pada Penawaran Umum Perdana ialah sebesar **Rp100.000.000.000**. Jumlah tersebut memenuhi kualifikasi penawaran umum oleh emiten skala menengah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) POJK 53/2017 yang menyatakan bahwa penawaran umum oleh emiten skala menengah yaitu penawaran umum yang dilakukan oleh emiten skala menengah dengan nilai keseluruhan efek yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertai dengan jumlah tidak lebih dari Rp250.000.000.000.

- 2.6. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana untuk membayar pelunasan dipercepat Perjanjian Obligasi Konversi sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan transaksi material, mengingat Perjanjian Obligasi Konversi dan kesepakatan pelunasan dipercepat Perjanjian Obligasi Konversi terjadi sebelum status Perseroan efektif menjadi perusahaan terbuka sehingga dengan demikian tidak tunduk pada transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Namun demikian, mengingat kondisi Perseroan yang masih mengalami kerugian dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana pelunasan Perjanjian Obligasi Konversi tersebut, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 27 Agustus 2018.

Selanjutnya, mengingat bahwa GDEX bukan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan IX.E.1; maka rencana pelunasan Perjanjian Obligasi Konversi tersebut tidak tunduk sebagai transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1.

### 3. KUALIFIKASI DAN ASUMSI

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

#### 3.1. KUALIFIKASI

1. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana;
2. dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/ terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sampai dengan tanggal 25 September 2018 ("**Batas Waktu**

**Penerimaan Dokumen”);**

3. sesuai ketentuan dalam POJK 53/2017, kami membatasi Pendapat dari Segi Hukum ini khusus untuk (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir dengan memperhatikan kualifikasi pada Paragraf 3.1.3 Pendapat dari Segi Hukum ini, dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup (i) 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (ii) sejak berdirinya jika pendiriannya kurang dari 2 (dua) tahun sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (iii) perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham terakhir, dalam hal 2 (dua) tahun terakhir tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham. Dikarenakan adanya pembatasan dalam pemeriksaan hukum kami tersebut diatas, kami mengasumsikan setiap perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan dan kepemilikan saham yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dari segi hukum telah dibuat secara sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang;
4. kami tidak melakukan penilaian dan pemeriksaan dari sisi (i) perpajakan, dan (ii) komersial dan keuangan dari Perseroan;
5. Terkait dengan kepemilikan aset Perseroan, kami hanya melakukan uji tuntas atas aset Perseroan yang bersifat material dan penting sesuai dengan standar HKHPM. Dalam penentuan materialitas tersebut kami mendasarkan juga pada perhitungan, penilaian, dan keterangan dari Perseroan;
6. sehubungan dengan tanah dan perizinan yang terkait dengan tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang memiliki sertifikat hak guna bangunan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang. Untuk menghindari keragu-raguan dan kami tidak memberikan pendapat dari segi hukum atas penguasaan dan/atau penggunaan/ pengusahaan tanah oleh Perseroan selain dari tanah yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan;
7. uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini semata-mata berdasarkan hukum dan praktik yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktik yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pendapat dari Segi Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
8. sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan keterlibatan perkara Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan standar HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tahun 2005 sebagaimana diubah berturut-turut dengan Perubahan Standar Profesi HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tahun 2012 dan Perubahan Standar Profesi HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tahun 2014 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No: 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, kami melakukan pemeriksaan atas keterlibatan mereka dalam perkara hukum pada instansi peradilan di Indonesia melalui situs lembaga peradilan terkait. Namun demikian, mengingat di Indonesia belum adanya lembaga penyedia informasi publik yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan Perseroan maupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, lebih lanjut kami juga mendasarkan diri pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen; dan

9. untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan pendapat kami pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.

### 3.2. ASUMSI

1. setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan mengenai Perseroan kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
2. setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan mengenai Perseroan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan dan/atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang (kecuali Perseroan) berdasarkan dokumen korporasi, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
3. semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
4. setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari pihak Perseroan mengenai Perseroan baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan;
5. setiap dokumen, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diperoleh dan diterima oleh kami dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini telah diberikan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut;
6. Instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah;
7. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dalam bentuk asli maupun fotokopi, dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami maupun diberikan dari pihak ketiga kepada Perseroan yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak ada dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-

fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan yang tidak disediakan kepada kami yang dapat mengakibatkan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat dan menyesatkan serta telah diberikan oleh Instansi Pemerintah dalam hal izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran, yang diwakili oleh orang (-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen tersebut;

8. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang(-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat pihak yang bersangkutan; dan
9. setiap perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan telah memberikan keuntungan terbaik dan akan memberikan manfaat kepada Perseroan.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

**HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tjahjadi Bunjamin', written over a horizontal line.

**Tjahjadi Bunjamin, S.H., LL.M.**

STTD No. STTD.KH-163/PM.2/2018

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

## LAMPIRAN 1

No.	Lokasi Kantor Cabang
1.	AMBON
2.	BALIKPAPAN
3.	BANDA ACEH
4.	BANJARMASIN
5.	JAKARTA BARAT
6.	BEKASI
7.	BOGOR
8.	BONTANG
9.	CIANJUR/ SUKABUMI
10.	CIKARANG
11.	CILEGON
12.	CIREBON
13.	DENPASAR
14.	DEPOK
15.	GORONTALO
16.	JAYAPURA
17.	JEMBER
18.	KUDUS
19.	KUPANG
20.	MADIUN
21.	MAKASAR
22.	MANOKWARI
23.	MEDAN
24.	MERAUKE
25.	PADANG
26.	PEKALONGAN
27.	PEKANBARU
28.	PONTIANAK
29.	PURWOKERTO
30.	PUSAT/UTARA
31.	SAMARINDA
32.	SELATAN 1
33.	SELATAN 2

34.	SEMARANG
35.	SOLO (SURAKARTA)
36.	SORONG
37.	SURABAYA
38.	TANGERANG
39.	TANJUNG PINANG
40.	TARAKAN
41.	TASIKMALAYA
42.	JAKARTA TIMUR
43.	YOGYAKARTA

<b>No.</b>	<b>Lokasi Kantor Cabang Perwakilan</b>
1.	PALOPO
2.	PASURUAN
3.	PEMATANG SIANTAR
4.	RANTAU PRAPAT
5.	SINGKAWANG
6.	TEGAL
7.	MOJOKERTO
8.	PARE PARE
9.	PAYAH KUMBUH
10.	SANGGAU/SOSOK
11.	TANJUNG PANDAN



### **XIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan



**PT SATRIA ANTARAN PRIMA  
LAPORAN KEUANGAN  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 MARET 2018 DAN TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK  
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 MARET 2017 (TIDAK DIAUDIT) DAN  
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-  
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015)**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA  
FINANCIAL STATEMENTS  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
THREE-MONTH PERIOD ENDED MARCH 31,  
2018 AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017  
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR  
THE THREE-MONTH PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2017 (UNAUDITED) AND THE  
YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015)**

Kami yang bertandatangan di bawah ini/ We, the undersigned:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Nama/ Name<br>Alamat Kantor/ Office Address<br>Nomor Telepon/ Telephone Number<br>Alamat Domisili/ Home Address<br>Jabatan/ Title | : Budiyanto Damastono<br>: Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G, Rt.001/08, Kalibata, Pancoran<br>Jakarta Selatan<br>: 021 2280 6611<br>: Jl. Bango II No. 17A, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan<br>: Presiden Direktur/ President Director  |
| 2 | Nama/ Name<br>Alamat Kantor/ Office Address<br>Nomor Telepon/ Telephone Number<br>Alamat Domisili/ Home Address<br>Jabatan/ Title | : Alfried Taftazani<br>: Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G, Rt.001/08, Kalibata, Pancoran<br>Jakarta Selatan<br>: 021 2280 6611<br>: Jl. Pinang II No. 4, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan<br>: Direktur Independen/ Independent Director |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Satria Antarana Prima;
2. a. Laporan keuangan PT Satria Antarana Prima telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;  
b. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Satria Antarana Prima telah dimuat secara lengkap dan benar;
3. Laporan keuangan PT Satria Antarana Prima tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Satria Antarana Prima.

State that :

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Satria Antarana Prima;
2. a. The financial statements of PT Satria Antarana Prima have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;  
b. All information has been disclosed in a complete and truthful manner in PT Satria Antarana Prima financial statements;
3. The financial statements of PT Satria Antarana Prima do not contain incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and
4. We are responsible for the internal control system of PT Satria Antarana Prima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 21 Agustus 2018  
Atas nama dan mewakili Direksi

Jakarta, August 21, 2018  
For and on behalf of the Board of Directors



Budyanto Damastono  
Presiden Direktur/ President Director



Alfried Taftazani  
Direktur Independen/ Independent Director

Halaman ini sengaja dikosongkan



## Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015

Cyber 2 Tower 20<sup>th</sup> floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5  
Jakarta 12950, Indonesia  
Main +62 (21) 2553 9200  
Fax +62 (21) 2553 9298  
www.crowe.id

*The original report included herein is in Indonesian language.*

### Laporan Auditor Independen

### Independent Auditors' Report

Laporan No. KNMT&R-21.08.2018/01

Report No. KNMT&R-21.08.2018/01

Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
dan Direksi  
**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**

*The Shareholders, Boards of Commissioners  
and Directors  
**PT SATRIA ANTARAN PRIMA***

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Satria Antaran Prima ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying financial statements of PT Satria Antaran Prima (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of March 31, 2018 and December 31, 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three-month period March 31, 2018 and the year ended December 31, 2017, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

### *Management's responsibility for the financial statements*

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

### Tanggung jawab auditor

### *Auditors' responsibility*

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

The original report included herein is in Indonesian language.

## Halaman 2

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Satria Antarana Prima tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Penekanan suatu hal

Tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami, kami membawa perhatian Saudara pada Catatan 29 atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa Perusahaan mengalami rugi neto yang berulang. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, Perusahaan mengalami rugi neto sebesar Rp1.627.746.462. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga telah diungkapkan dalam Catatan 29 atas laporan keuangan.

Kami juga membawa perhatian Saudara pada Catatan 26 atas laporan keuangan, yang mengungkapkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, Perusahaan dan GD Express Carrier Bhd telah menyetujui jumlah pelunasan atas obligasi konversi tersebut dengan total pembayaran sebesar Rp67.200.000.000, terdiri dari Rp30.000.000.000 nilai nominal obligasi konversi dan Rp37.200.000.000 premi penebusan. Penyelesaian atas pelunasan obligasi konversi dan premi penebusan akan dilakukan setelah penawaran umum saham perdana PT Satria Antarana Prima di Indonesia.

## Page 2

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

## Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Satria Antarana Prima as of March 31, 2018 and December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for the three-month period March 31, 2018 and year ended December 31, 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

## Emphasis of matters

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 29 in the accompanying financial statements which indicates that the Company incurred recurring net losses. For the three-month period ended March 31, 2018, the Company incurred net loss amounting to Rp1,627,746,462. Management's plans in regard to these matters are also described in Note 29 to the financial statements.

We also draw attention to Note 26 in accompanying the financial statements which discloses that on June 29, 2018, the Company and GD Express Carrier Bhd agreed to pay the convertible bonds with total payment of Rp67,200,000,000, consisting of Rp30,000,000,000 par value and Rp37,200,000,000 redemption premium. The completion of convertible bond settlement and redemption premium will be made after the proposed initial public offering of the equity securities of PT Satria Antarana Prima in Indonesia.

*The original report included herein is in Indonesian language.*

Halaman 3

Page 3

Hal-hal lain

Other matters

Laporan keuangan PT Satria Antaran Prima tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 25 Juni 2018.

*The financial statements of PT Satria Antaran Prima as of December 31, 2016 and 2015 and for the years then ended, were audited by other independent auditors, whose reports dated June 25, 2018.*

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas PT Satria Antaran Prima untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 tidak diaudit. Laporan tersebut disajikan semata-mata untuk tujuan perbandingan.

*The financial statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of PT Satria Antaran Prima for the three-month period ended March 31, 2017, were not audited. Such reports are presented for comparative purposes only.*

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. KNMT&R-26.06.2018/03 tanggal 26 Juni 2018, No. KNMT&R-20.07.2018/01 tanggal 20 Juli 2018, No. KNMT&R-09.08.2018/01 tanggal 9 Agustus 2018 dan No. KNMT&R-16.08.2018/01 tanggal 16 Agustus 2018 atas laporan keuangan PT Satria Antaran Prima untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada Catatan 30 atas laporan keuangan.

*We have issued the independent auditors' reports No. KNMT&R-26.06.2018/03 dated June 26, 2018, No. KNMT&R-20.07.2018/01 dated July 20, 2018, No. KNMT&R-09.08.2018/01 dated August 9, 2018 and No. KNMT&R-16.08.2018/01 dated August 16, 2018 on the financial statements of PT Satria Antaran Prima for the three-month period March 31, 2018 and the year ended December 31, 2017. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering, the Company reissued its financial statements for the three-month period March 31, 2018 and the year ended December 31, 2017 with changes and additional disclosures in Note 30 to the financial statements.*

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Satria Antaran Prima di Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Satria Antaran Prima in Indonesia, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.*

**KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN**



**Suhartanto**

Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP. 0019

21 Agustus 2018/August 21, 2018



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**DRS ALBERT SILALAH I & REKAN**  
**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**

*The original report included herein is in Indonesian language*

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Laporan No. 038/LA/ASR-AS/VI/18

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT SATRIA ANTARAN PRIMA

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Satria Antaran Prima ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor memperimbangan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Report No. 038/LA/ASR-AS/VI/18

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors  
PT SATRIA ANTARAN PRIMA*

*We have audited the accompanying financial statements of PT Satria Antaran Prima (the "Company"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2016 and 2015, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Management's responsibility for the financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

Jln. Otista Raya No. 30 Jakarta Timur 13330  
Phone : 021.22892812 Fax. 021.22892812  
Email : kapalbertsilalahidanrekan@yahoo.com  
Nomor Izin Usaha : 98.2.0259  
Nomor : KEP-1127/KM-17/1998





**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**  
**DRS ALBERT SILALAH & REKAN**  
**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**

*The original report included herein is in Indonesian language.*

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan)**

Laporan No. 038/LA/ASR-AS/VI/18 (lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Satria Antarana Prima tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Penekanan Suatu Hal**

Seperti dijelaskan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Kami telah mengaudit penyesuaian penyajian kembali atas laporan keuangan tersebut, dan menurut pendapat kami, penyesuaian penyajian kembali tersebut telah sesuai dan diterapkan sebagaimana mestinya.

**Hal Lain**

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 048/LA/ASR-AS/XI/17 tanggal 10 November 2017, dan No. 056/LA/ASR-AS/IX/16 tanggal 14 September 2016, masing-masing atas laporan keuangan PT Satria Antarana Prima untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Laporan ini diterbitkan sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Satria Antarana Prima di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 28 atas laporan keuangan terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (continued)**

Report No. 038/LA/ASR-AS/VI/18 (continued)

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Satria Antarana Prima as of December 31, 2016 and 2015 and its financial performance and cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Emphasis of Matter**

*As disclosed in Note 4 to the financial statements, the Company restated its financial statements for the years ended December 31, 2016 and 2015. We have audited the restatement adjustments on those financial statements, and in our opinion, those restatement adjustments are appropriate and properly adopted.*

**Other Matter**

*We have reissued the independent auditors' reports No. 048/LA/ASR-AS/XI/17 dated November 10, 2017, and No. 056/LA/ASR-AS/IX/16 dated September 14, 2016, on the financial statements of PT Satria Antarana Prima for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively. This report has been prepared solely in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Satria Antarana Prima on Indonesia, as discussed in Note 28 to the accompanying financial statements, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.*

DRS. ALBERT SILALAH & REKAN



Drs. Albert Silalahi, CPA

Izin Akuntan Publik/ Public Accountant License No. AP 0875

25 Juni 2018/ June 25, 2018

Jln. Otista Raya No. 30 Jakarta Timur 13330  
Phone : 021.22892812 Fax. 021.22892812  
Email : kapalbertsilalahidanrekan@yahoo.com  
Nomor Izin Usaha : 98.2.0259  
Nomor : KEP-1127/KM-17/1998

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA  
LAPORAN POSISI  
KEUANGAN  
31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA  
STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
March 31, 2018 and December 31, 2017  
(With Comparative Figures as of  
December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
			2017	2016	2015	
<b>ASET</b>						<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>						<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan bank	2b,2l,3,4,20	17.417.976.406	9.517.850.137	27.668.973.216	1.842.656.637	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - neto	2c,2l,3,5,20	25.059.236.954	20.835.756.160	16.153.830.973	18.919.139.455	Trade receivables - net
Pihak ketiga						Third parties
Piutang lain-lain	2l,3,6,20	1.464.269.810	1.635.162.466	1.982.350.516	375.992.075	Other receivables
Pihak ketiga						Third parties
Beban dibayar dimuka dan uang muka	2d,7	2.606.492.247	2.584.616.608	2.869.988.031	1.772.743.146	Prepaid expense and advance payment
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>		<b>46.547.975.417</b>	<b>34.573.385.371</b>	<b>48.675.142.736</b>	<b>22.910.531.313</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset pajak tangguhan	2k,3,11	-	-	-	133.583.562	Deferred tax asset
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp5.031.309.514 pada tanggal 31 Maret 2018 (2017: Rp4.166.119.729, 2016: Rp1.977.053.589, 2015: Rp1.030.502.438)	2g,2h,3,8	8.941.956.330	9.357.262.115	2.193.231.521	1.537.364.032	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp5,031,309,514 as of March 31, 2018 (2017: Rp4,166,119,729, 2016: Rp1,977,053,589, 2015: Rp1,030,502,438)
Aset lain-lain	2l,3,20	775.645.000	42.000.000	35.000.000	-	Other assets
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>9.717.601.330</b>	<b>9.399.262.115</b>	<b>2.228.231.521</b>	<b>1.670.947.594</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>56.265.576.747</b>	<b>43.972.647.486</b>	<b>50.903.374.257</b>	<b>24.581.478.907</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT Satria Antarana Prima**  
**LAPORAN POSISI**  
**KEUANGAN (lanjutan)**  
**31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017**  
**(Dengan Angka Perbandingan pada Tanggal**  
**31 Desember 2016 dan 2015)**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT Satria Antarana Prima**  
**STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION (continued)**  
**March 31, 2018 and December 31, 2017**  
**(With Comparative Figures as of**  
**December 31, 2016 and 2015)**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
			2017	2016	2015	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>						<b>LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)</b>
<b>LIABILITAS</b>						<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>						<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha - Pihak ketiga	2i,3,9,20	5.159.306.520	3.911.364.596	464.574.897	227.490.367	Trade payables - Third parties
Utang lain-lain	2i,3,10,20					Other payables
Pihak berelasi	2e,24	7.871.735.250	7.634.912.494	4.906.683.784	37.382.443.132	Related party
Pihak ketiga		4.901.654.039	2.939.679.520	3.387.098.371	1.817.100.000	Third parties
Liabilitas yang masih harus dibayar	2e,2i,3,12,20	1.650.800.247	1.084.673.221	505.616.593	-	Accrued liabilities
Utang pajak	2k,3,11	853.336.755	690.954.957	149.413.021	105.073.262	Taxes payable
Uang muka pelanggan		24.503.873	85.807.629	-	-	Advances from customers
Bagian utang pembiayaan konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2i,3,14,20	1.290.168.869	1.435.277.037	580.140.908	299.176.461	Current maturities of long-term consumer financing payables
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>21.751.505.553</b>	<b>17.782.669.454</b>	<b>9.993.527.574</b>	<b>39.831.283.222</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>						<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2k,3,11	703.617.418	905.356.979	2.148.765.312	-	Deferred tax liability - net
Utang obligasi konversi	2i,2q,3,15,20	22.562.740.818	22.117.867.870	20.460.600.177	-	Convertible bonds payable
Liabilitas imbalan kerja	2i,3,13	8.377.701	9.507.510	5.869.864	3.016.082	Employee benefits liability
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2i,3,14,20	2.311.997.049	2.603.594.535	568.031.195	428.791.467	Long-term consumer financing payables - net of current maturities
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>25.586.732.986</b>	<b>25.636.326.894</b>	<b>23.183.266.548</b>	<b>431.807.549</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>47.338.238.539</b>	<b>43.418.996.348</b>	<b>33.176.794.122</b>	<b>40.263.090.771</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>						<b>EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)</b>
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham						Share capital - par value Rp100,000 per share
Modal dasar - 1.200.000 saham pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, dan 30.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015						Authorized - 1,200,000 shares as of March 31, 2018, December 31, 2017 and 2016, and 30,000 shares as of December 31, 2015
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 400.000 saham pada tanggal 31 Maret 2018, 300.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan 30.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015	16	40.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	3.000.000.000	Issued and fully paid - 400,000 shares as of March 31, 2018, 300,000 shares as of December 31, 2017 and 2016, and 30,000 shares as of December 31, 2015
Komponen ekuitas dari obligasi konversi	15	7.257.434.643	7.257.434.643	7.257.434.643	-	Equity component of convertible bonds
Akumulasi defisit		(38.330.096.435)	(36.703.783.505)	(19.530.854.508)	(18.681.611.864)	Accumulated deficits
<b>TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>		<b>8.927.338.208</b>	<b>553.651.138</b>	<b>17.726.580.135</b>	<b>(15.681.611.864)</b>	<b>TOTAL EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>		<b>56.265.576.747</b>	<b>43.972.647.486</b>	<b>50.903.374.257</b>	<b>24.581.478.907</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT Satria Antarana Prima**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN**  
**PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**STATEMENTS OF**  
**PROFIT OR LOSS AND OTHER**  
**COMPREHENSIVE INCOME**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
		2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
<b>PENDAPATAN</b>	2j,17	48.210.455.463	31.240.768.981	148.157.471.533	117.389.617.196	60.010.565.916	<b>REVENUES</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	2j,18	37.379.261.116	24.441.668.114	119.985.587.529	89.159.094.378	52.881.852.038	<b>DIRECT COSTS</b>
<b>LABA BRUTO</b>		<b>10.831.194.347</b>	<b>6.799.100.867</b>	<b>28.171.884.004</b>	<b>28.230.522.818</b>	<b>7.128.713.878</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	2j,2e,19,24	12.150.024.163	8.760.675.692	44.897.933.022	28.662.955.965	17.202.679.254	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>RUGI USAHA</b>		<b>(1.318.829.816)</b>	<b>(1.961.574.825)</b>	<b>(16.726.049.018)</b>	<b>(432.433.147)</b>	<b>(10.073.965.376)</b>	<b>OPERATING LOSS</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>							<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Pendapatan bunga		17.760.751	100.482.658	223.453.158	36.833.425	5.705.457	Interest income
Beban bunga		(561.204.093)	(441.678.958)	(2.034.960.289)	(287.652.553)	(185.398.082)	Interest expense
Beban bank administrasi		(15.231.915)	(13.283.870)	(48.463.498)	(123.325.959)	(60.699.102)	Bank administration charges
Pendapatan lain-lain		51.892.707	55.500.000	177.578.247	206.915.580	-	Other income
Beban lain-lain		(4.351.501)	(669.998)	(7.651.365)	(14.505.680)	(88.604.504)	Other expenses
<b>BEBAN LAIN-LAIN - NETO</b>		<b>(511.134.051)</b>	<b>(299.650.168)</b>	<b>(1.690.043.747)</b>	<b>(181.735.187)</b>	<b>(328.996.231)</b>	<b>OTHER EXPENSES - NET</b>
<b>RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>(1.829.963.867)</b>	<b>(2.261.224.993)</b>	<b>(18.416.092.765)</b>	<b>(614.168.334)</b>	<b>(10.402.961.607)</b>	<b>LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN</b>	2k,3,11						<b>INCOME TAX EXPENSE (BENEFIT)</b>
Kini		-	-	-	371.850.500	-	Current
Tangguhan		(202.217.405)	(369.219.210)	(1.243.347.192)	(136.791.053)	(105.312.749)	Deferred
Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		(202.217.405)	(369.219.210)	(1.243.347.192)	235.059.447	(105.312.749)	Total Income Tax Expense (Benefit)
<b>RUGI NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>		<b>(1.627.746.462)</b>	<b>(1.892.005.783)</b>	<b>(17.172.745.573)</b>	<b>(849.227.781)</b>	<b>(10.297.648.858)</b>	<b>NET LOSS FOR THE PERIOD/YEAR</b>
<b>PENDAPATAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:</b>							<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):</b>
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:							Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2i,13	1.911.376	(61.142)	(244.565)	(19.817)	101.252	Remeasurement of employee benefits liabilities
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	2k,11	(477.844)	15.286	61.141	4.954	(25.313)	Related income tax expense (benefit)
Total penghasilan (rugi) komprehensif lain		1.433.532	(45.856)	(183.424)	(14.863)	75.939	Total other comprehensive income (loss)
<b>TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>		<b>(1.626.312.930)</b>	<b>(1.892.051.639)</b>	<b>(17.172.928.997)</b>	<b>(849.242.644)</b>	<b>(10.297.572.919)</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE PERIOD/YEAR</b>
<b>RUGI PER SAHAM DASAR</b>	2o,22	(5,28)	(6,31)	(57,24)	(16,18)	(343,25)	<b>BASIC LOSS PER SHARE</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT Satria Antarana Prima  
Laporan Perubahan Ekuitas  
(Defisiensi Modal)**

Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima  
Statements of  
Changes in Equity (Capital Deficiency)  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Komponen Ekuitas pada Obligasi Konversi/ Equity Component of Convertible Bonds	Akumulasi Defisit/ Accumulated Deficit	Total Ekuitas (Defisiensi Modal)/ Total Equity (Capital Deficiency)	
<b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2015</b>		<b>3.000.000.000</b>	-	<b>(8.384.038.945)</b>	<b>(5.384.038.945)</b>	<b>Balance as of January 1, 2015</b>
Rugi tahun berjalan		-	-	(10.297.648.858)	(10.297.648.858)	Loss for the year
Laba komprehensif lain tahun berjalan		-	-	75.939	75.939	Other comprehensive income for the year
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2015</b>		<b>3.000.000.000</b>	-	<b>(18.681.611.864)</b>	<b>(15.681.611.864)</b>	<b>Balance as of December 31, 2015</b>
Konversi hutang pemegang saham ke saham	16	27.000.000.000	-	-	27.000.000.000	Conversion of due to related party to capital
Obligasi konversi - komponen ekuitas - setelah pajak	15	-	7.257.434.643	-	7.257.434.643	Convertible bond - equity component - after tax
Rugi tahun berjalan		-	-	(849.227.781)	(849.227.781)	Loss for the year
Rugi komprehensif lain tahun berjalan		-	-	(14.863)	(14.863)	Other comprehensive loss for the year
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2016</b>		<b>30.000.000.000</b>	<b>7.257.434.643</b>	<b>(19.530.854.508)</b>	<b>17.726.580.135</b>	<b>Balance as of December 31, 2016</b>
Rugi tahun berjalan		-	-	(1.892.005.783)	(1.892.005.783)	Loss for the year
Rugi komprehensif lain tahun berjalan		-	-	(45.856)	(45.856)	Other comprehensive loss for the year
<b>Saldo pada tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit)</b>		<b>30.000.000.000</b>	<b>7.257.434.643</b>	<b>(21.422.906.147)</b>	<b>15.834.528.496</b>	<b>Balance as of March 31, 2017 (Unaudited)</b>
<b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2017</b>		<b>30.000.000.000</b>	<b>7.257.434.643</b>	<b>(19.530.854.508)</b>	<b>17.726.580.135</b>	<b>Balance as of January 1, 2017</b>
Rugi tahun berjalan		-	-	(17.172.745.573)	(17.172.745.573)	Loss for the year
Rugi komprehensif lain tahun berjalan		-	-	(183.424)	(183.424)	Other comprehensive loss for the year
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2017</b>		<b>30.000.000.000</b>	<b>7.257.434.643</b>	<b>(36.703.783.505)</b>	<b>553.651.138</b>	<b>Balance as of December 31, 2017</b>
Peningkatan modal saham	16	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	Additional issuance of share capital
Rugi tahun berjalan		-	-	(1.627.746.462)	(1.627.746.462)	Loss for the year
Laba komprehensif lain tahun berjalan		-	-	1.433.532	1.433.532	Other comprehensive income for the year
<b>Saldo pada tanggal 31 Maret 2018</b>		<b>40.000.000.000</b>	<b>7.257.434.643</b>	<b>(38.330.096.435)</b>	<b>8.927.338.208</b>	<b>Balance as of March 31, 2018</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga**  
**Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017**  
**(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**STATEMENTS OF**  
**CASH FLOWS**  
**Three-Month Period Ended March 31, 2018 and**  
**Year Ended December 31, 2017**  
**(With Comparative Figures for the Three-Month**  
**Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and**  
**Years Ended December 31, 2016 and 2015)**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
		2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
<b>ARUS KAS DARI</b>							
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>							
Penerimaan kas dari pelanggan		43.883.190.198	28.089.187.553	141.331.232.486	120.170.282.382	42.600.399.450	<i>Cash receipts from customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya		(23.138.352.139)	(17.018.238.289)	(77.181.835.044)	(77.556.977.725)	(6.442.539.618)	<i>Cash payments to suppliers and others</i>
Pembayaran kas kepada karyawan		(21.746.680.991)	(15.808.700.294)	(75.381.474.453)	(45.207.516.468)	(33.629.650.475)	<i>Cash payments to employees</i>
Pembayaran pajak penghasilan		-	-	(5.165.207)	(366.685.293)	-	<i>Cash payments for income taxes</i>
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi		(1.001.842.932)	(4.737.751.030)	(11.237.242.218)	(2.960.897.104)	2.528.209.357	<i>Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities</i>
<b>ARUS KAS DARI</b>							
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>							
Perolehan aset tetap	8	(544.994.000)	(979.134.385)	(5.235.113.660)	(725.649.430)	(538.580.870)	<i>Acquisitions of fixed assets</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>							
<b>PENDANAAN</b>							
Kenaikan modal saham	16	10.000.000.000	-	-	-	-	<i>Increase in capital stock</i>
Pembayaran utang konsumen pembiayaan	14	(436.705.654)	(139.062.145)	(1.301.074.605)	(336.664.035)	(203.334.218)	<i>Payment of consumer financing payables</i>
Pembayaran beban bunga		(116.331.145)	(30.139.855)	(377.692.596)	(150.472.852)	(185.398.082)	<i>Cash payment for interest expense</i>
Penerbitan utang obligasi konversi	15	-	-	-	30.000.000.000	-	<i>Issuance of convertible bonds payable</i>
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan		9.446.963.201	(169.202.000)	(1.678.767.201)	29.512.863.113	(388.732.300)	<i>Net Cash Provided by (Used In) Financing Activities</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) DARI KAS DAN BANK - NETO</b>		<b>7.900.126.269</b>	<b>(5.886.087.415)</b>	<b>(18.151.123.079)</b>	<b>25.826.316.579</b>	<b>1.600.896.187</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE/TAHUN</b>		<b>9.517.850.137</b>	<b>27.668.973.216</b>	<b>27.668.973.216</b>	<b>1.842.656.637</b>	<b>241.760.450</b>	<b>CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE/TAHUN</b>		<b>17.417.976.406</b>	<b>21.782.885.801</b>	<b>9.517.850.137</b>	<b>27.668.973.216</b>	<b>1.842.656.637</b>	<b>CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF THE PERIOD/YEAR</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT Satria Antarana Prima**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Satria Antarana Prima (Perusahaan), didirikan pada tanggal 1 Juli 2014, berdasarkan Akta Notaris Bambang Sularso, S.H., No. 1. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-21298.40.10.2014 tanggal 20 Agustus 2014, dan diumumkan dalam Tambahan No. 53367 dari Lembaran Berita Negara No. 103 tanggal 26 Desember 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Veronika Sri Hartati, S.H., No. 94 tanggal 26 Maret 2018, tentang penambahan modal ditempatkan. Akta perubahan Anggaran Dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03.0128182 Tahun 2018 pada tanggal 28 Maret 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang jasa titipan, ekspedisi dan pergudangan, transportasi dan pengangkutan, jasa percetakan, keagenan dan *outsourcing*.

Pada saat ini, kegiatan usaha yang dilaksanakan Perusahaan adalah bidang jasa titipan.

Perusahaan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 2014.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jakarta, pada saat ini kantor Perusahaan terletak di Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G, Pancoran, Jakarta Selatan.

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

Pada tanggal 31 Maret 2018, Desember 2017, 2016 dan 2015, susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

<b>Komisaris</b>	:	Yuwono Darmastoto	:
<b>Direktur</b>	:	Budiyanto Darmastono	:

**Commissioner**  
**Director**

**1. GENERAL**

**a. The Company's Establishment**

PT Satria Antarana Prima (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 1 of Bambang Sularso, S.H., dated July 1, 2014. The establishment deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-21298.40.10.2014 dated August 20, 2014, and was published in Supplement No. 53367 of State Gazette No. 103, dated December 26, 2014.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by Notarial Deed No. 94 of Veronika Sri Hartati, S.H., dated March 26, 2018, concerning the increase in issued capital. The amendment of the Articles of Association was approved by Minister of Laws and Human Rights of Republic of the Indonesia in his Acknowledgment Letter No. AHU-AH.01.03.0128182 Tahun 2018 dated March 28, 2018.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to engage in courier service, freight forwarding and warehousing, transportation and handling, printing services, agency and *outsourcing*.

Currently, the Company's business activity is in courier service.

The Company started its commercial activity in 2014.

The Company's head office is located in Jakarta and its current office address is at Jl. Raya Pasar Minggu No. 21 Blok G, Pancoran, Jakarta Selatan.

**b. Boards of Commissioners, Directors and Employees**

As of March 31, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015, the composition of the Company's Commissioner and Director is as follows:

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)**

Jumlah kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, masing-masing sebesar Rp246.000.000, Rp246.000.000, Rp984.000.000, Rp984.000.000 dan Rp780.000.000.

Perusahaan memiliki karyawan tetap masing-masing sejumlah 458, 466, 530 dan 638 pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 (tidak diaudit).

**c. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2018.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PT Satria Antarana Prima ("Perusahaan").

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BAPEPAM-LK).

Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK No. 1 (2015), "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan".

**1. GENERAL (continued)**

**b. Boards of Commissioners, Directors and Employees (continued)**

Total short-term compensation benefits paid to the Company's Commissioner and Director for the three-month periods ended March 31, 2018 and 2017, and years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, amounted to Rp246,000,000, Rp246,000,000, Rp984,000,000, Rp984,000,000 and Rp780,000,000, respectively.

The Company has 458, 466, 530 and 638 permanent employees as of March 31, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively (unaudited).

**c. Completion of the Financial Statements**

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of these financial statements that were completed and authorized for issue on August 21, 2018.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the financial statements of PT Satria Antarana Prima (the "Company").

**a. Basis of Preparation of Financial Statements**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the Regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (formerly BAPEPAM-LK).

The Company adopted Amendments to PSAK No. 1 (2015), "Presentation of Financial Statements: Disclosure Initiatives".



**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)**

Amandemen ini, di antara lain, memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Laporan keuangan interim disusun sesuai dengan PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016) - "Laporan Keuangan Interim" dan PSAK No. 1 (Revisi 2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas".

Efektif 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK No. 2 (2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan."

Amandemen ini, di antara lain, memberikan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari transaksi nonkas.

Laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**a. Basis of Preparation of Financial Statements (continued)**

The amendment, among others, provides clarification regarding the application of materiality requirements, the flexibility of the systematic order of the notes for financial statements, and identification of significant accounting policies.

The interim financial statements have been prepared in accordance with PSAK No. 3 (2016 Improvement) - "Interim Financial Reporting" and PSAK No. 1 (Revised 2015), "Presentation of Financial Statements".

The financial statements, except for the statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.

The Company applied PSAK No. 2 (Revised 2009), "Statement of Cash Flows".

Effective January 1, 2018, the Company adopted Amendments to PSAK No. 2 (2016) - "Statements of Cash Flows: Disclosure Initiatives".

The amendment, among others, provides disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including those changes arising from non-cash transactions.

The statements of cash flows present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities using the direct method.

The reporting currency used in the preparation of these financial statements is Indonesian Rupiah which is also the Company's functional currency.

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 kecuali bagi penerapan SAK yang baru efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 seperti yang telah diungkapkan pada Catatan ini.

Perusahaan memilih menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan dan menyajikan tambahan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian pada Catatan 3 serta pengelolaan permodalan pada Catatan 20.

**b. Kas dan Bank**

Kas dan bank terdiri dari saldo kas dan bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

**c. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) untuk kerugian penurunan nilai piutang.

**d. Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka dibebankan selama masa manfaatnya.

**e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:
- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
  - (iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**a. Basis of Preparation of Financial Statements (continued)**

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2017, 2016 and 2015, except for the adoption of new SAK effective January 1, 2018 as disclosed in this Note.

The Company elected to present one single statement of profit or loss and other comprehensive income and disclosed source of estimation uncertainty in Note 3 and capital management in Note 20.

**b. Cash on Hand and in Banks**

Cash on hand and in banks consist of cash on hand and in banks which are not pledged as collateral or restricted in use.

**c. Allowance for Impairment Losses on Receivables**

The Company applied PSAK No. 55 (Revised 2014) for impairment losses on receivables.

**d. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited.

**e. Transactions with Related Parties**

A related party is a person or entity that is related to the Company:

- a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:
- (i) has control or joint control over the Company;
  - (ii) has significant influence over the Company; or
  - (iii) is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)**

- b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
  - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
  - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Transactions with Related Parties (continued)**

- b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
- (i) the entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
  - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
  - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
  - (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company.
  - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).
  - (vii) a person identified in a) i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
  - (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes herein.

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**f. Sewa**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa". Revisi terhadap PSAK No. 30 ini menetapkan bahwa klasifikasi dari setiap elemen sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah bagi suatu perjanjian sewa yang mengandung elemen tanah dan bangunan.

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

**Sewa Operasi - sebagai Lessee**

Dalam sewa operasi, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**g. Aset Tetap**

Perusahaan memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam nilai tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat atas aset adalah sebagai berikut:

Bangunan prasarana	5 tahun/year
Kendaraan	3 - 5 tahun/years
Peralatan dan perlengkapan	2 tahun/years

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**f. Leases**

The Company applies PSAK No. 30 (Revised 2011), "Lease". The amendment to PSAK No. 30 prescribes that classification of each element as finance lease or operating lease separately, if leases comprise land and buildings.

The Company classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract, at inception date.

**Operating Lease - as Lessee**

Under an operating lease, the Company recognized lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

**g. Fixed Assets**

The Company chooses the cost model as a measurement of its fixed assets accounting policy.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Depreciation is computed using the estimated useful lives of the assets, as follows:

Leasehold improvement
Vehicle
Equipment and fixture

Depreciation is computed using straight-line method.

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**g. Aset Tetap (lanjutan)**

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode/tahun buku, manajemen mereviu nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap.

**h. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir periode/tahun pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (seperti aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

**i. Imbalan Kerja**

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-undang"). Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". PSAK revisi ini, antara lain, menghapus mekanisme koridor, mengatur pengakuan biaya jasa lalu serta mengatur beberapa pengungkapan tambahan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), perhitungan estimasi beban dan liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-undang ditentukan dengan metode penilaian aktuarial "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan dan kerugian aktuarial;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**g. Fixed Assets (continued)**

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the period/year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed at each financial period/year end.

**h. Impairment of Non-Financial Assets**

The Company assesses at each annual reporting period/year-end whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

**i. Employee Benefits**

The Company recognized unfunded employee benefits liabilities in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Law"). The Company adopted PSAK No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". The revised PSAK, among others, removes the corridor mechanism, stipulates that all past service costs are recognized and requires certain additional disclosures.

Under PSAK No. 24 (Revised 2013), the calculation of estimated employee benefits expense and liabilities under the Law is determined using the "Projected Unit Credit" valuation method.

Remeasurement on net defined benefit liability (asset), which recognized as other comprehensive income, consists of:

- i. Actuarial gain and losses;

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**i. Imbalan Kerja (lanjutan)**

- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto liabilitas (aset);
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyelesaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada penghasilan komprehensif lainnya pada periode/tahun di mana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

**j. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, telah dikurangi retur penjualan, diskon, rabat, dan tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Pendapatan diakui pada saat jasa pengiriman diberikan kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

**k. Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**i. Employee Benefits (continued)**

- ii. Return on program asset, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest;
- iii. Every changes in asset ceiling, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which recognized as other comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss in the next period.

Actuarial gain and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in period/year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

**j. Revenue and Expense Recognition**

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, net of returns, discounts, rebates and exclude value added taxes (VAT).

Revenue is recognized when courier service has been rendered to customer.

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

**k. Income Tax**

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax. Income tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**k. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinan perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang diperkirakan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**k. Income Tax (continued)**

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting dates between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting dates.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are recognized in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, except where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at each reporting date and adjusted based on availability of future taxable income.

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**k. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada periode/tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**l. Instrumen Keuangan**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

**Aset Keuangan**

**Pengakuan dan pengukuran awal**

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset lain-lain (uang jaminan), diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014).

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambahkan dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**k. Income Tax (continued)**

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period/year when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

**l. Financial Instruments**

The Company applied PSAK No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures".

**Financial Assets**

**Initial recognition and measurement**

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments or available-for-sale financial assets. The Company determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial year-end.

The Company's financial assets consist of cash on hand and in banks, trade receivables and other receivables and other assets (security deposits) which are classified and accounted for as loans and receivables under PSAK No. 55 (Revised 2014).

When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, and in the case of financial assets not being measured at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs are being added to the fair value.



**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**1. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (SBE), dan keuntungan dan kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Cadangan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang objektif bahwa Perusahaan tidak akan dapat menagih utang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan dalam Catatan di bawah ini.

**Penghentian pengakuan**

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**1. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Subsequent measurement**

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the Effective Interest Rate (EIR) method, and the related gains and losses are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

An allowance is made for uncollectible amounts when there is any objective evidence that the Company will not be able to collect the debt. Bad debts are written-off when identified. Further details on the accounting policy for impairment of financial assets are disclosed below in this Note.

**Derecognition**

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- i. the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- ii. the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**1. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penghentian pengakuan (lanjutan)**

Apabila Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan atau tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset baru diakui oleh Perusahaan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang merefleksikan hak dan kewajiban yang tetap dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**Penurunan nilai**

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**1. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Derecognition (continued)**

Where the Company has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset or has entered into a pass-through arrangement or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset nor transferred control of the financial asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset, is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Company could be required to repay.

In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

On the derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**Impairment**

The Company assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event"), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**I. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penurunan nilai (lanjutan)**

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan secara individual apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**I. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Impairment (continued)**

*Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.*

Financial Assets Carried at Amortized Cost

*For loans and receivables carried at amortized cost, the Company first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.*

*If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be recognized, are not included in a collective assessment or impairment.*

*When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred). The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is directly recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**I. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**Penurunan nilai (lanjutan)**

Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Jika, dalam periode/tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun cadangan penurunan nilai. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai kini atas estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan SBE awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah SBE yang berlaku.

**Liabilitas Keuangan**

**Pengakuan awal dan pengukuran**

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dicatat pada nilai wajar dan, dalam hal utang dan pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**I. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**Impairment (continued)**

Financial Assets Carried at Amortized Cost (continued)

If, in the subsequent period/year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced (recovered) by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovered amount of financial assets is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets' original EIR. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current EIR.

**Financial Liabilities**

**Initial recognition and measurement**

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially recognized at their fair values and, in case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**I. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil yang diperoleh, dikurangi biaya penerbitan instrumen ekuitas.

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen sejenis yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, dipisahkan antara liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen liabilitas diestimasi dengan menggunakan suku bunga yang berlaku di pasar untuk instrumen *non-convertible* yang serupa. Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas dengan dasar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan liabilitas tersebut berakhir melalui konversi atau pada tanggal instrumen jatuh tempo. Komponen ekuitas ditentukan dengan cara mengurangi jumlah komponen liabilitas dari keseluruhan nilai wajar instrumen keuangan majemuk. Jumlah tersebut diakui dan dicatat dalam ekuitas, dikurangi dengan efek pajak penghasilan terkait, dan tidak diukur kembali setelah pengakuan awal.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman.

**Pengukuran setelah pengakuan awal**

Liabilitas keuangan Perusahaan mencakup utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, utang pembiayaan konsumen dan utang obligasi konversi.

Setelah pengakuan awal, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, utang pembiayaan konsumen dan utang obligasi konversi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**I. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

**Initial recognition and measurement (continued)**

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs

Compound financial instruments, a bond or similar instrument convertible by the holder into a fixed number of ordinary shares, are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. At the date of issuance of compound financial instruments, the fair value of the liability component is estimated using the prevailing market interest rate for a similar non-convertible instrument. This amount is recorded as a liability on an amortized cost basis using the effective interest method until extinguished upon conversion or at the instrument's maturity date. The equity component is determined by deducting the amount of the liability component from the fair value of the compound financial instruments as a whole. This amount is recognized and included in equity, net of income tax effects, and is not subsequently remeasured.

As of reporting date of the financial statements, the Company has no other financial liabilities other than those classified as loans and borrowings.

**Subsequent measurement**

The Company's financial liabilities include trade payables, other payables, accrued liabilities, consumer financing payables and convertible bonds payable.

After initial recognition, trade payables, other payables, accrued liabilities, consumer financing payables and convertible bonds payable are measured at amortized cost using the EIR.

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**1. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**Penghentian pengakuan**

Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika entitas menghapuskan instrumen dapat dikonversi sebelum jatuh tempo melalui penebusan atau pembelian kembali secara dini yang tidak mengubah hak konversi semula, maka entitas mengalokasikan imbalan yang dibayarkan dan biaya transaksi komponen ekuitas instrumen tersebut pada tanggal transaksi. Metode yang digunakan untuk mengalokasikan imbalan yang dibayarkan dan biaya transaksi ke komponen terpisah adalah konsisten dengan metode yang digunakan untuk alokasi awal ke komponen terpisah atas hasil yang diperoleh dari penerbitan instrumen dapat dikonversi tersebut.

Sekali alokasi imbalan tersebut dilakukan, maka setiap keuntungan atau kerugian yang timbul diperlakukan sesuai prinsip akuntansi yang dapat diterapkan pada komponen terkait, (a) jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan komponen liabilitas diakui dalam laba rugi; dan (b) jumlah imbalan yang terkait dengan komponen ekuitas diakui dalam ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**1. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

**Derecognition**

*A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.*

*When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

*When an entity extinguishes a convertible instrument before maturity through an early redemption or repurchase in which the original conversion privileges are unchanged, the entity allocates the consideration paid and any transaction costs for the repurchase or redemption to the liability and equity components of the instrument at the date of the transaction. The method used in allocating the consideration paid and transaction costs to the separate components is consistent with that used in the original allocation to the separate components of the proceeds received by the entity when the convertible instrument was issued.*

*Once the allocation of the consideration is made, any resulting gain or loss is treated in accordance with accounting principles applicable to the related component, (a) the amount of gain or loss relating to the liability component is recognized in profit or loss; and (b) the amount of consideration relating to the equity component is recognized in equity.*

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**1. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar pada akhir tanggal pelaporan, tanpa pengurangan untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian yang diizinkan oleh PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar" mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini.

**Biaya Perolehan yang Diamortisasi dari Instrumen Keuangan**

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode SBE dikurangi penyisihan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**m. Informasi Segmen**

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**1. Financial Instruments (continued)**

**Offsetting of Financial Instruments**

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**Fair Value of Financial Instruments**

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices at the end of the reporting date, without any deduction for transaction costs.

For financial instruments where there is no active market, the fair value is determined using appropriate valuation techniques permitted by PSAK No. 68, "Fair Value Measurement" assumes that the asset or liability is exchanged in orderly transaction between market participants to sell the asset or transfer the liability at the measurement date in current market conditions.

**Amortized Cost of Financial Instruments**

Amortized cost is computed using the EIR method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

**m. Segment Information**

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**m. Informasi Segmen (lanjutan)**

Jumlah setiap unsur segmen yang dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**n. Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, namun diungkapkan kecuali jika kemungkinan akan terjadinya arus kas keluar berkaitan dengan kewajiban tersebut sangat kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan apabila kemungkinan diperolehnya arus kas masuk dari aset tersebut cukup besar.

**o. Rugi per Saham**

Rugi per saham dasar dihitung dengan membagi rugi periode/tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**m. Segment Information (continued)**

The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the chief operating decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

**n. Provisions and Contingencies**

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements, but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements, but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**o. Loss per Share**

Basic loss per share amounts are computed by dividing the loss for the period/year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period/year.



**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**o. Rugi per Saham (lanjutan)**

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 dan 31 Desember 2017 dan 2016, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Obligasi konversi Perusahaan berpotensi antidilutif pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 dan 31 Desember 2017 dan 2016.

**p. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 70 (2016), "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU Pengampunan Pajak") yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset atau liabilitas yang diakui (PSAK No. 70 Par. 06) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 10 hingga 23 PSAK No. 70 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh entitas harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Perusahaan mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya sesuai dengan SAK yang relevan untuk masing-masing aset atau liabilitas.

**q. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan**

Peristiwa setelah akhir periode/tahun yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**o. Loss per Share (continued)**

*The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of March 31, 2018 and 2017 and December 31, 2017 and 2016, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income.*

*The Company's convertible bonds were potentially antidilutive as of March 31, 2018 and 2017 and December 31, 2017 and 2016.*

**p. Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities**

*The Company applies PSAK No. 70 (2016), "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities".*

*This PSAK provides accounting treatment for assets and liabilities from Tax Amnesty in accordance with Law No. 11 year 2016 about Tax Amnesty ("Tax Amnesty Law") which became effective on July 1, 2016.*

*PSAK No. 70 provides options in the initial recognition of the assets or liabilities arising from the implementation of the Tax Amnesty Law, whether to follow the relevant existing SAK according to the nature of the assets or liabilities recognized (General Approach) or to follow the provisions stated in PSAK No. 70 paragraphs 10 to 23 (Optional Approach). The decision made by the entity must be consistent for all recognized tax amnesty assets and/or liabilities.*

*The Company recognized its tax amnesty assets and liabilities in its financial statements in accordance with the relevant SAK for each asset or liability.*

**q. Events After Reporting Date**

*Post period/year-end events that need adjustments and provide additional information about the Company's position at the reporting date (adjusting event) are reflected in the financial statements.*

*Any post reporting date event that is not an adjusting event is disclosed in the notes to the financial statements when material.*

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN**

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir tanggal pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 21.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang - Evaluasi Individual

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu yang mana diketahui bahwa pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY**

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting date. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

**Judgments**

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 21.

Allowance for Impairment of Receivables - Individual Assessment

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of receivables. Further details are disclosed in Note 5.

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN**  
(lanjutan)

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Company. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan Kerja

Penentuan biaya liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode/tahun terjadinya. Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2i dan 13.

Penyusutan Aset Tetap

Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 5 tahun. Ini merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2g dan 8.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY**  
(continued)

**Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period/year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Employee Benefits

The determination of the Company's cost for employee benefits liabilities depends on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the Company's assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period/year which they occur. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Notes 2i and 13.

Depreciation of Fixed Assets

Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 2 to 5 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2g and 8.

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the Financial Statements**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu berdasarkan nilai wajar pada pengakuan awal, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan (Catatan 20).

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**4. KAS DAN BANK**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
<b>Kas</b>	945.011.237	1.509.623.042	226.232.969	122.176.214	<b>Cash on hand</b>
<b>Kas di bank</b>					<b>Cash in banks</b>
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.354.929.597	6.436.179.751	26.278.691.944	191.791.022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	380.996.379	650.289.719	153.457.506	247.497.225	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	186.125.163	43.682.101	13.203.565	1.566.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Panin Tbk	160.084.659	24.172.204	1.797.476	168.709.799	PT Bank Panin Tbk
PT Bank UOB Indonesia	111.469.028	1.615.676	1.555.542	498.478.565	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	65.156.575	710.305.025	44.217.862	197.860.346	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank MNC International Tbk	51.582.307	1.491.642	7.301.643	3.100.160	PT Bank MNC International Tbk
PT QNB Bank					PT QNB Bank
Kesawan Tbk	47.525.033	1.317.129	1.333.903	-	Kesawan Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	29.485.284	8.651.416	1.305.000	-	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	24.748.261	6.489.274	-	-	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	20.463.338	15.704.432	132.354.154	228.042.306	PT Bank Permata Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	11.743.319	10.350.144	71.242.328	125.553.748	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Financial Instruments

The Company recorded certain financial assets and liabilities initially based on fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Company's statements of profit or loss and other comprehensive income (Note 20).

Income Tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

**4. CASH ON HAND AND IN BANKS**

This account consists of:

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the Financial Statements**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. KAS DAN BANK (lanjutan)**

**4. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)**

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
<b>Kas di bank (lanjutan)</b>					<b>Cash in banks (continued)</b>
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6.134.137	6.114.503	62.315.679	14.343.323	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	5.859.683	6.027.683	17.549.939	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.569.249	77.103.707	11.020.050	669.000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	3.918.703	3.948.703	42.933.662	-	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.800.035	-	-	1.644.210	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk	1.825.541	1.685.336	601.023.994	41.224.719	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.352.878	1.854.650	-	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Commonwealth	1.196.000	1.244.000	1.436.000	-	PT Bank Commonwealth
<b>Total</b>	<b>17.417.976.406</b>	<b>9.517.850.137</b>	<b>27.668.973.216</b>	<b>1.842.656.637</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat kas dan bank yang tidak dapat digunakan oleh Perusahaan.

As of March 31, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015, the Company has no cash on hand and in banks restricted for use.

**5. PIUTANG USAHA**

**5. TRADE RECEIVABLES**

Rincian atas piutang usaha berdasarkan lokasi geografis adalah sebagai berikut:

Details of trade receivables based on geographical location are as follows:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Pihak Ketiga					Third Parties
Jabodetabek	24.298.924.115	18.968.388.847	13.678.196.416	17.153.718.533	Jabodetabek
Di luar Jabodetabek	3.295.111.079	4.402.165.553	2.475.634.557	1.765.420.922	Outside Jabodetabek
<b>Sub-total</b>	<b>27.594.035.194</b>	<b>23.370.554.400</b>	<b>16.153.830.973</b>	<b>18.919.139.455</b>	<b>Sub-total</b>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(2.534.798.240)	(2.534.798.240)	-	-	Less: Allowance for impairment loss on receivables
<b>Neto</b>	<b>25.059.236.954</b>	<b>20.835.756.160</b>	<b>16.153.830.973</b>	<b>18.919.139.455</b>	<b>Net</b>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment loss on receivables:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
Saldo awal periode/tahun	2.534.798.240	-	-	-	- Balance at beginning of period/year
Cadangan selama periode/tahun berjalan	-	2.534.798.240	-	-	Provision during the period/year
<b>Saldo akhir periode/tahun</b>	<b>2.534.798.240</b>	<b>2.534.798.240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Balance at end of period/year</b>

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga**  
**Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017**  
**(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
**Three-Month Period Ended March 31, 2018 and**  
**Year Ended December 31, 2017**  
**(With Comparative Figures for the Three-Month**  
**Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and**  
**Years Ended December 31, 2016 and 2015)**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
Belum jatuh tempo	8.697.605.276	7.304.853.401	-	-	Not yet due
Jatuh tempo:					Due:
Sampai dengan 30 hari	9.694.404.418	6.788.276.336	8.076.915.486	9.459.569.727	up to 30 days
31 - 90 hari	3.520.515.164	3.401.355.747	5.653.840.841	6.621.698.809	31 - 90 days
> 90 hari	5.681.510.336	5.876.068.916	2.423.074.646	2.837.870.919	> 90 days
<b>Sub-total</b>	<b>27.594.035.194</b>	<b>23.370.554.400</b>	<b>16.153.830.973</b>	<b>18.919.139.455</b>	<b>Sub-total</b>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(2.534.798.240)	(2.534.798.240)	-	-	Less: Allowance for impairment loss on receivables
<b>Neto</b>	<b>25.059.236.954</b>	<b>20.835.756.160</b>	<b>16.153.830.973</b>	<b>18.919.139.455</b>	<b>Net</b>

Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai telah dicadangkan dengan nilai yang cukup untuk menutup terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

The aging analysis of trade receivables are as follows:

Management is of the opinion that the allowance was adequate to cover incurred losses from the non-collection of trade receivables.

**6. PIUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
<b>Rupiah Pihak Ketiga</b>					<b>Rupiah Third Parties</b>
Karyawan	1.437.138.810	1.402.739.344	1.143.133.856	248.092.075	Employees
Agen	14.000.000	184.136.324	780.216.660	93.900.000	Agents
Lain-lain	13.131.000	48.286.798	59.000.000	34.000.000	Others
<b>Total</b>	<b>1.464.269.810</b>	<b>1.635.162.466</b>	<b>1.982.350.516</b>	<b>375.992.075</b>	<b>Total</b>

Piutang karyawan timbul karena adanya pinjaman karyawan kepada Perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi karyawan Perusahaan. Piutang karyawan akan ditagihkan melalui pemotongan gaji bulanan.

This account consists of:

Other receivables from employees arise from employees' borrowing to the Company used for employees' personal needs. Employee receivables will be collected through monthly salary deduction.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

Management is of the opinion that all other receivables are fully collectible, therefore, no allowance for impairment of other receivables is required.

**7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
Sewa dibayar dimuka	2.420.761.799	2.560.211.010	2.860.038.632	1.772.743.146	Prepaid rent
Uang muka operasional dan pembelian aset tetap	185.730.448	24.405.598	9.949.399	-	Advance payment for operational and purchase for fixed asset
<b>Total</b>	<b>2.606.492.247</b>	<b>2.584.616.608</b>	<b>2.869.988.031</b>	<b>1.772.743.146</b>	<b>Total</b>

**7. PREPAID EXPENSE AND ADVANCE PAYMENT**

This account consists of:

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA**  
**(lanjutan)**

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa atas bangunan yang digunakan sebagai kantor cabang Perusahaan.

**7. PREPAID EXPENSE AND ADVANCE PAYMENT**  
**(continued)**

Prepaid rent expense represents lease of building used as Company branch office.

**8. ASET TETAP**

**8. FIXED ASSETS**

31 Maret 2018/March 31, 2018

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Cost</b>
Bangunan prasarana	2.488.523.430	-	-	2.488.523.430	Leasehold Improvements
Kendaraan	7.237.634.530	-	-	7.237.634.530	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	3.797.223.884	449.884.000	-	4.247.107.884	Equipment and fixtures
<b>Sub-total</b>	<b>13.523.381.844</b>	<b>449.884.000</b>	<b>-</b>	<b>13.973.265.844</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Bangunan prasarana	218.037.284	124.426.176	-	342.463.460	Leasehold Improvements
Kendaraan	1.552.276.564	424.814.946	-	1.977.091.510	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	2.395.805.881	315.948.663	-	2.711.754.544	Equipment and fixtures
<b>Sub-total</b>	<b>4.166.119.729</b>	<b>865.189.785</b>	<b>-</b>	<b>5.031.309.514</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Nilai Tercatat</b>	<b>9.357.262.115</b>			<b>8.941.956.330</b>	<b>Carrying Value</b>

31 Desember 2017/December 31, 2017

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Cost</b>
Bangunan prasarana	-	2.488.523.430	-	2.488.523.430	Leasehold improvements
Kendaraan	2.067.607.536	5.170.026.994	-	7.237.634.530	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	2.102.677.574	1.694.546.310	-	3.797.223.884	Equipment and fixtures
<b>Sub-total</b>	<b>4.170.285.110</b>	<b>9.353.096.734</b>	<b>-</b>	<b>13.523.381.844</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Bangunan prasarana	-	218.037.284	-	218.037.284	Leasehold improvements
Kendaraan	387.814.851	1.164.461.713	-	1.552.276.564	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	1.589.238.738	806.567.143	-	2.395.805.881	Equipment and fixtures
<b>Sub-total</b>	<b>1.977.053.589</b>	<b>2.189.066.140</b>	<b>-</b>	<b>4.166.119.729</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Nilai Tercatat</b>	<b>2.193.231.521</b>			<b>9.357.262.115</b>	<b>Carrying Value</b>

31 Desember 2016/December 31, 2016

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
<b>Biaya Perolehan</b>					<b>Acquisition Cost</b>
Kendaraan	1.003.542.146	1.064.065.390	-	2.067.607.536	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	1.564.324.324	538.353.250	-	2.102.677.574	Equipment and fixtures
<b>Sub-total</b>	<b>2.567.866.470</b>	<b>1.602.418.640</b>	<b>-</b>	<b>4.170.285.110</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Kendaraan	169.372.004	218.442.847	-	387.814.851	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan	861.130.434	728.108.304	-	1.589.238.738	Equipment and fixtures
<b>Sub-total</b>	<b>1.030.502.438</b>	<b>946.551.151</b>	<b>-</b>	<b>1.977.053.589</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Nilai Tercatat</b>	<b>1.537.364.032</b>			<b>2.193.231.521</b>	<b>Carrying Value</b>

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. ASET TETAP (lanjutan)**

**8. FIXED ASSETS (continued)**

31 Desember 2015/December 31, 2015				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance
<u>Kepemilikan langsung</u>				<u>Direct ownership</u>
<b>Biaya Perolehan</b>				<b>Acquisition Cost</b>
Kendaraan	-	1.003.542.146	-	1.003.542.146
Peralatan dan perlengkapan	1.166.963.204	397.361.120	-	1.564.324.324
<b>Sub-total</b>	<b>1.166.963.204</b>	<b>1.400.903.266</b>	<b>-</b>	<b>2.567.866.470</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				<b>Accumulated Depreciation</b>
Kendaraan	-	169.372.004	-	169.372.004
Peralatan dan perlengkapan	201.370.764	659.759.670	-	861.130.434
<b>Sub-total</b>	<b>201.370.764</b>	<b>829.131.674</b>	<b>-</b>	<b>1.030.502.438</b>
<b>Nilai Tercatat</b>	<b>965.592.440</b>			<b>1.537.364.032</b>
				<b>Carrying Value</b>

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation is charged as follows:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
Beban langsung (Catatan 18)	424.814.946	103.380.375	1.164.461.713	218.442.847	169.372.004	Direct cost (Note 18) General and administrative expense (Note 19)
Beban umum dan administrasi (Catatan 19)	440.374.839	124.111.567	1.024.604.427	728.108.304	659.759.670	
<b>Total Beban Penyusutan</b>	<b>865.189.785</b>	<b>227.491.942</b>	<b>2.189.066.140</b>	<b>946.551.151</b>	<b>829.131.674</b>	<b>Total Depreciation Expense</b>

Tidak terdapat aset tetap diasuransikan.

Fixed assets are not insured.

Pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, beberapa kendaraan dijadikan jaminan untuk utang pembiayaan konsumen (Catatan 14).

As of March 31, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015, certain vehicles were used as collateral for consumer financing payables (Note 14).

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen Perusahaan, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Based on the evaluation of the Company's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of fixed assets as of March 31, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015.

**9. UTANG USAHA**

**9. TRADE PAYABLES**

Utang usaha Perusahaan merupakan pembelian kepada pihak ketiga terkait kegiatan operasional Perusahaan masing-masing sebesar Rp5.159.306.520, Rp3.911.364.596, Rp464.574.897 dan Rp227.490.367 pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Company's trade payables consist of purchases to third parties in relation with the Company's daily operations amounted to Rp5,159,306,520, Rp3,911,364,596, Rp464,574,897 and Rp227,490,367 as of March 31, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively.

Pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, utang usaha Perusahaan berdenominasi dalam mata uang Rupiah.

As of March 31, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015, the Company's trade payables are denominated in Rupiah.



**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. UTANG LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan utang atas transaksi *cash on delivery* yang tidak dikenakan bunga, dengan jangka waktu pembayaran kurang lebih satu minggu, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Pihak Berelasi (Catatan 24)	7.871.735.250	7.634.912.494	4.906.683.784	37.382.443.132	Related Party (Note 24)
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Pihak Ketiga					Third Parties
PT Sophie Paris Indonesia	1.768.281.108	1.378.163.790	-	-	PT Sophie Paris Indonesia
PT Kargolink Intrada International	1.249.569.683	72.422.888	-	-	PT Kargolink Intrada International
2wtrade LLP	639.549.506	639.549.506	280.000.000	-	2wtrade LLP
PT Acommerce Logistik Lestari	-	-	1.301.779.437	1.140.462.446	PT Acommerce Logistik Lestari
Lain-lain	1.244.253.742	849.543.336	1.805.318.934	676.637.554	Others
<b>Sub-total</b>	<b>4.901.654.039</b>	<b>2.939.679.520</b>	<b>3.387.098.371</b>	<b>1.817.100.000</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Total</b>	<b>12.773.389.289</b>	<b>10.574.592.014</b>	<b>8.293.782.155</b>	<b>39.199.543.132</b>	<b>Total</b>

**10. OTHER PAYABLES**

This account represents payables arising from *cash on delivery* transactions which are non-interest bearing, to be settled approximately a week, with details as follows:

**11. PERPAJAKAN**

**a. Utang Pajak**

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
Pajak penghasilan:					Income taxes:
Pasal 21	41.686.563	34.356.363	-	24.389.106	Article 21
Pasal 23	443.493.359	245.961.046	50.072.218	1.865.264	Article 23
Pasal 29	-	-	5.165.207	-	Article 29
Pajak pertambahan nilai	356.371.632	398.852.347	94.175.596	78.818.892	Value-added tax
Lainnya	11.785.201	11.785.201	-	-	Others
<b>Total</b>	<b>853.336.755</b>	<b>690.954.957</b>	<b>149.413.021</b>	<b>105.073.262</b>	<b>Total</b>

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, total pembayaran yang dilakukan Perusahaan atas saldo utang pajak tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp835.050.164.

As of the completion date of the financial statements, total payment made on the Company's outstanding income taxes payable as of March 31, 2018 amounted to Rp835,050,164.

**b. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak (rugi fiskal) adalah sebagai berikut:

**b. Current Tax**

The reconciliation between loss before income tax expense (benefit) as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income (fiscal loss) is as follows:

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga**  
**Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017**  
**(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
**Three-Month Period Ended March 31, 2018 and**  
**Year Ended December 31, 2017**  
**(With Comparative Figures for the Three-Month**  
**Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and**  
**Years Ended December 31, 2016 and 2015)**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Pajak Kini (lanjutan)**

	31 Desember/December 31,			
	31 Maret 2018/ March 31, 2018	2017	2016	2015
Rugi sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	(1.829.963.867)	(18.416.092.765)	(614.168.334)	(10.402.961.607)
<b>Beda waktu:</b>				
Obligasi konversi	444.872.947	1.657.267.693	137.179.701	-
Aset tetap	363.215.107	777.929.750	407.150.546	418.919.083
Imbalan kerja karyawan	781.567	3.393.081	2.833.965	2.331.911
Cadangan penyisihan piutang	-	2.534.798.240	-	-
Sub-total	808.869.621	4.973.388.764	547.164.212	421.250.994
<b>Beda tetap:</b>				
Beban yang tidak dapat dikurangkan	979.216.612	2.963.039.850	1.591.239.865	89.322.557
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(69.653.458)	(401.031.405)	(36.833.425)	(5.705.457)
Sub-total	909.563.154	2.562.008.445	1.554.406.440	83.617.100
Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal)	(111.531.092)	(10.880.695.556)	1.487.402.318	(9.898.093.513)
Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal) (pembulatan)	(111.531.000)	(10.880.695.000)	1.487.402.000	(9.898.093.000)
<b>Beban Pajak Kini</b>	-	-	<b>371.850.500</b>	-
Pajak penghasilan dibayar dimuka Pasal 25	-	-	(366.685.293)	-
<b>Taksiran Utang Pajak Penghasilan Badan</b>	-	-	<b>5.165.207</b>	-

Loss before income tax expense (benefit) per statements of comprehensive income

**Temporary differences:**  
 Convertible bonds  
 Fixed assets  
 Employee benefits  
 Allowance for doubtful account

**Permanent differences:**  
 Non-deductible expenses  
 Income already subject to final tax

Estimated taxable income (fiscal loss)

Estimated taxable income (fiscal loss) (rounded)

**Current Tax Expense**  
 Prepaid income taxes  
 Article 25

**Estimated Corporate Income Tax Payables**

Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan untuk pelaporan SPT tahun buku 2015, 2016, dan 2017.

Taxable income (fiscal loss) of the Company resulting from the reconciliation above became the basis for filing the Corporate Annual Tax Returns for fiscal years 2015, 2016, and 2017.

**c. Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan posisi keuangan komersial dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

**c. Deferred Tax**

Deferred tax is calculated based on temporary differences between the carrying value of total assets and liabilities recorded according to the commercial statements of financial positions and tax bases of assets and liabilities. Details of deferred tax assets (liability) are as follows:

31 Maret 2018/March 31, 2018					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ Credited to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain / Charged to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset tetap	429.099.617	90.803.776	-	519.903.393	Fixed assets
Cadangan penyisihan piutang	633.699.560	-	-	633.699.560	Allowance for doubtful account
Liabilitas imbalan kerja	2.376.877	195.392	(477.844)	2.094.425	Employee benefits liability
Utang obligasi konversi	(1.970.533.033)	111.218.237	-	(1.859.314.796)	Convertible bonds payable
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - neto</b>	<b>(905.356.979)</b>	<b>202.217.405</b>	<b>(477.844)</b>	<b>(703.617.418)</b>	<b>Deferred Tax Liability - net</b>

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**11. TAXATION (continued)**

**c. Pajak Tangguhan (lanjutan)**

**c. Deferred Tax (continued)**

31 Desember 2017/December 31, 2017

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ Credited to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset tetap	234.617.178	194.482.439	-	429.099.617	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	1.467.466	848.270	61.141	2.376.877	Employee benefits liability
Cadangan penyisihan piutang	-	633.699.560	-	633.699.560	Allowance for doubtful account
Utang obligasi konversi	(2.384.849.956)	414.316.923	-	(1.970.533.033)	Convertible bonds payable
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan - neto</b>	<b>(2.148.765.312)</b>	<b>1.243.347.192</b>	<b>61.141</b>	<b>(905.356.979)</b>	<b>Deferred Tax Liability - net</b>

31 Desember 2016/December 31, 2016

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ Credited to Profit or Loss	Dikreditkan ke Rugi Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Loss	Dibebankan ke ekuitas Charged to Equity (Catatan 15/ Note 15)	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset tetap	132.829.541	101.787.637	-	-	234.617.178	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	754.021	708.491	4.954	-	1.467.466	Employee benefits liability
Utang obligasi konversi	-	34.294.925	-	(2.419.144.881)	(2.384.849.956)	Convertible bonds payable
<b>Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan - Neto</b>	<b>133.583.562</b>	<b>136.791.053</b>	<b>4.954</b>	<b>(2.419.144.881)</b>	<b>(2.148.765.312)</b>	<b>Deferred Tax Asset (Liability) - Net</b>

31 Desember 2015/December 31, 2015

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ Credited to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset tetap	28.099.770	104.729.771	-	132.829.541	Fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	196.356	582.978	(25.313)	754.021	Employee benefits liability
<b>Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>28.296.126</b>	<b>105.312.749</b>	<b>(25.313)</b>	<b>133.583.562</b>	<b>Deferred Tax Assets</b>

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut dapat digunakan seluruhnya terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Management of the Company is of the opinion that the above deferred tax assets may be utilized against taxable income in the future.

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Tangguhan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp2.748.056.661 dan Rp2.720.173.889 yang berasal dari akumulasi rugi fiskal Perusahaan masing-masing sebesar Rp10.992.226.647 dan Rp10.880.695.556 karena manajemen Perusahaan berkeyakinan aset pajak tangguhan tersebut tidak akan dapat digunakan. Rugi fiskal Perusahaan akan kadaluwarsa antara tahun 2022 hingga 2023.

**d. Beban Pajak Penghasilan**

Rekonsiliasi antara beban (manfaat) pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari rugi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
Rugi sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	(1.829.963.867)	(2.261.224.993)	(18.416.092.765)	(614.168.334)	(10.402.961.607)	Loss before income tax expense (benefits) per statements of comprehensive income
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	(457.490.966)	(565.306.248)	(4.604.023.191)	(153.542.083)	(2.600.740.401)	Tax calculated based on applicable tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap Perusahaan	227.390.789	45.987.482	640.502.110	388.601.530	20.904.275	Tax effect of the Company's permanent differences
Pengaruh pajak atas asset pajak tangguhan yang tidak diakui	27.882.772	150.099.556	2.720.173.889	-	2.474.523.377	Tax effect of the Company's unrecognized deferred tax asset
<b>Total</b>	<b>(202.217.405)</b>	<b>(369.219.210)</b>	<b>(1.243.347.192)</b>	<b>235.059.447</b>	<b>(105.312.749)</b>	<b>Total</b>

**e. Ketetapan Pajak**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2017 dari Direktorat Jenderal Pajak sejumlah Rp21.964.112. Perusahaan tidak mengajukan keberatan atas STP tersebut.

**11. TAXATION (continued)**

**c. Deferred Tax (continued)**

As of March 31, 2018 and December 31, 2017, the Company did not provide deferred tax asset amounting to Rp2,748,056,661 and Rp2,720,173,889, respectively for the accumulated tax loss of the Company amounting to Rp10,992,226,647 and Rp10,880,695,556, respectively since the Company's management expects that deferred tax asset will not be utilized. The fiscal losses of the Company will expire on periods between 2022 and 2023.

**d. Income Tax Expense**

The reconciliation between the income tax expense (benefit) calculated by applying the applicable tax rate on the loss before tax expense (benefits) as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

**e. Tax Assessments**

For the year ended December 31, 2017, the Company received Tax Collection Letter (STP) of Income Taxes Article 21, Income Taxes Article 23, Income Taxes Article 25 and Value Added Tax for fiscal year 2017 from Directorate General of Taxes amounting to Rp21,964,112. The Company did not appeal an objection to the assessment.

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**f. Pengampunan Pajak**

Pada bulan Desember 2016, Perusahaan berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 ("UU Pengampunan Pajak"). Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) tertanggal 20 Desember 2016, dengan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berupa uang tunai dan tabungan sebesar Rp346.808.492 dan membayar uang tebusan sebesar Rp10.404.255 pada tanggal 8 Desember 2016, yang dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

**11. TAXATION (continued)**

**f. Tax Amnesty**

In December 2016, the Company participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016 ("Tax Amnesty Law"). The Company obtained Tax Amnesty Acknowledgement Letter (SKPP) dated December 20, 2016, with amounts recognized as tax amnesty asset of cash on hand and cash in banks amounting to Rp346,808,492 and paid the related redemption money amounting to Rp10,404,255 on December 8, 2016, which were charged to the current year profit or loss.

**12. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
Gaji, bonus dan tunjangan lain	1.092.466.916	693.839.889	306.176.250	-	Salaries, bonus and other allowances
Jasa profesional	500.000.000	357.500.000	92.403.845	-	Professional fee
Sewa (Catatan 24)	58.333.331	33.333.332	-	-	Rent (Note 24)
Lain-lain	-	-	107.036.498	-	Others
<b>Total</b>	<b>1.650.800.247</b>	<b>1.084.673.221</b>	<b>505.616.593</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

**12. ACCRUED LIABILITIES**

This account consists of:

**13. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

**Program Manfaat Karyawan**

Perusahaan menghitung dan membukukan beban imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2018 (dengan angka perbandingan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015) dihitung oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaris independen masing-masing dalam laporannya tertanggal 5 Juni 2018.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Usia Pensiun Normal	55 Tahun/Years	Normal Pension Age
Tingkat Diskonto	7,38% (2017:6,92%; 2016:8,29%; 2015:9,04%)	Discount Rate
Estimasi Kenaikan Gaji di Masa Datang	8%	Estimated Future Salary Increase
Tabel Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia/Indonesian Mortality Table (TMI-3)	Mortality Table
Tingkat Cacat	10% dari Tabel Mortalita/of Mortality Table	Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri	<30 tahun/years old : 6% menurun secara linear dari 6% hingga 0% pada usia 2 tahun sebelum usia pensiun/linearly decreased from 6% to 0% 2 years before retirement age	Resignation Rate
Metode	Projected Unit Credit	Method

**13. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY**

**Employee Benefits Program**

The Company calculated and recorded the employee benefits expense based on Labor Law No. 13 Year 2003. The employee benefits liability as of March 31, 2018 (with comparative figures as of December 31, 2017, 2016 and 2015) is calculated by PT Sentra Jasa Aktuaria, independent actuary, in its report dated June 5, 2018.

Actuarial assumptions used in determining the employee benefits expense and liability are as follows:

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
**Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017**  
**(With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)**

**13. Employee Benefits Liability (continued)**

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movement of employee benefits liability in the statements of financial position is as follows:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
Saldo awal periode/tahun	9.507.510	5.869.864	3.016.082	785.423	Balance at the beginning of the period/year
Beban imbalan kerja periode/tahun berjalan	781.567	3.393.081	2.833.965	2.331.911	Current period/year employee benefit expense
Rugi (penghasilan) komprehensif lain periode/tahun berjalan	(1.911.376)	244.565	19.817	(101.252)	Current period/year other comprehensive loss (income)
<b>Saldo Akhir Periode/Tahun</b>	<b>8.377.701</b>	<b>9.507.510</b>	<b>5.869.864</b>	<b>3.016.082</b>	<b>Balance at the End of the Period/Year</b>

Perubahan atas nilai kini liabilitas imbalan pasti sebagai berikut:

Changes in the present value of defined benefit obligation are as follows:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
Saldo awal periode/tahun	9.507.510	5.869.864	3.016.082	785.423	Balance at the beginning of the period/year
Beban jasa kini	630.796	2.908.581	2.562.687	2.267.259	Current service cost
Beban bunga	164.481	486.611	272.654	65.032	Interest cost
Dampak penyesuaian pengalaman	(1.925.086)	242.454	18.441	(101.632)	Experience adjustment
<b>Saldo Akhir Periode/Tahun</b>	<b>8.377.701</b>	<b>9.507.510</b>	<b>5.869.864</b>	<b>3.016.082</b>	<b>Balance at the End of the Period/Year</b>

Rincian beban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits expense are as follows:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
Beban jasa kini	630.796	727.145	2.908.581	2.562.687	2.267.259	Current service cost
Beban bunga	164.481	121.653	486.611	272.654	65.032	Interest cost
Perubahan atas manfaat jangka panjang lainnya	(13.710)	(528)	(2.111)	(1.376)	(380)	Changes in other long-term employee benefits
<b>Total</b>	<b>781.567</b>	<b>848.270</b>	<b>3.393.081</b>	<b>2.833.965</b>	<b>2.331.911</b>	<b>Total</b>

Analisis umur liabilitas imbalan kerja yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of undiscounted employee benefit liabilities as of March 31, 2018 is as follows:

	Sampai dengan 1 tahun/ Up to 1 year	1 - 5 tahun/ years	5 - 10 tahun/ years	Lebih dari 10 tahun/ More than 10 years	Total/ Total	
Liabilitas imbalan kerja	459.310	2.711.785	9.242.283	164.385.898	176.799.276	Employee benefits liability

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga**  
**Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017**  
**(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
**Three-Month Period Ended March 31, 2018 and**  
**Year Ended December 31, 2017**  
**(With Comparative Figures for the Three-Month**  
**Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and**  
**Years Ended December 31, 2016 and 2015)**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

**Dampak atas kewajiban imbalan pasti/**  
**Impact on employee benefit liabilities**

	<b>Perubahan Asumsi/ Change in Assumption</b>	<b>Kenaikan Asumsi/ Increase in Assumption</b>	<b>Penurunan Asumsi/ Decrease in Assumption</b>
Tingkat diskonto	1%	7.486.113	9.422.491
Tingkat kenaikan gaji	1%	9.405.693	7.483.186

Manajemen Perusahaan telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Perusahaan.

**13. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

The sensitivity of employee benefit liability to changes in the principal assumptions is as follow:

The management of the Company has reviewed the assumptions used and agreed that these assumptions are adequate. Management believes that the liability for employee benefits is sufficient to cover the Company's liability for its employee benefits.

**14. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan dari PT Mandiri Tunas Finance yang akan jatuh tempo pada Oktober 2018 dan 2019, PT Astra Sedaya Finance yang akan jatuh tempo pada Februari 2018 dan 2019, Mei dan Juni 2018 dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang akan jatuh tempo pada September 2018, Mei dan Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut:

**14. CONSUMER FINANCING PAYABLES**

The Company has consumer financing payable agreements for vehicles with PT Mandiri Tunas Finance which will mature on October 2018 and 2019, PT Astra Sedaya Finance which will mature on February 2018 and 2019, May and June 2018 and PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk which will mature on September 2018, May and June 2021, with the following details:

	<b>31 Maret 2018/ March 31, 2018</b>	<b>31 Desember/December 31,</b>			
		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
Tahun 2016	-	-	-	396.168.000	Year 2016
Tahun 2017	-	-	672.987.999	388.528.000	Year 2017
Tahun 2018	1.273.556.400	1.826.593.200	372.034.000	87.574.000	Year 2018
Tahun 2019	1.364.831.200	1.364.831.200	237.050.000	-	Year 2019
Tahun 2020	1.112.287.200	1.112.287.200	-	-	Year 2020
Tahun 2021	512.872.000	512.872.000	-	-	Year 2021
<b>Total pembayaran minimum</b>	<b>4.263.546.800</b>	<b>4.816.583.600</b>	<b>1.282.071.999</b>	<b>872.270.000</b>	<b>Total minimum payment</b>
Dikurangi beban bunga yang belum diakui	661.380.882	777.712.028	133.899.896	144.302.072	Less unrecognized interest expense
<b>Total utang pembiayaan konsumen</b>	<b>3.602.165.918</b>	<b>4.038.871.572</b>	<b>1.148.172.103</b>	<b>727.967.928</b>	<b>Total consumer financing payables</b>
Bagian utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.290.168.869	1.435.277.037	580.140.908	299.176.461	Current maturities of long-term consumer financing payables
<b>Utang pembiayaan konsumen setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>2.311.997.049</b>	<b>2.603.594.535</b>	<b>568.031.195</b>	<b>428.791.467</b>	<b>Consumer financing payables - net of current maturities</b>

Beberapa kendaraan milik Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen (Catatan 8).

Certain vehicles owned by the Company were used as collateral for consumer financing payables (Note 8).

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA  
NOTES TO THE  
FINANCIAL STATEMENTS  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. UTANG OBLIGASI KONVERSI**

Pada tanggal 24 November 2016, Perusahaan menerbitkan obligasi konversi tidak dikenakan bunga dengan nilai nominal Rp30.000.000.000, kepada GD Express Carrier Bhd, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia ("Pemegang Obligasi") yang terdiri dari dua puluh obligasi, masing-masing memiliki nilai nominal Rp1.500.000.000.

Penerbitan obligasi tersebut ditujukan untuk mendanai modal kerja Perusahaan.

Pemegang Obligasi memiliki hak untuk mengonversi obligasi menjadi saham, yang dilaksanakan atas diskresi tunggal dari Pemegang Obligasi, sewaktu-waktu dari tanggal penerbitan sampai 24 November 2021 atau selesainya penawaran umum perdana.

Jumlah saham yang akan diserahkan pada konversi obligasi adalah 10.000 saham atau 40% dari jumlah saham Perusahaan.

Selama periode perjanjian kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Obligasi, Perusahaan tidak diizinkan melakukan hal-hal berikut, antara lain:

- Menerbitkan saham baru dalam permodalan atau surat berharga lainnya;
- Mengubah atau menyesuaikan struktur permodalan kecuali untuk tujuan konversi pinjaman pemegang saham, penawaran perdana saham ke publik atau untuk konversi obligasi;
- Mengubah atau menyesuaikan ketentuan anggaran dasar;
- Melakukan rekonstruksi, peleburan, reorganisasi, penggabungan, pengambilalihan dan perubahan komposisi pemegang saham;
- Melakukan perubahan dalam komposisi dewan direksi dan dewan komisaris;
- Memperoleh tambahan fasilitas kredit lain;
- Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau menghapus seluruh atau sebagian aset Perusahaan; dan
- Membeli, memperoleh atau memesan saham dari anak perusahaan atau perusahaan afiliasi atau melakukan suntikan ekuitas atau investasi lain.

**15. CONVERTIBLE BONDS PAYABLE**

On November 24, 2016, the Company issued non-interest bearing convertible bonds with total nominal value of Rp30,000,000,000 to GD Express Carrier Bhd, a company incorporated under laws of Malaysia (the "Bondholder") comprising of twenty bonds, each having a par value of Rp1,500,000,000.

The issuance of the bond is intended to finance the Company's working capital.

The Bondholder has the right to convert the bonds into shares which can be exercised at the sole discretion of the Bondholder thereof, at any time from the issue date until November 24, 2021 or the completion of the initial public offering, whichever is earlier.

The number of shares to be delivered on conversion of a bond will be 10,000 shares or 40% of the Company's shares.

During the period of the loan, the Company is not allowed to carry out the following activities without written approval from the Bondholder, among others:

- Issue any new shares in its capital or any other securities;
- Amend or alter its capital structure, except for the purpose of the shareholder loan conversion, initial public offering or for the conversion of the bonds;
- Amend or alter any of the provisions of its article of association;
- Conduct a reconstruction, amalgamation, reorganization, merger, takeover and substantial change of shareholders;
- Make any changes in the composition of board of directors and board of commissioners;
- Obtain any additional credit facilities;
- Sell, transfer, lease out, lend or otherwise dispose all or substantially all of the Company's assets; and
- Purchase, acquire or subscribe for any shares in any subsidiary or affiliated company or otherwise make any injection of equity or other investment.



**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga**  
**Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017**  
**(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
**Three-Month Period Ended March 31, 2018 and**  
**Year Ended December 31, 2017**  
**(With Comparative Figures for the Three-Month**  
**Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and**  
**Years Ended December 31, 2016 and 2015)**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. UTANG OBLIGASI KONVERSI (lanjutan)**

Kecuali dikonversi sebelumnya atau suatu Pemberitahuan Konversi diterbitkan, penerbit wajib untuk menebus obligasi secara penuh (i) pada Tanggal Jatuh Tempo; atau (ii) pada saat selesainya IPO dan Pencatatan berikutnya atas Penerbit (mana yang lebih dulu); atau (iii) tanggal lain yang disepakati oleh para pihak.

Apabila penerbit tidak menebus obligasi berdasarkan ketentuan diatas, ketika telah jatuh tempo yang dibuktikan dengan pemberitahuan sebelumnya dari penerbit namun tidak kurang dari 20 (dua puluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Penerbit wajib membayar premi penebusan pada harga yang akan ditentukan oleh Para Pihak pada waktu tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo ("Premi Penebusan") dalam jumlah yang belum dibayar dari waktu ke waktu yang masih ada untuk periode yang dimulai satu hari setelah jatuh temponya dan berakhir pada tanggal dimana Pemegang Obligasi menerima pembayaran.

Nilai wajar komponen liabilitas, tercakup dalam pos obligasi konversi dan disajikan sebagai bagian liabilitas jangka panjang, dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah Indonesia untuk jangka waktu yang setara. Nilai wajar ditentukan saat penerbitan dan untuk selanjutnya dicatat pada nilai yang diamortisasi. Jumlah sisa, mewakili nilai opsi konversi ekuitas, dimasukkan pada ekuitas.

Obligasi konversi diakui pada laporan posisi keuangan yang dihitung sebagai berikut:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
Nilai nominal obligasi konversi yang diterbitkan	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	-	Face value of convertible bonds issued
Komponen ekuitas pada pengakuan awal	(9.676.579.524)	(9.676.579.524)	(9.676.579.524)	-	Equity component on initial recognition
Efek dari pengukuran pada biaya diamortisasi	2.239.320.342	1.794.447.394	137.179.701	-	Effect of measurement at amortized cost
<b>Komponen liabilitas - neto</b>	<b>22.562.740.818</b>	<b>22.117.867.870</b>	<b>20.460.600.177</b>	-	<b>Liability component - net</b>

Pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 2016, komponen ekuitas dari obligasi konversi setelah dikurangi efek pajak tangguhan sebesar Rp7.257.434.643 (Catatan 11).

Pada tanggal 3 Juli 2018, Pemegang Obligasi memberikan persetujuan tertulis kepada Perusahaan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam permodalan, perubahan anggaran dasar dan perubahan dewan direksi dan komisaris.

**15. CONVERTIBLE BONDS PAYABLE (continued)**

Unless previously converted or a conversion noticed is issued, the issuer is required to redeem the Bonds in full (i) on the Maturity Date; or (ii) upon the completion of the IPO and subsequent Listing of the Issuer (whichever is earlier); or (iii) any other date as agreed by the parties.

If the issuer could not redeem the bonds under clause above, when it is due evidenced with a prior notification from the issuer but not later than 20 (twenty) business days prior to the maturity date, the issuer shall pay redemption premium at the rate that will be decided by both Parties by no later than 5 (five) business days prior to the maturity date (the "Redemption Premium") on that unpaid amount from time to time outstanding for the period beginning one day after its due date and ending on the date the bondholder receive the payment

The fair value of the liability component, included in convertible bond line item and presented as part of non-current liabilities, was calculated using the interest rate of Indonesian government bonds for an equivalent term. The fair value was determined upon issue and subsequently carried at amortized cost. The residual amount, representing the value of the equity conversion option, is included in equity.

The convertible bonds recognized in the statement of financial position is calculated as follows:

As of March 31, 2018, December 31, 2017 and 2016, the equity component of convertible bonds after deferred tax effect amounted to Rp7,257,434,643 (Note 11).

On July 3, 2018, the Bondholder sent written approval to the Company in relation with the issuance of new shares in its capital, changes in article of association and changes in board of directors and commissioners.

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. MODAL SAHAM**

Berdasarkan Akta Notaris Veronika Sri Hartati, S.H., No. 94 tanggal 26 Maret 2018, pemegang saham Perusahaan menyetujui penambahan modal ditempatkan sebesar Rp10.000.000.000 sehingga menjadi Rp40.000.000.000.

Rincian atas penambahan modal ditempatkan adalah sebagai berikut:

- Budiyanto Darmastono sebanyak 99.500 saham senilai Rp9.950.000.000.
- Yuwono Darmastoto sebanyak 500 saham senilai Rp50.000.000.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

**Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully Paid**

	<b>Jumlah Saham/ Total Shares</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Total/Total</b>	
Budiyanto Darmastono (Direktur)	398.000	99,50%	39.800.000.000	Budiyanto Darmastono (Director)
Yuwono Darmastoto (Komisaris)	2.000	0,50%	200.000.000	Yuwono Darmastoto (Commissioner)
<b>Total</b>	<b>400.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>Total</b>

Berdasarkan Akta Notaris Veronika Sri Hartati, S.H., No. 39 tanggal 19 Desember 2016, pemegang saham Perusahaan menyetujui konversi atas pinjaman pemegang saham dari Budiyanto Darmastono sebesar Rp27.000.000.000 menjadi 270.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000, penambahan modal dasar sebesar Rp117.000.000.000 sehingga menjadi Rp120.000.000.000 dengan 1.200.000 saham, dan penambahan modal ditempatkan sebesar Rp27.000.000.000 sehingga menjadi Rp30.000.000.000.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully Paid**

	<b>Jumlah Saham/ Total Shares</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Total/Total</b>	
Budiyanto Darmastono (Direktur)	298.500	99,50%	29.850.000.000	Budiyanto Darmastono (Director)
Yuwono Darmastoto (Komisaris)	1.500	0,50%	150.000.000	Yuwono Darmastoto (Commissioner)
<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>Total</b>

Based on Notarial Deed No. 94 of Veronika Sri Hartati, S.H., dated March 26, 2018, the Company's shareholder approved the increase of issued capital amounting to Rp10,000,000,000 to become Rp40,000,000,000.

Details of the increase in issued share are as follows:

- Budiyanto Darmastono with 99,500 shares amounting to Rp9,950,000,000.
- Yuwono Darmastoto with 500 shares amounting to Rp50,000,000.

The Company's shareholding structure as of March 31, 2018 is as follows:

Based on Notarial Deed No. 39 of Veronika Sri Hartati, S.H., dated December 19, 2016, the Company's shareholder approved the conversion of shareholder's loan from Budiyanto Darmastono amounting to Rp27,000,000,000 to become 270,000 shares with nominal value of Rp100,000, increase in authorized capital amounting to Rp117,000,000,000 to become Rp120,000,000,000 with 1,200,000 shares, and increase in issued capital amounting to Rp27,000,000,000 to become Rp30,000,000,000.

The Company's shareholding structure as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris Bambang Sularso, S.H., No. 01 tanggal 1 Juli 2014, modal dasar Perusahaan sebesar Rp3.000.000.000 atau 30.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp3.000.000.000 yang terdiri dari 30.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**Ditempatkan dan Disetor Penuh/Issued and Fully Paid**

	<b>Jumlah Saham/ Total Shares</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Total/Total</b>	
Budyanto Darmastono (Direktur)	28.500	95,00%	2.850.000.000	Budyanto Darmastono (Director)
Yuwono Darmastoto (Komisaris)	1.500	5,00%	150.000.000	Yuwono Darmastoto (Commissioner)
<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>Total</b>

**16. SHARE CAPITAL (continued)**

Based on Notarial Deed No. 01 of Bambang Sularso, S.H., dated July 1, 2014, the Company's authorized capital amounted to Rp3,000,000,000 or 30,000 shares with nominal value Rp100,000 per share and issued shares amounted to Rp3,000,000,000 divided into 30,000 shares with par value of Rp100,000 per share.

The Company's shareholding structure as of December 31, 2015 is as follows:

**17. PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Maret/March 31,</b>		<b>31 Desember/December 31,</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
<b>Pihak ketiga</b>						<b>Third parties</b>
Pendapatan jasa kurir	48.210.455.463	31.240.768.981	148.157.471.533	117.389.617.196	60.010.565.916	Courier Service Revenue

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan.

**17. REVENUE**

This account consists of:

For the three-month periods ended March 31, 2018 and 2017, and years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, there are no revenue from individual customers exceeding 10% of total revenue.

**18. BEBAN LANGSUNG**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Maret/March 31,</b>		<b>31 Desember/December 31,</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
Gaji, tunjangan dan manfaat lainnya	17.975.917.346	12.239.251.005	58.565.967.175	34.900.489.322	27.406.499.649	Salaries, wages and other benefits
Biaya angkut dan kurir	15.364.385.901	9.088.822.108	45.774.906.300	33.722.971.915	19.990.174.290	Freight and courier costs
Sewa	2.029.102.012	1.812.790.417	8.091.764.875	5.031.619.851	3.441.380.456	Rent
Komisi	1.126.442.524	978.625.118	4.886.187.375	2.810.217.509	1.491.753.009	Commission
Penyusutan (Catatan 8)	424.814.946	103.380.375	1.164.461.713	218.442.847	169.372.004	Depreciation (Note 8)
Perbaikan dan pemeliharaan	145.532.082	124.126.749	421.594.572	312.467.858	186.862.779	Repairs and maintenance
Lain-lain	313.066.305	94.672.342	1.080.705.519	12.162.885.076	195.809.851	Others
<b>Total</b>	<b>37.379.261.116</b>	<b>24.441.668.114</b>	<b>119.985.587.529</b>	<b>89.159.094.378</b>	<b>52.881.852.038</b>	<b>Total</b>

**18. DIRECT COSTS**

This account consists of:

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the Financial Statements**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. BEBAN LANGSUNG (lanjutan)**

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat beban langsung kepada pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan.

**18. DIRECT COSTS (continued)**

For the three-month periods ended March 31, 2018 and 2017, and years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, there are no direct costs to suppliers exceeding 10% of total revenue.

**19. BEBAN USAHA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
<b>Beban penjualan</b>						<b>Selling expenses</b>
Gaji, upah, dan manfaat lainnya	1.059.554.551	675.771.001	3.045.470.905	1.885.300.844	1.657.547.734	Salaries, wages, and other benefits
Bahan bakar dan transport	68.105.253	54.075.816	238.100.882	254.904.206	342.269.663	Fuel and transport
Promosi	19.700.475	21.782.350	747.170.781	486.775.067	267.411.064	Promotion
Lain-lain	-	-	2.000.000	-	10.000.000	Others
Sub-total	1.147.360.279	751.629.167	4.032.742.568	2.626.980.117	2.277.228.461	Sub-total
<b>Beban umum dan administrasi</b>						<b>General and administrative expenses</b>
Gaji, upah, dan manfaat lainnya	3.076.218.222	2.089.809.469	13.901.487.605	7.835.694.736	5.008.165.469	Salaries, wages, and other benefits
Bahan bakar dan transport	1.985.573.540	1.199.497.602	5.853.225.677	3.596.918.258	2.007.800.092	Fuel and transport
Telepon, air, dan listrik	1.238.544.075	961.247.579	4.934.123.852	3.262.432.354	2.246.107.424	Telephone, water, and electricity
Sewa Kantor	871.949.210	944.866.224	3.086.609.954	2.378.735.714	2.268.556.388	Rent Office
Jasa profesional dan outsourcing	738.338.482	40.134.615	1.401.012.964	2.442.993.602	194.698.073	Professional and outsourcing services
Penyusutan (Catatan 8)	440.374.839	124.111.567	1.024.604.427	728.108.304	659.759.670	Depreciation (Note 8)
Perawatan	284.689.722	166.186.501	612.987.693	169.132.266	295.549.801	Maintenance
Piutang tak tertagih	180.162.509	1.013.919.296	2.944.298.240	-	-	Bad debt
Pajak dan perizinan	127.105.964	86.907.850	251.070.216	129.203.818	109.743.301	Tax and licenses
Lain-lain	1.209.698.330	428.253.163	3.567.335.175	2.060.376.724	307.635.907	Others
Sub-total	11.002.663.884	8.009.046.525	40.865.190.454	26.035.975.848	14.925.450.793	Sub-total
<b>Total</b>	<b>12.150.024.163</b>	<b>8.760.675.692</b>	<b>44.897.933.022</b>	<b>28.662.955.965</b>	<b>17.202.679.254</b>	<b>Total</b>

**20. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan**

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu: risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

**20. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT**

**a. Factors and Policies of Financial Risk Management**

In its operating, investing and financing activities, the Company is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the Financial Statements**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)**

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa debitur tidak membayar semua atau sebagian pinjaman atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan.
- Risiko likuiditas: risiko bahwa Perusahaan tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.
- Risiko pasar: risiko perubahan dalam suku bunga akan mempengaruhi pendapatan Perusahaan atau nilai dari kepemilikan instrumen keuangan.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan:

	31 Maret 2018/ March 31, 2018	31 Desember/December 31,			
		2017	2016	2015	
<b>Aset Keuangan</b>					<b>Financial Assets</b>
Kas dan bank	17.417.976.406	9.517.850.137	27.668.973.216	1.842.656.637	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - neto	25.059.236.954	20.835.756.160	16.153.830.973	18.919.139.455	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	1.464.269.810	1.635.162.466	1.982.350.516	375.992.075	Other receivables
Aset lain-lain (uang jaminan)	42.000.000	42.000.000	35.000.000	-	Other assets (security deposits)
<b>Total</b>	<b>43.983.483.170</b>	<b>32.030.768.763</b>	<b>45.840.154.705</b>	<b>21.137.788.167</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial Liabilities</b>
<b>Liabilitas keuangan jangka pendek</b>					<b>Short-term financial liabilities</b>
Utang usaha	5.159.306.520	3.911.364.596	464.574.897	227.490.367	Trade payables
Utang lain-lain	12.773.389.289	10.574.592.014	8.293.782.155	39.199.543.132	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	1.650.800.247	1.084.673.221	505.616.593	-	Accrued liabilities
Bagian utang pembiayaan					Current maturities of long-term consumer financing payables
konsumen jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.290.168.869	1.435.277.037	580.140.908	299.176.461	
<b>Liabilitas keuangan jangka panjang</b>					<b>Long-term financial liabilities</b>
Utang obligasi konversi	22.562.740.818	22.117.867.870	20.460.600.177	-	Convertible bonds payable
Utang pembiayaan konsumen jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2.311.997.049	2.603.594.535	568.031.195	428.791.467	Long-term consumer financing payables - net of current maturities
<b>Total</b>	<b>45.748.402.792</b>	<b>41.727.369.273</b>	<b>30.872.745.925</b>	<b>40.155.001.427</b>	<b>Total</b>

**Risiko Kredit**

Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan, dimana persetujuan atau penolakan konsumen baru dan kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

**20. Financial Instruments, Risks Management and Capital Management (continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk Management (continued)**

- *Credit risk: the risk of financial loss to the Company if debtor will not repay all or a portion of a loan or will not repay in a timely manner.*
- *Liquidity risk: the risk that the Company will not be able to meet its financial obligations as they fall due.*
- *Market risk: the risk that changes in interest rates will affect the Company's income or the value of its holdings of financial instruments.*

The following table summarizes the carrying amounts of financial assets and liabilities:

**Credit Risk**

The Company controls its exposure to credit risk by setting its credit policy in approval or rejection of new customers and compliance is monitored by the directors. As part of the process in approval or rejection, the customer reputation and track record is taken into consideration. There are no significant concentrations of credit risk.

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga**  
**Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017**  
**(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
**Three-Month Period Ended March 31, 2018 and**  
**Year Ended December 31, 2017**  
**(With Comparative Figures for the Three-Month**  
**Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and**  
**Years Ended December 31, 2016 and 2015)**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN**  
**RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN**  
**MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko**  
**Keuangan (lanjutan)**

**Risiko Kredit (lanjutan)**

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai eksposur risiko kredit berdasarkan evaluasi penurunan nilai pada aset keuangan Perusahaan per tanggal 31 Maret 2018:

	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/ <i>Total</i>	
Kas dan bank	17.417.976.406	-	-	17.417.976.406	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	8.697.605.276	16.361.631.678	2.534.798.240	27.594.035.194	Trade receivables
Piutang lain-lain	1.464.269.810	-	-	1.464.269.810	Other receivables
Aset lain-lain (uang jaminan)	42.000.000	-	-	42.000.000	Other assets (security deposits)
<b>Total</b>	<b>27.621.851.492</b>	<b>16.361.631.678</b>	<b>2.534.798.240</b>	<b>46.518.281.410</b>	<b>Total</b>

**Risiko Likuiditas**

Perusahaan dapat terekspos terhadap risiko likuiditas apabila ada perbedaan waktu signifikan antara penerimaan piutang dengan penyelesaian utang dan pinjaman.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi arus kas dan arus kas aktual secara berkesinambungan serta menjaga kecukupan kas dan bank dan fasilitas pinjaman yang tersedia. Risiko ini juga diminimalisir dengan mengelola berbagai sumber pembiayaan dari para pemberi pinjaman yang dapat diandalkan.

Tabel berikut ini menyajikan profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan sisa kewajiban kontraktual pada tanggal 31 Maret 2018:

	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Sampai dengan satu tahun/ <i>Up to a year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	
<b>Liabilitas Keuangan</b>				<b>Financial Liabilities</b>
Utang usaha	5.159.306.520	5.159.306.520	-	Trade payables
Utang lain-lain	12.773.389.289	12.773.389.289	-	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	1.650.800.247	1.650.800.247	-	Accrued liabilities
Utang pembiayaan konsumen	3.602.165.918	1.290.168.869	2.311.997.049	Consumer financing payables
Utang obligasi konversi	22.562.740.818	-	22.562.740.818	Convertible bonds payable
<b>Total</b>	<b>45.748.402.792</b>	<b>20.873.664.925</b>	<b>24.874.737.867</b>	<b>Total</b>

**20. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS**  
**MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT**  
**(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk**  
**Management (continued)**

**Credit Risk (continued)**

The following table provides information regarding the credit risk exposure based on impairment assessment on the Company's financial assets as of March 31, 2018:

**Liquidity Risk**

The Company would be exposed to liquidity risk if there is significant mismatch in the timing difference between the collection of receivables and settlement of payables and borrowings.

The Company manages the liquidity risk by ongoing monitoring over the projected and actual cash flows as well as the adequacy of cash on hand and in banks and available credit facilities. This risk is also minimized by managing diversified funding resources from reliable quality lenders.

The following table summarizes the maturity profiles of the Company's financial liabilities based on the remaining contractual obligations as of March 31, 2018:

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
 RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN  
 MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko  
 Keuangan (lanjutan)**

**Risiko Tingkat Bunga**

Perusahaan terekspos risiko tingkat suku bunga terutama menyangkut liabilitas berbunga.

Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Maret 2018.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jangka waktu pada tanggal 31 Maret 2018:

	Dalam satu tahun/ <i>Within one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Total/ Total	
Utang pembiayaan konsumen	1.290.168.869	2.311.997.049	3.602.165.918	<i>Consumer financing payables</i>
Utang obligasi konversi	-	22.562.740.818	22.562.740.818	<i>Convertible bonds payable</i>
<b>Total</b>	<b>1.290.168.869</b>	<b>24.874.737.867</b>	<b>26.164.906.736</b>	<b>Total</b>

Analisis sensitivitas untuk risiko suku bunga

Pada tanggal 31 Maret 2018, jika tingkat suku bunga pinjaman meningkat/menurun sebesar 0,5% dengan semua variabel konstan, rugi sebelum beban pajak untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar Rp131 juta terutama sebagai akibat kenaikan/penurunan biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Nilai buku (berdasarkan nilai nosional) dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan liabilitas yang masih harus dibayar dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena sebagian besar bersifat jangka pendek atau nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara handal.

**20. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
 MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
 (continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk  
 Management (continued)**

**Interest Rate Risk**

The Company's exposure to interest rate risk relates primarily to their interest-bearing liabilities.

There are no interest rate hedging activities in place as of March 31, 2018.

The following table analysis the breakdown of financial liabilities by maturity as of March 31, 2018:

	Dalam satu tahun/ <i>Within one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	Total/ Total	
Utang pembiayaan konsumen	1.290.168.869	2.311.997.049	3.602.165.918	<i>Consumer financing payables</i>
Utang obligasi konversi	-	22.562.740.818	22.562.740.818	<i>Convertible bonds payable</i>
<b>Total</b>	<b>1.290.168.869</b>	<b>24.874.737.867</b>	<b>26.164.906.736</b>	<b>Total</b>

Sensitivity analysis for interest rate risk

As of March 31, 2018, if the interest rates of the loans have been 0.5% higher/lower with all other variables held constant, the loss before tax expense for the three-month period then ended would have been Rp131 million lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on loans with floating interest rates.

**b. Fair Value of Financial Instruments**

The carrying amounts (based on notional amounts) of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables and accrued liabilities in the financial statements reasonably approximate their fair values because they are mostly short-term in nature or their fair values cannot be reliably determined.

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the Financial Statements**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal (lanjutan)**

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Uang jaminan tidak dinyatakan sebesar harga pasarnya dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal tanpa biaya berlebihan, dicatat pada nilai nominal. Adalah tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari uang jaminan karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti meskipun tidak diharapkan akan diselesaikan dalam 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan.

Utang pembiayaan konsumen merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga mengambang yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai wajarnya.

Nilai tercatat utang obligasi konversi merupakan nilai kini atas estimasi arus kas masa datang yang didiskonto pada suku bunga pasar yang digunakan pada saat pemisahan komponen liabilitas dan ekuitasnya.

**20. Financial Instruments, Risks Management and Capital Management (continued)**

**b. Fair Value of Financial Instruments (continued)**

Security deposits which are not stated at their quoted market prices and which fair values cannot be reliably measured without incurring excessive cost are carried at their nominal amount. It is not practical to estimate the fair value of the security deposit because there is no definite repayment term although it is not expected to be settled within 12 months after the date of the statement of financial position.

Consumer financing payables are liabilities with floating interest rates which are adjusted with the movements of market interest rates, thus the carrying values of the financial liabilities approximates their fair values.

The carrying amount of the convertible bonds payable represents the present value of the estimated future cash flows discounted at the market interest rate used upon the separation of its liability and equity components.

	31 Maret/March 31, 2018		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
<b>Aset Keuangan</b>			<b>Financial Assets</b>
Pinjaman yang diberikan dan piutang:			Loans and receivables:
Kas dan bank	17.417.976.406	17.417.976.406	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	25.059.236.954	25.059.236.954	Trade receivables
Piutang lain-lain	1.464.269.810	1.464.269.810	Other receivables
Aset lain-lain (uang jaminan)	42.000.000	42.000.000	Other asset (security deposits)
<b>Total</b>	<b>43.983.483.170</b>	<b>43.983.483.170</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>			<b>Financial Liabilities</b>
Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities at amortized cost:
Utang usaha	5.159.306.520	5.159.306.520	Trade payables
Utang lain-lain	12.773.389.289	12.773.389.289	Other payables
Liabilitas yang masih harus dibayar	1.650.800.247	1.650.800.247	Accrued liabilities
Utang pembiayaan konsumen	3.602.165.918	3.602.165.918	Consumer financing payables
Utang obligasi konversi	22.562.740.818	22.562.740.818	Convertible bonds payable
<b>Total</b>	<b>45.748.402.792</b>	<b>45.748.402.792</b>	<b>Total</b>



**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
 RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN  
 MODAL (lanjutan)**

**20. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
 MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
 (continued)**

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**b. Fair Value of Financial Instruments  
 (continued)**

	31 Desember/December 31, 2017	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
<b>Aset Keuangan</b>		
Pinjaman yang diberikan dan piutang:		
Kas dan bank	9.517.850.137	9.517.850.137
Piutang usaha	20.835.756.160	20.835.756.160
Piutang lain-lain	1.635.162.466	1.635.162.466
Aset lain-lain (uang jaminan)	42.000.000	42.000.000
<b>Total</b>	<b>32.030.768.763</b>	<b>32.030.768.763</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi:		
Utang usaha	3.911.364.596	3.911.364.596
Utang lain-lain	10.574.592.014	10.574.592.014
Liabilitas yang masih harus dibayar	1.084.673.221	1.084.673.221
Utang pembiayaan konsumen	4.038.871.572	4.038.871.572
Utang obligasi konversi	22.117.867.870	22.117.867.870
<b>Total</b>	<b>41.727.369.273</b>	<b>41.727.369.273</b>

**Financial Assets**  
 Loans and receivables:  
 Cash on hand and in banks  
 Trade receivables  
 Other receivables  
 Other asset (security deposits)

**Total**

**Financial Liabilities**

Financial liabilities at amortized cost:  
 Trade payables  
 Other payables  
 Accrued liabilities  
 Consumer financing payables  
 Convertible bonds payable

**Total**

	31 Desember/December 31, 2016	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
<b>Aset Keuangan</b>		
Pinjaman yang diberikan dan piutang:		
Kas dan bank	27.668.973.216	27.668.973.216
Piutang usaha	16.153.830.973	16.153.830.973
Piutang lain-lain	1.982.350.516	1.982.350.516
Aset lain-lain (uang jaminan)	35.000.000	35.000.000
<b>Total</b>	<b>45.840.154.705</b>	<b>45.840.154.705</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi:		
Utang usaha	464.574.897	464.574.897
Utang lain-lain	8.293.782.155	8.293.782.155
Liabilitas yang masih harus dibayar	505.616.593	505.616.593
Utang pembiayaan konsumen	1.148.172.103	1.148.172.103
Utang obligasi konversi	20.460.600.177	20.460.600.177
<b>Total</b>	<b>30.872.745.925</b>	<b>30.872.745.925</b>

**Financial Assets**  
 Loans and receivables:  
 Cash on hand and in banks  
 Trade receivables  
 Other receivables  
 Other asset (security deposits)

**Total**

**Financial Liabilities**

Financial liabilities at amortized cost:  
 Trade payables  
 Other payables  
 Accrued liabilities  
 Consumer financing payables  
 Convertible bonds payable

**Total**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN  
 RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN  
 MODAL (lanjutan)**

**20. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS  
 MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT  
 (continued)**

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**b. Fair Value of Financial Instruments  
 (continued)**

	31 Desember/December 31, 2015		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
<b>Aset Keuangan</b>			<b>Financial Assets</b>
Pinjaman yang diberikan dan piutang:			Loans and receivables:
Kas dan bank	1.842.656.637	1.842.656.637	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	18.919.139.455	18.919.139.455	Trade receivables
Piutang lain-lain	375.992.075	375.992.075	Other receivables
<b>Total</b>	<b>21.137.788.167</b>	<b>21.137.788.167</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>			<b>Financial Liabilities</b>
Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi:			Financial liabilities at amortized cost:
Utang usaha	227.490.367	227.490.367	Trade payables
Utang lain-lain	39.199.543.132	39.199.543.132	Other payables
Utang pembiayaan konsumen	727.967.928	727.967.928	Consumer financing payables
<b>Total</b>	<b>40.155.001.427</b>	<b>40.155.001.427</b>	<b>Total</b>

**c. Manajemen Modal**

**c. Capital Management**

Perusahaan bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan maksimalisasi nilai pemegang saham.

The Company aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximizing shareholders value.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas pada tanggal 31 Maret 2018, Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 5,30, 78,42, 1,87 dan (2,57).

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt to equity ratio. The debt to equity ratio as of March 31, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015 amounted to 5.30, 78.42, 1.87 and (2.57), respectively.

**21. INFORMASI SEGMENT**

**21. SEGMENT INFORMATION**

Perusahaan hanya memiliki satu segmen usaha, yaitu jasa pengiriman, sedangkan segmen usaha berdasarkan geografis sebagai berikut:

The Company only engages in one operating segment which is in courier services, while geographical segment is as follows:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
Pendapatan neto:						Net revenue:
Jabodetabek	42.651.636.580	27.078.032.399	128.286.467.292	109.184.037.768	55.653.939.740	Jabodetabek
Di luar Jabodetabek	5.558.818.883	4.162.736.582	19.871.004.241	8.205.579.428	4.356.626.176	Outside Jabodetabek
<b>Total</b>	<b>48.210.455.463</b>	<b>31.240.768.981</b>	<b>148.157.471.533</b>	<b>117.389.617.196</b>	<b>60.010.565.916</b>	<b>Total</b>

**PT Satria Antarana Prima**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. RUGI PER SAHAM**

- a. Perhitungan rugi per saham adalah sebagai berikut:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
Rugi per saham dasar	(5,28)	(6,31)	(57,24)	(16,18)	(343,25)	Basic earnings per share

- b. Jumlah saham

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar setelah mempertimbangkan dampak dari stock-split 1:1.000 pada tanggal 7 Juni 2018 yang menyebabkan adanya perubahan nilai nominal per saham dari Rp100.000 menjadi Rp100 adalah sebagai berikut:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
Dasar	308.333.000	300.000.000	300.000.000	52.500.000	30.000.000	Basic

- c. Total rugi periode/tahun berjalan

Rugi periode/tahun berjalan untuk perhitungan rugi per saham adalah sebagai berikut:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
Dasar	(1.627.746.462)	(1.892.005.783)	(17.172.745.573)	(849.227.781)	(10.297.648.858)	Basic

**22. LOSS PER SHARE**

- a. Loss per share is calculated as follows:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
Rugi per saham dasar	(5,28)	(6,31)	(57,24)	(16,18)	(343,25)	Basic earnings per share

- b. Number of shares outstanding

The weighted average number of shares used in calculating basic earnings per share after considering the effect of the stock-split of 1:1,000 on June 7, 2018 which caused a change in nominal value per share from Rp100,000 to Rp100 is as follows:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
Dasar	308.333.000	300.000.000	300.000.000	52.500.000	30.000.000	Basic

- c. Total loss for the period/year

Loss for the period/year used in calculating loss per share are as follows:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
Dasar	(1.627.746.462)	(1.892.005.783)	(17.172.745.573)	(849.227.781)	(10.297.648.858)	Basic

**23. PERJANJIAN PENTING**

Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama jasa pengiriman dengan pelanggan antara lain:

Pelanggan	Tanggal perjanjian/ Date of Agreement	Customer
PT Amindoway Jaya	Februari/February 1, 2017	PT Amindoway Jaya
PT Bank Central Asia Tbk	Februari/February 20, 2015	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Desember/December 23, 2016	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	Desember/December 16, 2014	PT Bank Permata Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	Desember/December 29, 2017	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

**23. SIGNIFICANT AGREEMENT**

The Company entered into an agreement with customers among others:

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga**  
**Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017**  
**(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
**Three-Month Period Ended March 31, 2018 and**  
**Year Ended December 31, 2017**  
**(With Comparative Figures for the Three-Month**  
**Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and**  
**Years Ended December 31, 2016 and 2015)**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

**23. SIGNIFICANT AGREEMENT (continued)**

<b>Pelanggan</b>	<b>Tanggal perjanjian/ Date of Agreement</b>	<b>Customer</b>
PT Home Credit Indonesia	Oktober/October 19, 2017	PT Home Credit Indonesia
PT ISS Indonesia	Oktober/October 30, 2017	PT ISS Indonesia
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Oktober/October 23, 2017	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Missi Idea Selaras	Januari/January 23, 2017	PT Missi Idea Selaras
PT Sophie Paris Indonesia	Juli/July 10, 2017	PT Sophie Paris Indonesia
PT Syngenta Indonesia	Maret/March 11, 2015	PT Syngenta Indonesia

Untuk mengirimkan dokumen atau barang sesuai dengan perjanjian. Pendapatan yang akan diterima oleh Perusahaan atas jasa tersebut ditentukan berdasarkan jumlah dokumen atau barang yang dikirimkan. Perjanjian tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

For delivering documents or goods in accordance with the agreement. Income that will be received from the customers is determined based on the number of document or goods delivered. These agreements were effective for 1 (one) year and can extended for 1 (one) year with terms and conditions as agreed.

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

**24. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, antara lain, sebagai berikut:

The Company entered into transaction with related parties as follows:

**Utang lain-lain**

**Other payables**

Pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, akun ini merupakan utang lain-lain kepada Budiyanto Darmastono masing-masing sebesar Rp7.871.735.250, Rp7.634.912.494, Rp4.906.683.784 dan Rp37.382.443.132. Utang ini merupakan pinjaman tanpa bunga dan jaminan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Persentase terhadap total liabilitas masing-masing sebesar 16,63%, 17,58%, 14,79% dan 92,85%.

As of March 31, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015, this account represents other payablesto Budiyanto Darmastono amounting to Rp7,871,735,250, Rp7,634,912,494, Rp4,906,683,784 and Rp37,382,443,132, respectively. This liability bears no interest and guarantee which is used for operational activities. Percentage to total liabilities amounted to 16.63%, 17.58%, 14.79% and 92.85%, respectively.

**Sewa**

**Rent**

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perusahaan melakukan perjanjian sewa kantor di Jalan Sisingamangaraja No. 48, Medan dengan Budiyanto Darmastono. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, jumlah beban sewa masing-masing sebesar Rp25.000.000, Rp25.000.000, Rp100.000.000, Rp53.333.332 dan Rp30.000.000. Persentase terhadap total beban langsung masing-masing sebesar 0,07%, 0,10%, 0,08%, 0,06% dan 0,06%.

In carrying out its operational activities, the Company entered into an office lease agreement at Jalan Sisingamangaraja No. 48, Medan with Budiyanto Darmastono. For the three-month periods ended March 31, 2018 and 2017, and December 31, 2017, 2016 and 2015, total rent expense amounted to Rp25,000,000, Rp25,000,000, Rp100,000,000, Rp53,333,332 and Rp30,000,000, respectively. Percentage to total direct costs amounted to 0.07%, 0.10%, 0.08%, 0.06% and 0.06%, respectively.

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT STRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**Sewa (lanjutan)**

Sehubungan dengan sewa tersebut diatas, saldo liabilitas yang masih harus dibayar Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, masing-masing sebesar Rp58.333.331 dan Rp33.333.332. Persentase terhadap total liabilitas masing-masing sebesar 0,12% dan 0,08%.

Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship
Budiyanto Darmastono	Pemegang saham dan Direktur/ Shareholder and Director

**24. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)**

**Rent (continued)**

In relation with the above rent transaction, the Company's accrued liabilities as of March 31, 2018 and December 31, 2017 amounted to Rp58,333,331 and Rp33,333,332, respectively. Percentage to total liabilities amounted to 0.12% and 0.08%, respectively.

Sifat Saldo Akun dan Transaksi/ Nature of Account and Transaction
Utang lain-lain, Liabilitas yang masih harus dibayar Sewa/Other liabilities, Accrued liabilities, Rent

**25. TRANSAKSI NON KAS**

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Perusahaan melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas dengan rincian sebagai berikut:

**25. NON-CASH TRANSACTIONS**

For the three-month periods ended March 31, 2018 and 2017, and for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, the Company had investing and financing transactions which did not require the use of cash and were excluded from the statements of cash flows as follows:

	31 Maret/March 31,		31 Desember/December 31,			
	2018	2017 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	2017	2016	2015	
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>						<b>INVESTING ACTIVITIES</b>
Penambahan aset tetap dari:						Additions of fixed assets through:
Reklasifikasi uang muka pembelian aset tetap ke aset tetap	92.000.000	350.891.400	2.070.000	-	-	Reclassification of advance payments on fixed assets
Utang lain-lain	43.000.000	-	48.180.000	119.901.000	-	Other payables
Utang pembiayaan konsumen	-	-	4.191.774.074	756.868.210	931.302.146	Consumer financing payables
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>						<b>FINANCING ACTIVITIES</b>
Konversi utang pemegang saham ke saham	-	-	-	27.000.000.000	-	Conversion of due to shareholders to capital

**26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

Pada tanggal 27 April 2018, Perusahaan mengirimkan surat kepada GD Express Carrier Bhd, yang menyatakan rencana Perusahaan untuk memperkuat posisi keuangan Perusahaan melalui penawaran umum perdana saham Perusahaan di Indonesia dan rencana pelunasan dipercepat untuk obligasi konversi.

**26. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD**

On April 27, 2018, the Company sent a letter to GD Express Carrier Bhd, which stated the Company's plan to strengthen the Company's financial position through an initial public offering of its shares in Indonesia and an early redemption of its convertible bonds.

Pada tanggal 15 Mei 2018, Perusahaan telah membentuk Sekretaris Perusahaan dengan susunan sebagai berikut:

On May 15, 2018, the Company established Corporate Secretary as follows:

**Sekretaris Perusahaan** : Denny Parhan : **Corporate Secretary**

**PT Satria Antarana Prima**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
 Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
 Year Ended December 31, 2017  
 (With Comparative Figures for the Three-Month  
 Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
 Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**  
**(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 32 tanggal 7 Juni 2018, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:

- Perubahan maksud dan tujuan Perusahaan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang jasa titipan, ekspedisi dan pergudangan, transportasi dan pengangkutan, jasa percetakan, keagenan, *outsourcing*, dan transaksi keuangan;
- Perubahan nama Perusahaan dari PT Satria Antarana Prima menjadi PT Satria Antarana Prima Tbk;
- Mengubah nilai nominal per lembar saham Perusahaan dari Rp100.000 per lembar menjadi Rp100 per lembar;
- Peningkatan modal dasar Perusahaan sebesar Rp40.000.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp160.000.000.000 atau sebesar 1.600.000.000 saham;

Susunan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya menjadi, sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham/Shareholders</b>	<b>Lembar saham/ Number of Shares</b>	<b>Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Nilai nominal dalam Rupiah/ Nominal Value in Rupiah</b>
Budyanto Darmastono	398.000.000	99,50%	39.800.000.000
Yuwono Darmastoto	2.000.000	0,50%	200.000.000
<b>Total</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000.000.000</b>

- Pelaksanaan Program ESA (*Employee Stock Allocation*), tata cara pelaksanaan akan ditentukan kemudian oleh Dewan Direksi;
- Melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perusahaan maksimal sejumlah 60% dari modal saham Perusahaan dengan nominal nilai Rp100 per lembar saham;
- Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Nancy Christanti  
 Komisaris Independen : Prilli Budi Pasravita Soetantyo

**Dewan Direktur**

Presiden Direktur : Budyanto Darmastono  
 Direktur : Untung Santoso  
 Direktur Independen : Alfred Taftazani

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
 Independent Commissioner

**Board of Directors**

President Director  
 Director  
 Independent Director

**26. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD**  
**(continued)**

Based on Notarial Deed No. 32 of Yulia, S.H., dated June 7, 2018, the Company's shareholders agreed, among others:

- Change of the Company's scope of activities, in accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to engage in courier service, freight forwarding and warehousing, transportation and handling, printing services, agency, *outsourcing* and financial transaction;
- Change in the Company's name from PT Satria Antara Prima to PT Satria Antarana Prima Tbk;
- Change the Company's par value per share from Rp100,000 per share to Rp100 per share;
- Increase in the Company's authorized capital amounting to Rp40,000,000,000 to Rp160,000,000,000 or 1,600,000,000 shares;

The composition of the Company's shareholders and their ownership will be as follows:

- Implementation of Employee Stock Allocation (ESA) program, procedure will be decided later by the Board of Directors;
- Conduct Initial Public Offering of the Company's shares, with maximum total of 60% shares capital of the Company, with nominal value of Rp100 per share;
- Change in the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors, as follows:

**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**26. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)**

Pada tanggal 22 Juni 2018, Perusahaan telah membentuk Komite Audit dan Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

**Komite Audit**

Ketua	:	Prilli Budi Pasravita Soetantyo	:
Anggota	:	Didi Achjari	:
Anggota	:	Hirdjan Syafi'i	:

**Audit Internal**

:	Arie Akbar	:
---	------------	---

Lebih lanjut, berdasarkan surat GD Express Carrier Bhd kepada Perusahaan pada tanggal 29 Juni 2018, Perusahaan dan GD Express Carrier Bhd telah menyetujui jumlah pelunasan atas obligasi konversi tersebut dengan total pembayaran sebesar Rp67.200.000.000, terdiri dari Rp30.000.000.000 nilai nominal obligasi konversi dan Rp37.200.000.000 premi penebusan. Penyelesaian atas pelunasan obligasi konversi dan premi penebusan akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah saham Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

**27. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019:

- ISAK No. 33 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:

- PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan".
- PSAK No. 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- PSAK No. 73 - "Sewa".
- Amandemen PSAK No. 15 - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- Amandemen PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

Perusahaan sedang menganalisis dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

**26. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)**

On June 22, 2018, the Company established Audit Committee and Internal Audit as follows:

**Audit Committee**

Chairman
Member
Member

**Internal Audit**

Furthermore, based on GD Express Carrier Bhd's letter to the Company dated June 29, 2018, the Company and GD Express Carrier Bhd agreed to pay the convertible bonds with total payment of Rp67,200,000,000, consisting of Rp30,000,000,000 par value and Rp37,200,000,000 redemption premium. The completion of convertible bond settlement and redemption premium will be made no later than 14 (days) after the Company is listed in Indonesian Stock Exchange.

**27. NEW ACCOUNTING STANDARDS**

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2018 that may have certain impact on the financial statements are as follows:

Effective on or after January 1, 2019:

- ISAK No. 33 - "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration".

Effective on or after January 1, 2020:

- PSAK No. 71 - "Financial Instruments".
- PSAK No. 72 - "Revenue from Contracts with Customers".
- PSAK No. 73 - "Leases".
- Amendments to PSAK No. 15 - "Investments in Associates and Joint Ventures Long-term Interests in Associates and Joint Ventures".
- Amendments to PSAK No. 71 - "Financial Instruments Prepayment Features with Negative Compensation".

The Company is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations on the Company's financial statements.

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal 31 Desember 2017**  
**(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga**  
**Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017**  
**(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada**  
**Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SATRIA ANTARAN PRIMA**  
**NOTES TO THE**  
**FINANCIAL STATEMENTS**  
**Three-Month Period Ended March 31, 2018 and**  
**Year Ended December 31, 2017**  
**(With Comparative Figures for the Three-Month**  
**Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and**  
**Years Ended December 31, 2016 and 2015)**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. KONTINJENSI**

Sehubungan dengan surat GD Express Carrier Bhd kepada Perusahaan pada tanggal 29 Juni 2018 (Catatan 26), seperti diuraikan secara rinci dalam Catatan 2, jika Perusahaan menghapuskan instrumen dapat dikonversi sebelum jatuh tempo melalui penebusan atau pembelian kembali secara dini yang tidak mengubah hak konversi semula, maka Perusahaan mengalokasikan imbalan yang dibayarkan dan biaya transaksi untuk pembelian kembali atau penebusan secara dini tersebut ke komponen liabilitas dan komponen ekuitas instrumen tersebut pada tanggal transaksi.

Pada tanggal 31 Maret 2018, jika nilai wajar utang obligasi konversi pada tanggal pelunasan dipercepat mendekati nilai wajarnya pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, dengan semua variabel konstan, akumulasi defisit Perusahaan akan meningkat dari sebesar Rp38.330.096.435 menjadi sebesar Rp68.253.061.385, sedangkan komponen ekuitas dari transaksi obligasi konversi akan menurun dari saldo positif sebesar Rp7.257.434.643 menjadi saldo negatif sebesar Rp5.597.544.793. Selain itu, rugi sebelum pajak Perusahaan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut akan meningkat dari sebesar Rp1.829.963.867 menjadi sebesar Rp33.612.243.613.

**29. KONDISI KEUANGAN**

Untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2018 dan 2017, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Perusahaan melaporkan rugi neto tahun berjalan masing-masing sebesar Rp1.627.746.462, Rp1.892.005.783, Rp17.172.745.573, Rp849.227.781 dan Rp10.297.648.858 yang mengakibatkan akumulasi kerugian masing-masing sebesar Rp38.330.096.435, Rp36.703.783.505, Rp19.530.854.508 dan Rp18.681.611.864 pada tanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Untuk mengatasi kondisi di atas, manajemen Perusahaan berencana untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memperbanyak portofolio pelanggan.
- Menambah fasilitas operasional
- Mempromosikan kerjasama ritel dan memperkuat sistem IT

**28. CONTINGENCY**

*In connection with GD Express Carrier Bhd's letter to the Company dated June 29, 2018 (Note 26), as discussed in details in Note 2, when the Company extinguishes a convertible instrument before maturity through an early redemption or repurchase in which the original conversion privileges are unchanged, the Company allocates the consideration paid and any transaction costs for the repurchase or redemption to the liability and equity components of the instrument at the date of the transaction.*

*As of March 31, 2018, if the fair value of the convertible bonds payable at the date of the early redemption approximates its fair value at the date of the completion of financial statements, with all other variables held constant, the Company's accumulated deficit would have increased from Rp38,330,096,435 to Rp68,253,061,385, while the equity component from convertible bond transactions would have decreased from a positive balance of Rp7,257,434,643 to a negative balance of Rp5,597,544,793. Moreover, the Company's loss before tax for the three-month period then ended would have increased from Rp1,829,963,867 to Rp33,612,243,613.*

**29. FINANCIAL CONDITION**

*For the three-month periods ended March 31, 2018 and 2017, and years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, the Company reported net loss of Rp1,627,746,462, Rp1,892,005,783, Rp17,172,745,573, Rp849,227,781 and Rp10,297,648,858, respectively, which resulted to accumulated losses of Rp38,330,096,435, Rp36,703,783,505, Rp19,530,854,508 and Rp18,681,611,864 as of March 31, 2018, December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively.*

*To address the above conditions, the Company's management plans as follow:*

- Increase customer portfolio.*
- Add operational facilities.*
- Promote retail collaboration and strengthen IT systems.*



**PT Satria Antarana Prima**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Maret 2018 dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2017  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Tiga  
Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017  
(Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015)  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT Satria Antarana Prima**  
**Notes to the**  
**Financial Statements**  
Three-Month Period Ended March 31, 2018 and  
Year Ended December 31, 2017  
(With Comparative Figures for the Three-Month  
Period Ended March 31, 2017 (Unaudited) and  
Years Ended December 31, 2016 and 2015)  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**29. Kondisi Keuangan (lanjutan)**

Perusahaan juga telah memperoleh surat dukungan dari pemegang saham untuk memberikan bantuan keuangan dan bantuan lainnya untuk kelanjutan operasi Perusahaan.

Laporan keuangan interim ini disusun atas dasar Perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, dan tidak termasuk penyesuaian yang mungkin timbul akibat ketidakpastian tersebut.

**30. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan**

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Laporan keuangan tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 (dengan angka perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. KNMT&R-21.08.2018/01 tanggal 21 Agustus 2018. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan dan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada Catatan 28 atas laporan keuangan sehubungan dengan tambahan pengungkapan kontinjensi.

**29. Financial Condition (continued)**

The Company has also obtained a letter of support from shareholders to provide financial and other assistance for the continuation of the Company's operations.

These interim financial statements have been prepared on the basis that the Company will continue as a going concern, and do not include any adjustments that might result from this outcome being uncertain.

**30. Reissuance of Financial Statements**

The Company issued its financial statements for the three-month period ended March 31, 2018 (with comparative figures for the three-month period ended March 31, 2017) and for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015. The financial statements for the three-month period ended March 31, 2018 (with comparative figures for the three-month period ended March 31, 2017) and for the years ended December 31, 2017 were audited by Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Public Accounting Firm with independent auditors' report No. KNMT&R-21.08.2018/01 dated August 21, 2018. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering and to comply with the statutory regulation in capital market, the financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the Notes 28 to the financial statements regarding additional disclosure in contingency.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# SAP

Express Courier

PT SATRIA  
ANTARAN PRIMA Tbk.



*Berkembang Bersama  
Sepanjang Masa*



**Administration Office & Warehouse**

Jl. Komodor Udara No. 28  
Halim Perdana Kusuma  
Jakarta Timur, Indonesia 13650

Email : [corp.secretary@sap-express.com](mailto:corp.secretary@sap-express.com)

Phone : 021 - 2280 6611

Website: [sap-express.id](http://sap-express.id)